

Kata Pengantar

Penyusunan laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan dari Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan ini berisi informasi mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri dengan sumber pembiayaan dari Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, Kreditor Swasta Asing, serta hibah luar negeri, antara lain Hibah Bank Dunia, Hibah Lembaga PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*), Pemerintah Amerika Serikat (*Millennium Challenge Corporation/MCC*), dan Hibah Jerman.

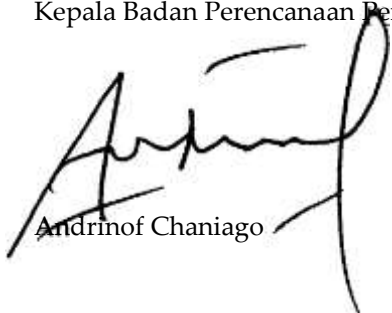
Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri edisi Triwulan III Tahun 2014 disusun berdasarkan i) hasil rapat pemantauan Triwulan III Tahun 2014 yang dilaksanakan di Bappenas pada bulan Oktober 2014; ii) hasil laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Bappenas dari Kementerian/Lembaga selaku instansi pelaksana sampai dengan tanggal 30 September 2014; dan iii) hasil kunjungan lapangan. Proyek-proyek yang dipantau dalam laporan ini merupakan proyek yang sudah efektif masa berlakunya dan belum melewati tanggal berakhirnya pinjaman (*closing date*).

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut, serta evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai yang diperoleh dari laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri dalam laporan ini dilihat dari realisasi pencapaian *output*/fisik dan tingkat penyerapan dana.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri termasuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap proyek pada Triwulan III Tahun 2014. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan pelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang berguna untuk meningkatkan kinerja kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Andrinof Chaniago

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I GAMBARAN UMUM	1
Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab....	6
Permasalahan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri	9
Pinjaman Proyek Yang Baru Efektif Dan Yang Berakhir Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2014.....	10
Pelaksanaan Hibah Luar Negeri.....	11
BAB II KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI	15
Kreditor Multilateral	15
Bank Dunia	16
ADB	33
IDB	48
Multilateral Lain	63
Kreditor Bilateral	66
JICA	67
Australia.....	76
Jerman	77
Korea	80
Perancis dan AFD	83
RR Tiongkok.....	87
Spanyol.....	90
Proyek Fasilitas Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)	92
BAB III KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI	97
Hibah Bank Dunia	98
Hibah Lembaga PBB.....	103
<i>United Nations Development Programme (UNDP)</i>	103
Hibah Pemerintah Amerika Serikat	110
<i>Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact</i>	110
Hibah Pemerintah Jerman	114
<i>Forest Programme</i>	114
BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI	119
<i>Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction Project</i>	119
<i>Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU)</i> 121	
BAB V PENUTUP	123
Kesimpulan.....	123
Tindak Lanjut	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2014.....	1
Tabel 1.2	Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman	2
Tabel 1.3	Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	6
Tabel 1.4	Proyek yang Baru Efektif di Triwulan III Tahun 2014	10
Tabel 1.5	Proyek yang Akan Berakhir Masa Berlakunya di Triwulan III Tahun 2014.....	11
Tabel 1.6	Proyek yang Dibatalkan Masa Berlakunya di Triwulan III Tahun 2014	11
Tabel 1.7	Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan III Tahun 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	12
Tabel 1.8	Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan III Tahun 2014 Berdasarkan Bentuk dan Jenis Hibah.....	12
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral.....	15
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	15
Tabel 2.3	Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan III TA 2014.....	18
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab, Triwulan III TA 2014	36
Tabel 2.5	Perbandingan Nilai PV Kegiatan Pinjaman ADB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV \leq 30,00) pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III TA 2014	47
Tabel 2.6	Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan III TA 2014	49
Tabel 2.8	Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain Menurut Instansi Penanggung Jawab.....	63
Tabel 2.9	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral.....	66
Tabel 2.10	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	66
Tabel 2.22	Daftar Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik	68
Tabel 2.11	Pinjaman Proyek yang Dibiayai JICA sampai dengan Triwulan III TA 2014.....	69
Tabel 2.12	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemen PU).....	69
Tabel 2.13	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemendikbud).....	70
Tabel 2.14	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemenhub)	71
Tabel 2.15	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemenkominfo).....	72
Tabel 2.16	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (BIG)	72
Tabel 2.17	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Bappenas).....	73
Tabel 2.18	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Pemda DKI)	73

Tabel 2.19	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (PT. PLN).....	74
Tabel 2.20	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (PT. Pertamina).....	75
Tabel 2.21	<i>Progress Variant</i> Proyek Pinjaman JICA.....	75
Tabel 2.23	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan III TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	77
Tabel 2.24	Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (Status Pada Triwulan II dan Triwulan III 2014).....	78
Tabel 2.27	Daftar Pinjaman Proyek Korea yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014.....	80
Tabel 2.25	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab	81
Tabel 2.26	<i>Progress Variant</i> Proyek Pinjaman Korea.....	81
Tabel 2.28	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan III TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	84
Tabel 2.29	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan III TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	84
Tabel 2.30	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman RR Tiongkok menurut Instansi Penanggung jawab.....	88
Tabel 2.31	<i>Progress Variant</i> Proyek Pinjaman RR Tiongkok	88
Tabel 2.33	Daftar Pinjaman Proyek Spanyol Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014.....	90
Tabel 2.32	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan III TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	91
Tabel 2.34	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan II TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab.....	93
Tabel 2.35	Total Alokasi, Komitmen Pinjaman, dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA	93
Tabel 2.36	Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014.....	94
Tabel 2.37	Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia.....	95
Tabel 2.38	Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN.....	95
Tabel 3.1	Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab.....	97
Tabel 3.2	Daftar Hibah Bank Dunia yang sedang Berjalan Triwulan III, Tahun 2014	98
Tabel 3.3	Gambaran umum Hibah Program MCC <i>Compact</i>	110
Tabel 3.4	Komponen Pembiayaan Program MCC <i>Compact</i>	111
Tabel 3.5	Penyerapan Anggaran <i>Compact</i>	111
Tabel 3.7	Pengesahan Hibah Langsung <i>Program Implementation Agreement-Grant Agreement</i> MCC s/d Triwulan III Tahun 2014	111
Tabel 3.8	Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan III Tahun 2014.....	112
Tabel 3.6	Rencana Tindak Lanjut Pada Triwulan IV	113
Tabel 3.9	Gambaran Penyerapan Anggaran Hibah Satker Pengelola Hibah MCC Apabila Dikurangi	113
Tabel 3.10	Rencana Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan IV Tahun 2014	114
Tabel 3.11	Gambaran Umum Hibah <i>Forest Programme</i>	114
Tabel 3.12	Gambaran Umum Hibah <i>Forest Programme</i>	116
Tabel 4.1	Profil Proyek <i>Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction</i>	119
Tabel 4.2	Profil Proyek <i>Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading</i>	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman	6
Gambar 1.2 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	9
Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab.....	16
Gambar 2.2 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan III TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	34
Gambar 2.3 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan III TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan	35
Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan III TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	48
Gambar 2.5 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan III TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan.	49
Gambar 3.1 Hibah Bank Dunia Menurut Sektor, Triwulan III TA 2014	98

BAB I GAMBARAN UMUM

Pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan III TA 2014 (posisi 30 September 2014) berjumlah 126 proyek (139 *Loan Agreement*) dan 54 proyek dari KSA/LPKE dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 18.042,89 juta. Penarikan pinjaman dari seluruh pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan III TA 2014 sebesar ekuivalen USD 6.796,44 juta atau 37,67% dari total nilai pinjaman, sehingga total pinjaman yang belum ditarik sebesar ekuivalen USD 11.246,44 juta. Realisasi penyerapan pada TA 2014 periode Januari – September 2014 mencapai ekuivalen USD 1.845,42 juta atau 56,87% dari target penyerapan TA 2014 sebesar ekuivalen USD 3.244,89 juta.

Jika dibandingkan dengan Triwulan II TA 2014, terdapat perbedaan jumlah nilai pinjaman proyek dan realisasi pinjaman proyek pada TA 2014. Perbedaan jumlah nilai pinjaman proyek disebabkan: i) adanya 5 proyek yang baru efektif dan baru dipantau di Triwulan III TA 2014, terdiri dari 3 proyek dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 443,4 juta dan 2 proyek Kepolisian RI yang dibiayai dari KSA/LPKE dengan total nilai pinjaman ekuivalen sebesar USD 21,86 juta; ii) adanya 1 proyek yang dibatalkan dan tidak dipantau lagi di Triwulan III TA 2014 sebesar ekuivalen USD 109,72 juta, yaitu *Project for Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR) dari Kementerian Keuangan; iii) terdapat 7 proyek yang berakhir masa berlakunya pada Triwulan II TA 2014, yaitu 3 proyek dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 912,92 juta dan 4 proyek atau kegiatan dari Kementerian Pertahanan (2 kegiatan TNI AU dan 2 kegiatan TNI AL) dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 590,97 juta; dan iv) perubahan nilai kurs mata uang asing dari triwulan sebelumnya karena tidak semua pinjaman luar negeri menggunakan USD.

Perbandingan rekapitulasi pinjaman luar negeri pada Triwulan II dan Triwulan III TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Triwulan II dan Triwulan III TA 2014

(Ekuivalen Juta USD)

TA 2014 Triwulan	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	TA		
		Jumlah	%		Target	Realisasi	%
II	19.696,28	7.550,41	38,33	12.145,89	3.163,04	1.306,42	41,30
III	18.042,89	6.796,44	37,67	11.246,44	3.244,89	1.845,42	56,87

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

Sumber pinjaman proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri berasal dari Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). Sumber pinjaman Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank* (ADB), *Islamic Development Bank* (IDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan *Saudi Fund*. Sumber pinjaman Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti

Japan Bank for International Cooperation (JICA), Australia, Jerman, Korea, Perancis, AFD, RR Tiongkok, dan Spanyol. Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*.

Dilihat dari sumber pinjamannya, 126 proyek pinjaman luar negeri di Triwulan III TA 2014 berasal dari 7 kelompok sumber pinjaman dengan rincian sebagai berikut: Bank Dunia sebanyak 23 proyek, ADB sebanyak 14 proyek dengan 17 *Loan Agreement*, JICA sebanyak 43 proyek, IDB sebanyak 16 proyek dengan 26 *Loan Agreement*, Multilateral lain sebanyak 5 proyek, dan Bilateral lain sebanyak 25 proyek. Sedangkan proyek yang berasal dari sumber pinjaman KSA/LPKE sebanyak 54 proyek.

Rekapitulasi pinjaman luar negeri berdasarkan sumber pinjaman sampai dengan Triwulan III TA 2014 menurut sumber pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	% Terhadap Total Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
							Target	Realisasi	%
I	Kreditor Multilateral	58	6.320,61	35,03	1.536,77	4.783,85	1.036,39	312,65	30,17
	Bank Dunia	23	3.829,85	21,23	935,35	2.894,50	622,43	221,20	35,54
	ADB	14	1.214,67	6,73	282,47	932,21	165,20	37,85	22,91
	IDB	16	1.077,89	5,97	234,38	843,51	229,25	47,34	20,65
	IFAD	4	162,21	0,90	84,57	77,64	19,51	6,26	32,10
	<i>Saudi Fund</i>	1	35,99	0,20	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00
II	Kreditor Bilateral	68	6.989,87	38,74	2.506,43	4.483,42	1.112,45	364,94	32,80
	JICA	43	5.320,32	29,49	1.905,33	3.414,98	757,31	219,23	28,95
	Australia	1	261,75	1,45	222,22	39,53	32,91	10,97	33,32
	Jerman	3	79,66	0,44	30,93	48,73	24,78	0,57	2,28
	Korea	7	357,34	1,98	58,79	298,55	37,58	4,75	12,65
	Perancis	4	259,22	1,44	25,55	233,66	21,13	6,85	32,43
	AFD	3	129,50	0,72	48,70	80,80	33,11	9,71	29,33
	RR Tiongkok	5	531,89	2,95	172,05	359,84	176,21	89,67	50,89
Spanyol	2	50,19	0,28	42,86	7,33	29,42	23,18	78,80	
III	KSA/LPKE	54	4.732,41	26,23	2.753,24	1.979,17	1.096,05	1.167,83	106,55
Total			18.042,89	100,00	6.796,44	11.246,44	3.244,89	1.845,42	56,87

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Jumlah proyek yang berasal dari sumber pinjaman Kreditor Multilateral di Triwulan III TA 2014 terdiri dari 58 proyek (71 *Loan Agreement*) dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.320,61 juta. Penarikan pinjaman sampai dengan September 2014 sebesar ekuivalen USD 1.536,77 juta, sehingga total pinjaman yang belum ditarik sebesar ekuivalen USD 4.783,85 juta. Realisasi penyerapan pada TA 2014 periode Januari – September 2014 mencapai ekuivalen USD 312,65 juta atau

30,17% dari target TA 2014 sebesar ekuivalen USD 1.036,39 juta. Masih rendahnya realisasi penyerapan Kreditor Multilateral di tahun 2014 disebabkan oleh beberapa faktor.

Permasalahan dalam proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia antara lain disebabkan: i) adanya kontrak yang berakhir melampaui waktu penutupan pinjaman, sehingga pembiayaan harus diteruskan dengan dana APBN dan menimbulkan permasalahan dalam administrasi kontrak seperti yang terjadi pada proyek *Dam Operational Improvement and Safety Project*; ii) adanya permasalahan dalam pembebasan lahan dan ijin pemakaian lahan di kawasan hutan seperti yang terjadi pada proyek *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project*, *Western Indonesia National Road Improvement*, dan *Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power*; iii) adanya permasalahan terkait instansi penanggung jawab proyek karena adanya penggabungan satu unit kerja ke dalam kementerian yang baru dibentuk seperti yang terjadi pada proyek *PNPM Rural*; iv) adanya *addendum* kontrak karena pekerjaan yang belum selesai dan rendahnya kinerja kontraktor seperti yang terjadi pada proyek *Power Transmission Development Project (PTD I) dan Scattered Transmission and Substation in Indonesia (Phase II)/IPTD II*; v) adanya inkonsistensi dalam pengusulan perubahan realokasi dana pinjaman dan perubahan rencana penyerapan seperti yang terjadi pada proyek *Health Professional Education Quality Project*; dan vi) adanya kekurangan alokasi dana dalam DIPA karena perencanaan yang kurang matang seperti yang terjadi pada proyek *Scholarships Program for Strengthening Reforming Institutions*.

Meskipun pada umumnya proyek-proyek yang dibiayai ADB tidak mengalami hambatan secara serius, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan, yang antara lain disebabkan oleh: i) adanya keterlambatan pembayaran karena terjadi eskalasi kontrak yang memerlukan evaluasi dari BPKP sebelum dilakukan pembayaran seperti yang terjadi pada proyek *Integrated Citarum Water Resources Management and Investment Program*; ii) adanya paket pekerjaan yang memerlukan lelang ulang seperti yang terjadi pada proyek *Regional Road Development*; iii) kurangnya kapasitas instansi pengusul dalam pelaksanaan lelang dan kurangnya peminat lelang seperti yang terjadi pada proyek *Polytechnic Education Development*; iv) kurangnya komitmen pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek seperti yang terjadi dalam pelaksanaan proyek *Infrastructure Reform Sector Development*; dan v) adanya keterlambatan dalam penerbitan DIPA yang mengakibatkan terhambatnya pengadaan material impor seperti yang terjadi dalam pelaksanaan proyek *West Kalimantan Power Grid Strengthening*.

Untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh IDB penyebab rendahnya penyerapan antara lain adalah: i) adanya kendala dalam penyelesaian Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3), sehingga melewati tahun anggaran dan pinjaman telah habis masa lakunya seperti yang terjadi pada proyek *Development and Upgrading of The State Univ of Jakarta (UNJ)*; ii) adanya proses evaluasi IDB terhadap setiap pengajuan kontrak yang terlalu lama, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti yang terjadi pada proyek *Development and Quality Improvement of the Semarang State University*; iii) tertundanya penyerapan dana pinjaman karena kontrak baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya seperti yang terjadi pada proyek *Revitalization of Vocational Training Centres (VTCs)*; iv) adanya permasalahan dalam proses lelang karena dualisme penggunaan *procurement guidelines* (Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan IDB *guidelines*) seperti yang terjadi pada proyek *Regional Road Development Project*; v) adanya *rescoping* paket pekerjaan *civil work* seperti yang terjadi pada proyek *Development of Belawan Port Phase 1*; dan vi) rendahnya kapasitas PMU dalam mempersiapkan proses pengadaan dan pemaketan jasa konsultansi seperti yang terjadi pada proyek *Support to Development of Islamic Higher Education*.

Saudi Fund yang membiayai proyek *Construction of Two University Hospitals in UNS and Andalas University* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai saat ini belum melakukan penarikan karena kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor di UNS akibat adanya persyaratan teknis dari bank pengirim. Adapun permasalahan yang terjadi di UNAND disebabkan karena *Note of Disbursement* (NoD) belum terbit tetapi dana sudah masuk ke dalam rekening. Permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh IFAD, yaitu terkendalanya pengadaan konsultan, sehingga diperlukan perpanjangan kontrak.

Jumlah proyek yang berasal dari sumber pinjaman Kreditor Bilateral di Triwulan III TA 2014 berjumlah 68 proyek dengan total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.989,87 juta. Penarikan pinjaman sampai dengan September 2014 sebesar ekuivalen USD 2.506,43 juta, sehingga nilai pinjaman yang belum ditarik sebesar ekuivalen USD 4.483,42 juta. Target penarikan pinjaman TA 2014 dari Kreditor Bilateral adalah sebesar ekuivalen USD 1.112,45 juta dengan realisasi dari periode Januari – September 2014 adalah sebesar ekuivalen USD 364,94 juta atau 32,8% dari target TA 2014.

Permasalahan yang terjadi pada proyek yang dibiayai JICA antara lain disebabkan oleh: i) terhambatnya penyelesaian Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) sebagai bukti pencairan pinjaman seperti yang terjadi pada proyek *Development of World Class University at University of Indonesia*; ii) adanya perselisihan mengenai besarnya denda akibat keterlambatan yang menyebabkan tertundanya pembayaran seperti yang terjadi pada proyek *ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province*; iii) adanya kesulitan dalam pengumpulan *statement of expenditure* seperti yang terjadi pada proyek *Professional Human Resources Development*; iv) terhambatnya pembebasan lahan akibat sulitnya relokasi utilitas, belum tersedianya dana ganti rugi, belum adanya kesepakatan dengan pemerintah daerah, dan adanya masalah sosial dengan masyarakat seperti yang terjadi pada proyek *Urban Flood Control System Improvement in Selected Areas* dan *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project*; v) adanya amandemen kontrak dan terhambatnya proses revisi DIPA seperti yang terjadi pada proyek *Participatory Irrigation Rehabilitation & Improvement Management (PIRIMP)* dan *Decentralization Irrigation System Improvement System*; dan vi) terhambatnya persetujuan Menteri karena proses pengadaan dinilai tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan pemerintah seperti yang terjadi pada *Hasanuddin University Engineering Faculty Development Project*.

Permasalahan yang terjadi pada proyek yang dibiayai pinjaman Pemerintah Korea antara lain: i) adanya keterlambatan penyelesaian pembayaran untuk tahun 2013 karena terhambatnya proses revisi DIPA TA 2014 seperti yang terjadi pada proyek *Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan* dan ii) adanya masalah dalam pengadaan barang/jasa seperti permasalahan pengadaan alat EO gas pada proyek *Strengthening of Teaching Hospitals in Indonesia*, dan masalah pengadaan serta mobilisasi peralatan konstruksi seperti yang terjadi pada proyek *Construction of Karian Multipurpose Dam* dan *Padang By-Pass Capacity Expansion*.

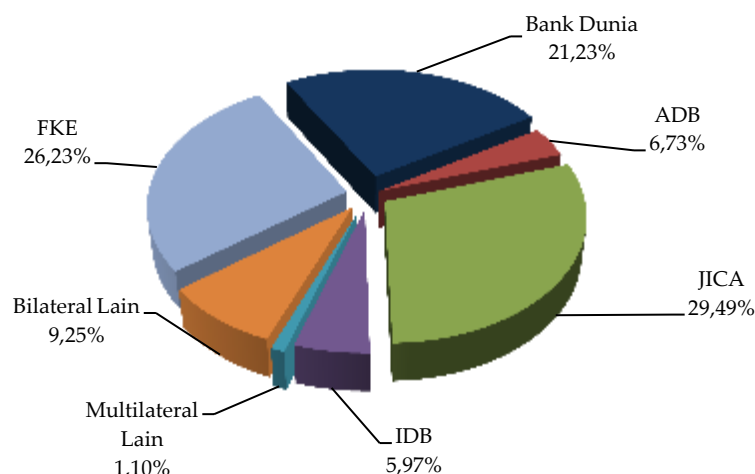
Penyerapan yang masih rendah juga menjadi permasalahan dalam proyek yang dibiayai oleh pinjaman Pemerintah RR Tiongkok karena adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek, yaitu: i) terhambatnya penyelesaian pekerjaan fisik karena adanya amandemen kontrak untuk perubahan beberapa item pekerjaan dan adanya permasalahan teknis di lapangan seperti yang terjadi pada proyek *Tayan Bridge Construction* dan proyek *Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant*; dan ii) terhambatnya penyelesaian pekerjaan fisik karena adanya masalah pembebasan lahan dan adanya perubahan desain akibat perubahan kondisi di lapangan seperti yang terjadi pada proyek *Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll* dan proyek *Toll Road Development of Medan-Kualanamu*.

Permasalahan dalam pelaksanaan proyek juga terjadi pada proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman Pemerintah Jerman. Permasalahan yang cukup menonjol selama Triwulan III TA 2014, yaitu: i) permasalahan karena kurangnya anggaran untuk pembayaran peralatan perawatan prasarana yang mengakibatkan terjadinya revisi DIPA dan realokasi anggaran seperti yang terjadi pada proyek *Track Maintenance Improvement Programme*; dan ii) permasalahan dalam harmonisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa seperti yang terjadi pada proyek *Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training*.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman proyek yang dibiayai dari pinjaman Pemerintah Perancis dan AFD selama Triwulan III TA 2014 adalah: i) terhambatnya penyelesaian Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) karena adanya kesulitan untuk memasukkan data Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (SP4HLN) ke dalam aplikasi SPAN seperti yang terjadi pada proyek *Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity*; ii) adanya permasalahan terkait mekanisme penarikan pinjaman karena masa laku yang berbeda antara pinjaman yang berasal dari AFD dan ADB seperti yang terjadi pada proyek *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement*; dan iii) adanya permasalahan pembebasan lahan dalam kawasan hutan produksi dan terlambatnya penerbitan DIPA yang terjadi pada proyek *Strengthening West Kalimantan Power Grid*, dan adanya kekurangan alokasi anggaran dalam DIPA TA 2014 seperti yang terjadi pada proyek *Infrastructure Development Space Oceanography*.

Jumlah proyek yang berasal dari sumber pinjaman KSA/LPKE terdiri dari 54 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 4.732,41 juta. Target penarikan pinjaman TA 2014 dari LPKE/KSA sebesar ekuivalen USD 1.096,05 juta dengan realisasi penyerapan sebesar USD 1.167,83 juta atau 106,55% dari total target penarikan pinjaman TA 2014. Instansi pelaksana yang dibiayai oleh KSA/LPKE adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia dan PT. PLN. Penyerapan pinjaman KSA/LPKE yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja sudah cukup baik, meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dalam triwulan ini yang perlu mendapat perhatian, yaitu: i) adanya amandemen kontrak yang mengubah output proyek dan adanya perubahan *lender* yang memakan waktu lama, sehingga terdapat 2 kegiatan alokasi KE 2002 dan 1 kegiatan alokasi KE 2004 yang belum selesai dilaksanakan; ii) adanya kesulitan dalam penerapan aplikasi SPAN, sehingga penyerapan anggaran belum dapat dilakukan seperti yang terjadi pada proyek-proyek yang dikelola Kepolisian RI; dan iii) adanya hambatan dalam proses kontrak dan proses izin penggunaan lokasi seperti yang terjadi pada proyek *Scattered Transmissions and Substations Package 8* yang dilaksanakan oleh PT. PLN.

Komposisi dan besaran (*share*) dari masing-masing sumber pinjaman terhadap total nilai pinjaman proyek dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Keterangan: - Pinjaman Multilateral lain terdiri pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund

- Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Australia, Jerman, Korea, Perancis, AFD, RR Tiongkok dan Spanyol

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Pada Triwulan III TA 2014 terdapat 21 Kementerian/Lembaga, 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 1 Pemda yang menjadi instansi penanggung jawab (*Executing Agency*) dari proyek-proyek yang sedang berjalan (*on-going*). Dari keseluruhan jumlah proyek *on-going*, 153 proyek merupakan pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, dimana sebagian besar berada pada 3 Kementerian (46 proyek di Kementerian Pertahanan, 45 proyek di Kementerian Pekerjaan Umum, dan 13 proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), 25 proyek merupakan pinjaman proyek yang diteruskanpinjamkan (SLA) kepada BUMN, dan 2 proyek diterushibahkan kepada Pemda DKI.

Rekapitulasi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	% Terhadap Total Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/Lembaga	153	13.783,34	76,39	6.121,94	44,42	7.661,39	2.790,28	1.725,84	61,85
Kemendagri	2	513,20	2,84	177,76	34,64	335,44	138,26	61,27	44,32
Kemenhan	46	4.638,96	25,71	2.723,91	58,72	1.915,05	1.065,13	1.161,05	109,01
Kemenkeu	1	59,97	0,33	29,68	49,49	30,29	28,06	11,08	39,49
Kementan	3	147,07	0,82	41,49	28,21	105,58	36,39	11,45	31,21
Kemendagri	9	1.250,03	6,93	154,05	12,32	1.095,97	218,66	23,46	10,73
Kemendikbud	13	811,80	4,50	172,27	21,22	639,53	183,65	14,55	7,92
Kemendes	3	76,39	0,42	66,19	86,65	10,20	1,08	0,00	0,00
Kemenag	4	172,05	0,95	0,86	0,50	171,19	45,77	0,16	0,35

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	% Terhadap Total Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kemen KP	5	186,76	1,04	23,34	12,50	163,42	27,46	6,97	25,38
Kemen PU	45	5.028,96	27,87	2.494,09	49,59	2.534,87	912,17	397,38	43,56
Kemenristek	1	95,00	0,53	0,08	0,08	94,92	12,02	0,07	0,58
Kemenakertrans	1	32,50	0,18	0,00	0,00	32,50	0,38	0,00	0,00
BPS	1	47,00	0,26	0,00	0,01	47,00	0,09	0,00	4,44
Bappenas	4	293,85	1,63	131,11	44,62	162,74	35,66	22,12	62,02
Kemenkominfo	2	87,53	0,49	10,80	12,34	76,72	12,56	0,00	0,00
Kepolisian RI	8	118,58	0,66	4,53	3,82	114,05	28,23	0,47	1,67
Badan Otorita Batam	1	50,56	0,28	0,00	0,00	50,56	1,52	0,00	0,00
BPKP	1	57,75	0,32	4,96	8,59	52,79	13,63	3,05	22,38
BMKG	1	38,44	0,21	25,55	66,47	12,89	11,96	6,85	57,26
LIPI	1	18,65	0,10	11,72	62,86	6,93	6,06	0,08	1,26
BIG	1	58,29	0,32	49,55	84,99	8,75	11,24	5,83	51,86
Diteruspinjamkan (SLA)	25	3.802,03	21,07	564,75	14,85	3.237,27	285,84	110,30	38,59
PT. PLN	20	3.025,77	16,77	369,30	12,21	2.656,46	229,95	84,39	36,70
PT. Pertamina	2	546,66	3,03	3,67	0,67	542,99	21,33	0,73	3,40
PT. SMI	2	200,00	1,11	191,78	95,89	8,22	33,40	25,18	75,39
PT. PII	1	29,60	0,16	0,00	0,00	29,60	1,16	0,00	0,00
Diterushibahkan	2	457,53	2,54	109,75	23,99	347,78	168,77	9,28	5,50
Pemda DKI	2	457,53	2,54	109,75	23,99	347,78	168,77	9,28	5,50
Total		18.042,89	100,00	6.796,44	37,67	11.246,44	3.244,89	1.845,42	56,87

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pada Triwulan III Tahun 2014 penyerapan untuk pinjaman luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga mencapai ekuivalen USD 6.121,94 juta atau 44,42% dari total nilai pinjaman luar negeri sebesar ekuivalen USD 13.783,33 juta. Realisasi penyerapan pinjaman di periode Januari – September 2014 mencapai ekuivalen USD 1.725,84 juta atau sebesar 61,85% dari target penyerapan sebesar ekuivalen USD 2.790,28 juta.

Pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada periode Januari – September 2014 proyek-proyek di beberapa Kementerian/Lembaga masih rendah penyerapannya antara lain: i) pada Kementerian Perhubungan rendahnya penyerapan disebabkan karena adanya 3 proyek yang belum melakukan penyerapan, 2 diantaranya merupakan proyek baru; ii) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan keterlambatan pelaksanaan proyek antara lain disebabkan oleh adanya inkonsistensi perubahan target dan rencana penyerapan, keterlambatan proses kontrak, keterlambatan penerbitan SP3, adanya gagal lelang karena kurangnya kapasitas pengelola proyek, dan adanya kekurangan alokasi anggaran DIPA, sehingga diperlukan revisi; iii) pada Kementerian Agama penyerapan baru dapat dilakukan pada akhir TA 2014 karena adanya beberapa hambatan, yaitu proses kontrak baru dapat diselesaikan pada akhir tahun 2014, sehingga penarikan uang muka baru dapat dilakukan pada TA 2015, dan adanya permasalahan dalam proses pengadaan; iv) pada Kementerian Riset dan Teknologi keterlambatan penyerapan disebabkan karena adanya keterlambatan seleksi karyasiswa untuk komponen beasiswa yang merupakan salah komponen dari proyek *Research and Innovation in Science and Technology Project* (RISET-Pro); v) pada Kepolisian RI rendahnya penyerapan disebabkan

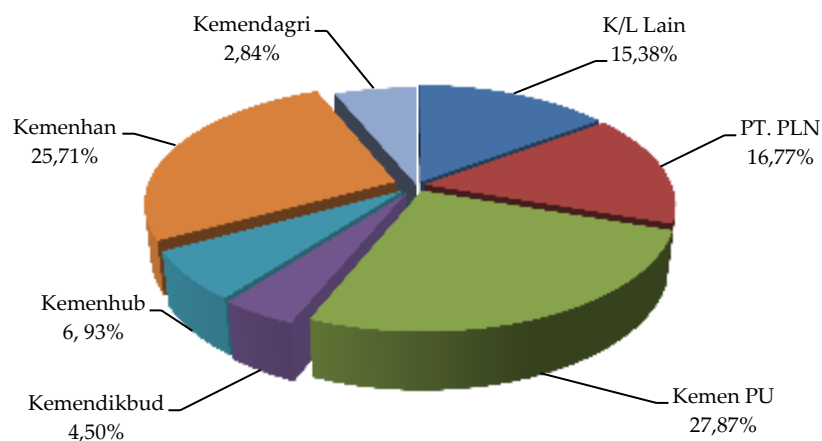
terhambatnya pelaksanaan proyek karena adanya pemotongan anggaran untuk Rupiah Murni pendamping, dan adanya keterlambatan dalam penyelesaian proses lelang; vi) pada PT. Pertamina keterlambatan penyerapan disebabkan karena paket pekerjaan baru dapat terkontrak pada bulan Agustus dan bulan Desember TA 2014; dan vii) pada Pemda DKI rendahnya penyerapan disebabkan oleh keterlambatan proses konstruksi karena adanya permasalahan dalam pembebasan dan penguasaan lahan, relokasi utilitas, dan penentuan lokasi untuk *ventilation and cooling tower*.

Selain menunjukkan Kementerian/Lembaga dengan penyerapan yang rendah, Tabel 1.3 juga menunjukkan Kementerian/Lembaga yang belum melakukan penyerapan sampai dengan akhir Triwulan III TA 2014, yaitu: i) pada Kementerian Kesehatan penyerapan terhambat karena adanya proses revisi DIPA untuk pembayaran pekerjaan tahun 2013 dan adanya kekurangan alokasi DIPA TA 2014 untuk jasa konsultasi dan pembelian alat kesehatan; ii) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhambatnya penyerapan terjadi karena terlambatnya proses kontrak, sehingga kontrak baru bisa dilakukan pada TA 2015, demikian pula dengan proses konstruksi; iii) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika penyerapan pada TA 2014 terhambat karena pembayaran paket pengadaan peralatan yang sudah selesai dilaksanakan belum bisa dilakukan akibat adanya perbedaan perhitungan jumlah denda keterlambatan; iv) pada BPS terhambatnya penyerapan terjadi karena terlambatnya pelaksanaan kegiatan, namun kondisi tersebut sudah mulai diatasi melalui restrukturisasi pelaksanaan proyek pada awal tahun 2014; v) pada PT. PII terhambatnya penyerapan terjadi akibat desain proyek yang berbeda dengan desain proyek pinjaman lainnya, karena dari nilai total pinjaman sebesar USD 29,6 juta, sebanyak USD 25 juta merupakan *standby loan* yang hanya dapat dicairkan apabila terdapat sub proyek yang meminta penjaminan dari PT. PII; dan vi) pada Badan Otorita Batam terhambatnya penyerapan disebabkan pelaksana proyek masih menyelesaikan proses revisi dokumen AMDAL yang dibutuhkan sebagai prasyarat efektifnya kontrak.

Total nilai pinjaman dari proyek yang diteruskan sebesar ekuivalen USD 3.802,03 juta, dan penyerapannya sampai dengan Triwulan III TA 2014 mencapai ekuivalen USD 564,76 juta. Realisasi penyerapan pinjaman di periode Januari – September 2014 mencapai ekuivalen USD 110,30 juta atau sebesar 38,59% dari target penyerapan sebesar ekuivalen USD 285,84 juta. Jika dilihat dari Tabel 1.3, PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT. PII) masih belum melakukan penarikan di triwulan ini karena belum ada sub proyek yang meminta penjaminan.

Proyek yang terus dihibahkan memiliki nilai sebesar ekuivalen USD 457,53 juta dengan penyerapan sampai dengan Triwulan III TA 2014 mencapai ekuivalen USD 109,75 juta dan realisasi penyerapan pada Triwulan III Tahun 2014 mencapai ekuivalen USD 9,28 juta atau sebesar 5,5% dari target penyerapan ekuivalen USD 168,77 juta. Proyek yang terus dihibahkan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu proyek *E/S Jakarta Mass Rapid Transit System* dan *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project*.

Komposisi dan besaran (*share*) pinjaman luar negeri dari masing-masing Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemda DKI selaku instansi penanggung jawab dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab
 Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

PERMASALAHAN PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman luar negeri dapat diidentifikasi dari hasil rapat pemantauan Triwulan III TA 2014, hasil laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Bappenas, dan hasil kunjungan lapangan. Dari keseluruhan permasalahan tersebut, terdapat permasalahan yang sering kali muncul di beberapa proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri, yaitu:

- Permasalahan pengadaan lahan yang meliputi beberapa permasalahan, antara lain: i) ketersediaan anggaran untuk pembebasan lahan; ii) kesepakatan ganti rugi; iii) penolakan masyarakat dan masalah sosial lainnya; iv) perijinan pemakaian lahan di kawasan hutan (ijin tukar menukar kawasan hutan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan); dan v) rekomendasi teknis dari BPN maupun pemda untuk ijin penetapan lokasi. Permasalahan pengadaan atau pembebasan lahan masih menjadi kendala terutama pada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum seperti pada proyek *Urban Flood Control System Improvement in Selected Areas*, *Regional Solid Waste Management for Mamminasata*, dan *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit*. Permasalahan pengadaan lahan juga masih menjadi kendala yang mendominasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh PT. PLN seperti pada proyek *Hydroelectric Power Plant Construction*, *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction*, *North-West Sumatera Inter-Connection Transmission Line Construction*, *Engineering Services for Java Sumatera Interconnection Transmission Line*, *Java Sumatera Interconnection 500 kV Line (HVDC) Stage II*, *Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)*, *Scattered Transmission and Substation Project in Indonesia-Package 8*, *Upper Cisokan Pumped Storage Hydro-Electrical Power (1040 MW)*, dan *West Kalimantan Power Grid Strengthening*. Tindak lanjut yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melakukan percepatan proses perijinan dan menyusun dokumen perencanaan pembebasan lahan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Permasalahan pengadaan barang dan jasa, antara lain: i) proses persetujuan *lender* (penerbitan NOL) yang cukup lama; ii) kegagalan proses lelang karena kurangnya peminat; dan iii) adanya perbedaan mekanisme pengadaan antara ketentuan *lender* dan instansi pelaksana, seperti penerapan sistem *full e-procurement* dengan *non e-procurement*. Permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi kendala terutama pada proyek-proyek Kementerian Pekerjaan

Umum seperti pada proyek *Dam Operational Improvement & Safety Project, Upper Citarum Basin Flood Management, Regional Road Development* dan *Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi and Lower Progo River Areas Phase I*. Permasalahan pengadaan barang dan jasa juga masih terjadi pada proyek-proyek yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti pada proyek *Development and Quality Improvement of State University of Semarang* dan *Development and Upgrading of State University of Padang*.

- Permasalahan dalam proses pencairan dan pencatatan, antara lain: i) keterlambatan penerbitan DIPA; ii) adanya kesulitan dalam penggunaan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); dan iii) keterlambatan penyelesaian Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atau SP3 yang melampaui tahun anggaran. Permasalahan SP3 (pencatatan) terjadi di beberapa proyek seperti pada proyek *Strengthening of Teaching Hospital* dan *Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan* yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Adapun kesulitan dalam penggunaan aplikasi SPAN untuk proses pencairan masih terjadi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan PT. PLN.
- Permasalahan akibat kekurangan/kelebihan alokasi anggaran dalam DIPA, adanya perencanaan yang kurang baik, dan adanya perbedaan pagu sehingga diperlukan Revisi DIPA. Proyek-proyek yang mengalami permasalahan tersebut, yaitu proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan mengajukan revisi DIPA dan mempercepat proses revisi DIPA.

PINJAMAN PROYEK YANG BARU EFEKTIF DAN YANG BERAKHIR PADA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2014

Terdapat 3 proyek yang dibiayai dari ADB dengan 5 *Loan Agreement*, dan 2 proyek Kepolisian RI yang dibiayai dari KSA/LPKE yang baru efektif dan dipantau pada Triwulan III TA 2014, yaitu *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2, Metropolitan Sanitation Management Investment Project* yang terdiri dari 2 *Loan Agreement*, *Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing* yang terdiri dari 2 *Loan Agreement*, *Radio Trunking Polda Jabar*, dan *Radio Trunking Polda Sumbar*. Detail proyek-proyek baru tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Proyek yang Baru Efektif di Triwulan III Tahun 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Loan/ Nomor Register	Instansi Penanggung Jawab	Nama Proyek	Masa Laku Loan	Nilai Loan
ADB					
1	3122-INO	Kemen PU	<i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2</i>	17/07/2014 - 30/06/2018	74,40
2	3123-INO/ 8280-INO	Kemen PU	<i>Metropolitan Sanitation Management Investment Project</i>	09/07/2014 - 31/12/2020	120,00
3	3083-INO/ 8276-INO	PT. PLN	<i>Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing</i>	29/09/2014 - 30/09/2019	249,00
KSA/LPKE					
4	21691901	Kepolisian RI	<i>Radio Trunking Polda Jabar</i>	17/04/2014 - ...	14,65

No	Kode Loan/ Nomor Register	Instansi Penanggung Jawab	Nama Proyek	Masa Laku Loan	Nilai Loan
5	40298801	Kepolisian RI	Radio Trunking Polda Sumbar	17/04/2014 - ...	7,21
Total					465,26

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Proyek yang akan berakhir masa berlakunya namun masih di pantau di Triwulan III TA 2014 berjumlah 3 proyek, proyek-proyek tersebut terdiri dari 2 proyek JICA, dan 1 proyek IDB. Untuk lebih detail proyek yang berakhir masa berlakunya pada triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Proyek yang Akan Berakhir Masa Berlakunya di Triwulan III Tahun 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Loan	Instansi Penanggung Jawab	Nama Proyek	Masa Laku Loan	Nilai Loan	Sisa Loan
JICA						
1	IP-524	Kemen PU	Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi/Progo River Basin and Mt. Bawakaraeng	28/07/2005 - 28/07/2014	150,34	0,06
2	IP-543	Kemen PU	Regional Infrastructure for Social & Economic Development	29/07/2007 - 29/07/2014	215,13	27,37
IDB						
3	IND-148	Kemen PU	PNPM-Integrated Community Driven Development II	24/09/2011 - 24/09/2014	136,00	0,00
Total					501,47	27,43

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Selain itu, terdapat 1 proyek yang dibatalkan dan tidak dipantau di Triwulan III TA 2014 yaitu *Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR)* dari Bank Dunia dengan instansi penanggung jawab Kementerian Keuangan. Proyek ini disepakati untuk dibatalkan setelah melalui diskusi cukup panjang karena kegagalan pengadaan Paket *Core Tax* yang merupakan komponen utama proyek ini.

Tabel 1.6 Proyek yang Dibatalkan Masa Berlakunya di Triwulan III Tahun 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Loan	Instansi Penanggung Jawab	Nama Proyek	Masa Laku Loan	Nilai Loan	Sisa Loan
Bank Dunia						
1	7631-ID	Kemenkeu	Project for Indonesian Tax Administration Reform	31/08/2009 - 31/12/2015	110,00	109,72

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Hibah luar negeri yang dipantau pelaksanaannya di Triwulan III TA 2014 berjumlah 143 proyek hibah yang dilaporkan oleh 19 Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 714 juta. Rekapitulasi pelaksanaan hibah luar negeri pada triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan III Tahun 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab
(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Hibah	Realisasi Penyerapan TA 2014
1	Kemen PU	6	239,57	13,97
2	Kemendagri	2	14,28	0,00
3	Kemen LH	15	42,84	1,07
4	Kemen ESDM	7	29,55	0,00
5	Kemenkominfo	1	1,87	0,01
6	Kementan	73	123,57	0,76
7	Kemen PDT	1	1,88	0,18
8	Kemenhub	2	44,79	0,20
9	Kemen Perindustrian	4	1,57	0,02
10	Kemenkumham	2	0,18	0,00
11	Kemensetneg-UKP4	2	107,72	0,00
12	Kemensos RI	2	0,40	0,09
13	Bappenas	8	67,38	34,81
14	DNPI	4	6,94	0,00
15	LIPi	6	0,98	0,60
16	BKKBN	1	0,44	0,22
17	Lemhanas	1	1,90	0,00
18	BPK RI	3	5,59	0,00
19	KPK	3	22,57	0,00
Total		143	714,00	51,94

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima dan dikelola oleh masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut, hibah luar negeri pada triwulan ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.8 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan III Tahun 2014 Berdasarkan Bentuk dan Jenis Hibah
(Ekuivalen Juta USD)

Hibah	Jumlah	Nilai
Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang	67	78,72
Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga	44	290,19
Hibah Terencana	32	345,09
Total	143	714,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

- **Pemantauan hibah luar negeri bersumber dari hibah Bank Dunia**

Jumlah kegiatan *on-going* yang didanai hibah Bank Dunia hingga Oktober 2014 adalah 21 proyek dengan total nilai hibah sebesar USD 319,00 juta. Fokus kegiatan yang didanai hibah Bank Dunia mencakup: i) sektor pembangunan sosial, perkotaan dan pedesaan; ii) sektor lingkungan dan sumberdaya alam; iii) sektor energi dan ekstraksi; iv) sektor air bersih dan sanitasi; dan v) penguatan sistem pemerintahan. Pada Triwulan III TA 2014, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 4 kegiatan hibah Bank Dunia yang akan selesai, yaitu: i) *Global Partnership Output Based Aid (GPOBA) – Extending Telecommunication in Rural Indonesia Project*; ii) *Support to the Implementation of the Extrative Industries Transparency Initiative (EITI)*; iii) *Additional Financing for the Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project in Central Java and Yogyakarta (REKOMPAK)*; iv) *Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Facility Project (WASPOLA)*.

- **Pemantauan hibah luar negeri bersumber dari hibah lembaga PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*)**

Sejak tahun 2014, pemantauan terhadap hibah lembaga-lembaga PBB difokuskan pada kegiatan hibah yang terdaftar dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH). Jumlah hibah *on going* lembaga-lembaga PBB yang tercatat dalam DRKH adalah 11 kegiatan hibah, yang dikelola oleh 7 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah ekuivalen USD 37,69 juta. Kementerian Lingkungan Hidup merupakan instansi pengelola hibah lembaga PBB terbesar dengan nilai hibah ekuivalen USD 10,17 juta, yang meliputi 3 kegiatan.

- **Pemantauan hibah luar negeri bersumber dari hibah Pemerintah Amerika Serikat (*Millennium Challenge Corporation/MCC*)**

Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah institusi independen Pemerintah AS yang menyalurkan bantuan dengan misi penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. MCC menyalurkan hibah kepada negara mitra dalam bentuk program *Threshold* dan *Compact*. Program *Threshold* merupakan hibah kecil yang diberikan kepada negara-negara dengan kriteria tertentu dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kebijakan mereka. Program *Compact* adalah hibah bersaing dalam jumlah besar yang diberikan kepada negara-negara yang telah berhasil melewati skor median korupsi dan berhasil melaksanakan program *Threshold*. Hibah program *Compact* yang dikelola Kementerian PPN/Bappenas saat ini mencapai nilai USD 47,63 juta yang digunakan untuk membiayai 5 komponen kegiatan, yaitu *Green Prosperity, Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting, Procurement Modernization, Administration and Control, dan Monitoring and Evaluation*.

- **Pemantauan hibah luar negeri bersumber dari hibah Jerman**

Salah satu kegiatan hibah yang didanai oleh Pemerintah Jerman adalah *Forest Programme*, yaitu sebuah program yang berkontribusi untuk mendukung kebijakan pengurangan emisi gas buang akibat kerusakan hutan dan degradasi hutan (REDD+). Kegiatan hibah *Forest Programme* dikelola oleh Kementerian Kehutanan dengan total nilai hibah mencapai ekuivalen USD 25,32 juta, dan dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, dan Kabupaten Hulu Kalimantan Barat.

BAB II

KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

KREDITOR MULTILATERAL

Total proyek pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 (posisi 30 September 2014) berjumlah 58 proyek (71 *Loan Agreement*) dengan nilai total pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.320,61 juta. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 23 proyek Bank Dunia, 14 proyek ADB, 16 proyek IDB, 4 proyek IFAD, dan 1 proyek *Saudi Fund*. Realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III TA 2014 mencapai ekuivalen USD 1.536,77 juta atau setara dengan 24,31% dari total nilai pinjaman. Adapun nilai realisasi pada triwulan ini sebesar ekuivalen USD 312,65 juta.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	Bank Dunia	23	3.829,85	935,35	24,42	2.894,50	622,43	221,20	35,54
2	ADB	14	1.214,67	282,47	23,25	932,21	165,20	37,85	22,91
3	IDB	16	1.077,89	234,38	21,74	843,51	229,25	47,34	20,65
4	IFAD	4	162,21	84,57	51,98	77,64	19,51	6,26	32,10
5	<i>Saudi Fund</i>	1	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00
Total		58	6.320,61	1.536,77	24,31	4.783,85	1.036,39	312,65	30,17

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan instansi penanggung jawab, sebanyak 48 proyek pinjaman dari Kreditor Multilateral dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan total nilai mencapai ekuivalen USD 4.252,51 juta dan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai ekuivalen USD 1.261,86 juta atau setara dengan 29,67%. Proyek diteruspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) berjumlah 10 proyek dengan total nilai mencapai ekuivalen USD 2.068,1 juta dan penyerapan hingga triwulan ini mencapai ekuivalen USD 274,9 juta atau setara dengan 13,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		48	4.252,51	1.261,86	29,67	2.990,65	925,57	253,48	27,39
1	Kemendagri	2	513,20	177,76	34,64	335,44	138,26	61,27	44,32
2	Kemenkeu	1	59,97	29,68	49,49	30,29	28,06	11,08	39,49
3	Kementan	3	147,07	41,49	28,21	105,58	36,69	11,45	31,21
4	Kemenhub	1	87,55	0,80	0,91	86,75	2,62	0,32	12,21
5	Kemendikbud	9	530,66	73,89	13,92	456,77	118,77	5,48	4,61
6	Kemenag	4	172,05	0,86	0,50	171,19	45,77	0,16	0,35
7	Kemen KP	4	156,76	9,39	5,99	147,37	15,78	1,58	10,01
8	Kemen PU	18	2.212,75	854,06	38,60	1.358,69	485,28	139,44	28,73

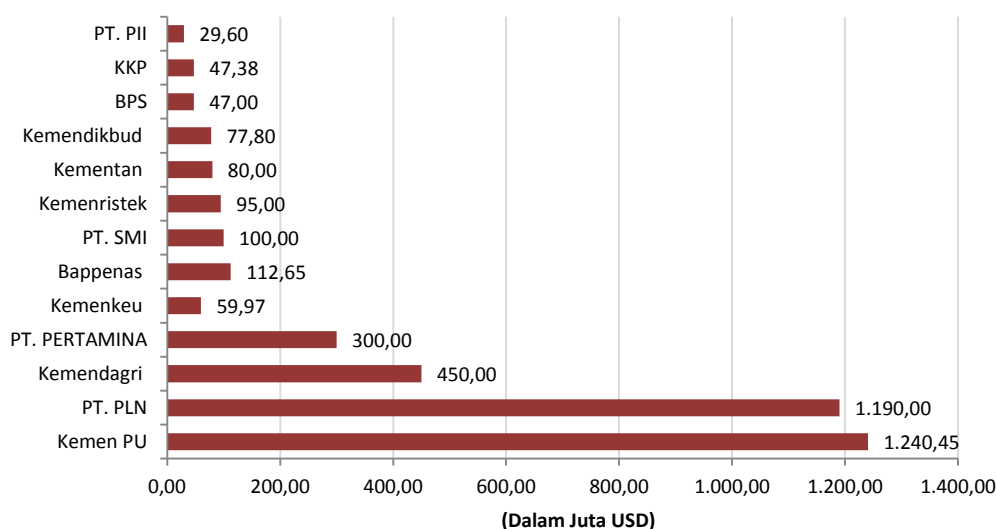
No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
9	Kemenristek	1	95,00	0,08	0,08	94,92	12,02	0,07	0,58
10	Kemenakertrans	1	32,50	0,00	0,00	32,50	0,38	0,00	0,00
11	BPS	1	47,00	0,00	0,01	47,00	0,09	0,00	4,44
12	Bappenas	2	140,25	68,89	49,12	71,36	28,21	19,56	69,34
13	BPKP	1	57,75	4,96	8,59	52,79	13,63	3,05	22,38
Diteruspinjamkan (SLA)		10	2.068,10	274,90	13,29	1.793,21	110,81	59,18	53,41
14	PT. PLN	6	1.538,50	83,12	5,40	1.455,38	67,70	34,00	50,22
15	PT. Pertamina	1	300,00	0,00	0,00	300,00	8,55	0,00	0,00
16	PT. SMI	2	200,00	191,78	95,89	8,22	33,40	25,18	75,39
17	PT. PII	1	29,60	0,00	0,00	29,60	1,16	0,00	0,00
Total		58	6.320,61	1.536,77	24,31	4.783,85	1.036,39	312,65	30,17

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek pinjaman dari lembaga multilateral berdasarkan lembaga pemberi pinjaman. Pembahasan terdiri dari gambaran umum pinjaman, kinerja pelaksanaan permasalahan, dan tindak lanjut serta hasil kunjungan lapangan.

Bank Dunia

Jumlah pinjaman kegiatan (*project loan*) Bank Dunia yang sedang berjalan pada Triwulan III TA 2014 adalah sebesar USD 3.829,85 juta yang terdiri dari 23 proyek. Sebanyak 17 proyek diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sedangkan 6 proyek lainnya diteruspinjamkan. Sebaran proyek dan jumlah pinjaman menurut instansi penanggung jawab dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Kementerian/Lembaga dengan jumlah pinjaman terbesar pada triwulan ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dengan proporsi jumlah pinjaman sebesar 32,39% dan PT. PLN sebesar 31,07% dari total jumlah pinjaman Bank Dunia. Kementerian/Lembaga dengan jumlah pinjaman terendah adalah PT. PII dengan proporsi jumlah pinjaman sebesar 0,77%.

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Pada Triwulan III TA 2014 tidak terdapat proyek Bank Dunia yang baru efektif, namun terdapat 1 proyek yang dibatalkan, yaitu *Project for Indonesian Tax Administration Reform/PINTAR (Loan 7631-ID)* dengan instansi penanggung jawab Kementerian Keuangan. Proyek ini disepakati untuk dibatalkan setelah melalui diskusi cukup panjang yang menghasilkan kesimpulan bahwa proyek tidak dapat diteruskan pelaksanaannya dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia. Usulan pembatalan proyek proyek PINTAR telah disampaikan kepada Bank Dunia melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 5 September 2014. Usulan pembatalan tersebut kemudian telah disetujui melalui surat Bank Dunia pada tanggal 25 September 2014.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam pembahasan mengenai realisasi pinjaman proyek-proyek pinjaman Bank Dunia, sumber data utama yang digunakan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri (LPKPHLN) yang disampaikan oleh penanggung jawab proyek setiap triwulan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan adalah data pada laporan yang terakhir disampaikan dengan asumsi merupakan data yang paling baru dan paling valid. Data yang disampaikan dari setiap LPKPHLN mengalami banyak perubahan, diharapkan kedepan penanggung jawab kegiatan dapat memberikan keterangan yang memadai mengenai perubahan data tersebut.

Untuk pembahasan mengenai kinerja pencapaian output digunakan data laporan hasil implementasi kegiatan atau yang dikenal dengan *Implementation Status and Result Report (ISR)* yang dilaporkan secara berkala oleh penanggung jawab proyek, dan diolah di Bank Dunia. Laporan tersebut memaparkan mengenai informasi capaian terkini untuk indikator kinerja proyek yang telah disepakati dalam *Result Framework* yang tercantum dalam *Project Appraisal Document (PAD)* atau *Loan Agreement*. Indikator kinerja proyek yang didanai Bank Dunia terdiri dari indikator capaian untuk PDO (*Project Development Objectives*) dan indikator capaian untuk *intermediate result*.

Realisasi penyerapan kumulatif proyek-proyek pinjaman Bank Dunia sampai dengan Triwulan III TA 2014 mencapai USD 935,35 juta atau sebesar 24,42% dari total komitmen pinjaman. Sementara itu, penyerapan dana pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III baru mencapai USD 221,2 juta atau sebesar 35,54% dari target tahun 2014.

PT. SMI dan Bappenas merupakan instansi dengan kinerja pelaksanaan paling tinggi pada tahun 2014 dimana realisasi untuk masing-masingnya secara berurutan telah mencapai 89,93% dan 74,35% dari target. Namun terdapat tiga instansi yang belum menunjukkan progres penyerapan dana proyek sampai dengan Triwulan III, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. Pertamina dan PT. PII. Proyek pinjaman di Kementerian Kelautan dan Perikanan relatif masih baru sehingga sampai saat ini belum ada penyerapan dana. Sedangkan proyek pinjaman yang dilaksanakan PT. PII memiliki karakteristik khusus dimana dana pinjaman merupakan *standby loan* yang akan digunakan untuk penjaminan sub proyek, hal ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan per-proyek. Sedangkan untuk proyek yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina baru saja menyelesaikan proses amandemen sehingga diharapkan kinerja proyek akan segera meningkat.

Tabel 2.3 Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan III TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Instansi Pelaksana	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum ditarik	Penyerapan Tahun 2014		
				Nilai	%		Target ¹⁾	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		17	2.210,25	782,35	35,40	1.427,90	542,14	171,07	31,55
1.	Kemen PU	9	1.240,45	501,30	40,41	739,15	302,46	71,75	23,72
2.	Kementan	1	80,00	11,94	14,93	68,06	24,69	5,91	23,94
3.	Kemendikbud	1	77,80	63,55	81,68	14,25	13,00	3,74	28,74
4.	Kemendagri	1	450,00	125,39	27,86	324,61	136,44	60,83	44,58
5.	Kemenkeu	1	59,97	29,68	49,49	30,29	28,06	11,08	39,49
6.	Kemenristek	1	95,00	0,08	0,09	94,92	12,02	0,07	0,58
7.	KKP	1	47,38	0,00	0,00	47,38	1,60	0,00	0,00
8.	Bappenas	1	112,65	50,40	44,74	62,25	23,78	17,68	74,35
9.	BPS	1	47,00 ²⁾	0,004	0,01	47,00	0,09	0,004	4,50
Diteruspinjamkan (SLA)		6	1.619,60	153,00	9,45	1.466,60	80,29	50,13	62,44
10.	PT. PLN	3	1.190,00	55,82	4,69	1.134,18	42,58	24,95	58,60
11.	PT. Pertamina	1	300,00	0,00	0,00	300,00	8,55	0,00	0,00
12.	PT.SMI	1	100,00	97,18	97,18	2,82	28,00	25,18	89,93
13.	PT. PII	1	29,60	0,00	0,00	29,60	1,16	0,00	0,00
Total		23	3.829,85	935,35	24,42	2.894,50	622,43	221,20	35,54

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Catatan: *) Dilakukan penyesuaian data dengan LPKPHLN triwulan III TA 2014 sebagai data terbaru yang disampaikan oleh instansi penanggung jawab proyek, penyesuaian meliputi data target (DIPA) dan data penyerapan pinjaman.

1) Tidak termasuk komponen refinancing sebesar USD 200 juta

2) Telah dilakukan partial cancellation sebesar USD 18 juta.

• Kementerian Pekerjaan Umum

Pada Triwulan III TA 2014 terdapat 9 (sembilan) proyek sedang berjalan di Kementerian Pekerjaan Umum yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia. Tiga proyek diantaranya dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air, satu proyek dilaksanakan Ditjen Bina Marga dan lima proyek dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya. Total nilai pinjaman tersebut adalah sebesar USD 1.240,45 juta dengan penyerapan kumulatif hingga Triwulan III mencapai USD 501,3 juta atau sebesar 40,41% dari nilai komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan pinjaman Triwulan I sampai dengan Triwulan III masih cukup rendah, hanya sebesar 23,72% dari target tahun 2014.

Ditjen Sumber Daya Air

- Dam Operational Improvement and Safety Project/DOISP (7669-ID)

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif untuk proyek DOISP hingga Triwulan III Tahun 2014 mencapai USD 28,70 juta (57,4%). Nilai *progress variant* untuk proyek ini adalah -29,05, artinya proyek mengalami keterlambatan yang cukup signifikan dalam hal penyerapan dana. Rendahnya penyerapan dana disebabkan oleh penyesuaian dengan sistem SPAN di Kementerian Keuangan, selain itu juga terjadi keterlambatan dalam pengajuan *replenishment*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian untuk indikator kinerja proyek DOISP yang dilaporkan dalam dokumen ISR sebagian besar telah menunjukkan kemajuan. Namun, masih terdapat 2 indikator yang

belum menunjukkan progres capaian, yaitu: i) *DSU staff recruited and trained* dan ii) *Inacold certification of dam professional*. Berdasarkan hasil koordinasi dengan penanggung jawab proyek, indikator *DSU staff recruited and trained* di lapangan telah tercapai 100%, untuk itu data capaian dalam dokumen ISR akan segera diperbaharui. Sementara itu, untuk indikator *Inacold certification of dam professional* memang belum ada capaian disebabkan adanya kesalahan pemahaman mengenai mekanisme sertifikasi dimana sertifikasi seharusnya dilakukan oleh LPJK bukan INACOLD. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini telah disampaikan revisi ToR kepada pihak Bank Dunia dimana sertifikasi akan dilakukan oleh LPJK namun pengujinya tetap dari INACOLD.

Permasalahan yang diidentifikasi pada triwulan sebelumnya mengenai pekerjaan rehabilitasi bendungan dimana *detail design* pada 5 paket pekerjaan belum dapat difinalkan, pada triwulan ini 1 paket pekerjaan (Jatiluhur) telah terkontrak, sisanya sebanyak 4 paket (2 paket di Cimahi dan 2 paket di Serayu-Opak) masih dalam proses, jika tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat maka pekerjaan remedial akan di-*drop* karena waktu yang tersisa tidak akan mencukupi. Selain itu, pada paket Jatiluhur juga terdapat permasalahan terkait berakhirnya kontrak yang melampaui waktu penutupan pinjaman. Untuk itu, penanggung jawab proyek mengusulkan pembiayaan dari pinjaman hanya sampai pada proses pengadaan saja kemudian diteruskan dengan dana APBN yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Berkaitan dengan usulan tersebut terdapat potensi permasalahan pada administrasi kontrak karena semula akan dibiayai pinjaman kemudian menjadi dibiayai dengan dana APBN, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Permasalahan serupa juga terjadi pada pekerjaan rehabilitasi hidromekanikal yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan karena sulitnya teknis pekerjaan yang harus dilakukan mengingat jenis dan tipe bendungan yang beragam serta umur bangunan bendungan yang sudah sangat tua sehingga membutuhkan keahlian khusus. Untuk itu diperkirakan hanya 80% dari total pekerjaan rehabilitasi hidromekanikal yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman, sisanya direncanakan untuk diteruskan menggunakan dana APBN. Dengan demikian penanggung jawab proyek perlu memastikan ketersediaan anggaran APBN untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

- ***Water Resources and Irrigation Sector Management/WISMP-II (8027-ID)***

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif proyek WISMP sampai dengan Triwulan III TA 2014 masih rendah yaitu hanya sebesar USD 23,38 juta (15,59%) sehingga nilai *progress variant* mencapai -40,49 yang artinya proyek mengalami keterlambatan yang sangat signifikan. Pada triwulan ini pencairan dana masih terkendala oleh sistem SPAN.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Karena belum tersedianya dokumen ISR yang baru, informasi capaian untuk indikator kinerja proyek masih sama dengan triwulan sebelumnya. Belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam capaian indikator PDO maupun *intermediate result*. Pada

indikator PDO hanya 1 indikator yang telah menunjukkan kemajuan dari total sebanyak 6 indikator, yaitu *number of irrigation commissions fully functional* pada triwulan ini telah terealisasi sebanyak 30 (tiga puluh). Indikator *intermediate result* yang telah menunjukkan kemajuan capaian adalah *establishment of effective institutional mechanism for Jatiluhur system management* pada periode sebelum sedang dilakukan finalisasi draft, kemajuan yang dicapai pada periode ini telah dilakukan negosiasi MoU untuk draft tersebut.

Progres pelaksanaan fisik proyek WISMP sudah mencapai 50%, namun realisasi dana masih rendah disebabkan oleh alokasi dana yang terlalu rendah dalam DIPA, sudah dilakukan proses revisi namun diperkirakan masih kurang. Terkait dengan wacana perpanjangan, masih terdapat TA (*Technical Assistance*) modernisasi yang diperkirakan baru akan terkontrak pada bulan Agustus 2014, sementara itu pekerjaan diperkirakan akan dilaksanakan selama 1,5 tahun, tahap selanjutnya adalah desain konstruksi modernisasi. Jika pekerjaan tersebut jadi dilaksanakan maka dibutuhkan perpanjangan masa berlaku pinjaman. Namun, hingga saat ini belum ada diskusi lebih lanjut mengenai kepastian pelaksanaan pekerjaan desain konstruksi modernisasi tersebut.

Permasalahan terkait mekanisme *on-granting* sudah tidak ditemui pada triwulan ini, begitu juga dengan isu mekanisme *shopping* untuk pengadaan telah dilakukan amandemen *loan*.

- **Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/JUFMP (8121-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Kegiatan JUFMP termasuk kategori *at risk* dalam portfolio proyek pinjaman Kementerian Pekerjaan Umum. Namun pada Triwulan III TA 2014 proyek JUFMP telah menunjukkan kemajuan dalam hal pelaksanaan kegiatan. Penyerapan kumulatif proyek JUFMP sampai dengan saat ini adalah sebesar USD 20,98 juta (15,02%) dengan *progress variant* yang sudah membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu -31,14. Realisasi pada Triwulan I hingga Triwulan III baru mencapai 7,98% dari target tahun ini. Permasalahan yang dihadapi adalah dana yang tersedia di DIPA tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan percepatan penarikan dana. Untuk itu, telah dilakukan proses revisi DIPA.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Dokumen ISR terbaru menunjukkan bahwa telah terdapat progres capaian untuk indikator *intermediate result* khususnya mengenai volume pengerukan dari target 3,4 juta m³ telah tercapai sebanyak 1,8 juta m³ dan panjang kanal yang diperbaiki/dibersihkan telah mencapai 18,17 km dari target 43,2 km. Sementara itu, untuk indikator PDO belum ada progres capaian hingga triwulan ini.

Sampai dengan triwulan ini beberapa paket pekerjaan masih terkendala oleh proses pembebasan lahan yang belum dapat diselesaikan. Untuk mengantisipasi agar implementasi tidak semakin terlambat, penanggung jawab proyek telah mengirimkan surat kepada Bank Dunia mengusulkan agar pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan pembebasan lahan dapat segera dimulai terlebih dahulu. Selain itu,

terdapat usulan untuk penambahan lokasi kegiatan pada paket 6, usulan tersebut akan segera dibahas dalam rapat *steering committee*.

Ditjen Bina Marga

- Western Indonesia National Road Improvement/WINRIP (8043-ID)

Realisasi Penyerapan Dana

Kinerja penyerapan proyek sampai dengan triwulan ini masih rendah, penyerapan kumulatif baru mencapai USD 5,39 juta atau sebesar 2,16% dari komitmen pinjaman. Nilai ini merupakan hasil revisi dari laporan triwulan sebelumnya karena terdapat kesalahan pengisian nilai realisasi dana Triwulan II Tahun 2014 yang seharusnya USD 1,42 juta, dituliskan USD 14,9 juta. Nilai *progress variant* proyek ini adalah -33,77%, artinya proyek mengalami keterlambatan yang signifikan dalam penyerapan dana pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Berdasarkan dokumen ISR terakhir belum terdapat progres capaian baik untuk indikator PDO maupun *intermediate result*, sementara itu pelaksanaan kegiatan pada beberapa paket pekerjaan masih terkendala oleh permasalahan kontraktor yang menggunakan mekanisme subkontrak. Beberapa paket lainnya masih dalam proses pengadaan, penanggung jawab kegiatan diharapkan dapat melakukan upaya percepatan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah pembebasan lahan pada paket 2 dan 3, saat ini telah dilakukan koordinasi dengan pemilik lahan dan telah diperoleh kesepakatan harga untuk lahan tersebut, selanjutnya diharapkan proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan.

Ditjen Cipta Karya

- Proyek PNPM Perkotaan

Realisasi Penyerapan Dana

Pada Triwulan III Tahun 2014 proyek PNPM perkotaan yang sedang berjalan terdiri dari 2 proyek pinjaman yaitu *Loan 7664-IND Additional Financing for The National Program for Community Empowerment in Urban Area* dan *Loan 8213-ID PNPM 2012-2015*. Penyerapan kumulatif untuk proyek 7664-IND telah mencapai 93,89% sehingga *progress variant* bernilai positif. Penyerapan kumulatif pada proyek 8213-ID mencapai 41,81% dari nilai pinjaman dengan PV sebesar -16,34. Pada triwulan ini sudah tidak ditemui kendala terkait dengan administrasi pencairan dana menggunakan sistem SPAN.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja untuk *Loan 7664-IND Additional Financing for The National Program for Community Empowerment in Urban Area* telah menunjukkan progres yang sangat baik, semua indikator PDO telah tercapai melampaui target, begitu juga dengan sebagian besar indikator *intermediate result* kecuali indikator yang terkait dengan dana bergulir (*Revolving Loan Fund/RLF*). Saat ini sedang dilakukan diskusi terkait kelembagaan di masyarakat yang akan mengelola aset termasuk dana RLF, sehingga

dana untuk RLF tersebut saat ini ditahan (*idle money*) sampai kelembagaan di masyarakat jelas.

Selanjutnya, capaian indikator *intermediate result* untuk Loan 8213-ID *National Community Empowerment Program in Urban Areas 2012-2015* juga telah menunjukkan progres yang sangat baik. Sebagian besar indikator *intermediate result* telah tercapai melampaui target, namun indikator terkait RLF dan ketepatan waktu dalam pengisian MIS capaiannya masih jauh lebih rendah dibandingkan target. Beberapa indikator PDO untuk *loan* ini juga sudah menunjukkan progres capaian yaitu terkait jumlah penerima manfaat proyek dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa pendanaan PNPM Mandiri yang berasal dari pinjaman luar negeri hanya dapat dilaksanakan hingga bulan April 2015. Sejalan dengan prinsip keberlanjutan kegiatan pinjaman yang dapat diteruskan dengan dana rupiah murni maka pihak *executing agency* harus segera mempersiapkan *exit strategy*. Pembiayaan kegiatan PNPM Perkotaan dengan pinjaman luar negeri tetap dapat dilakukan hingga Desember 2015 apabila mendapatkan persetujuan dari DPR dan tercantum dalam DIPA 2015 dengan pertimbangan bahwa PNPM perkotaan menangani infrastruktur di perkotaan. Dalam RKA-KL 2015 telah dialokasikan anggaran untuk PNPM Perkotaan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan hingga bulan Desember tahun 2015, untuk itu akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan alokasi anggaran tahun 2015 tersebut.

- **Proyek *Third WSSLIC-PAMSIMAS (4204-IND)* dan *PAMSIMAS II (8250-ID)***
Realisasi Pencairan Dana

Pada tahun 2014 belum ada realisasi dana untuk proyek WSSLIC-PAMSIMAS, namun penyerapan kumulatif telah mencapai 99,39%. Sementara itu, untuk PAMSIMAS 2 pada triwulan ini terdapat realisasi dana sebesar USD 6,47 juta atau sebesar 11,51% dari target. Penyerapan kumulatif untuk proyek ini USD 36,06 juta atau sebesar 36,1% dari komitmen pinjaman proyek.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja proyek PAMSIMAS dalam dokumen ISR terbaru menunjukkan progres yang cukup baik. Capaian indikator PDO maupun indikator *intermediate result* secara umum hampir mencapai target. Jika pada triwulan sebelumnya terdapat 2 indikator *intermediate result* yang telah tercapai melampaui target, pada triwulan ini terdapat tambahan 2 indikator lain yang telah tercapai melampaui target yaitu: i) jumlah kecamatan yang mereplikasi pendekatan PAMSIMAS dari target sebanyak 95 Kecamatan telah tercapai sebanyak 96 Kecamatan; dan ii) jumlah kecamatan dan desa yang memiliki kinerja baik melampaui target dan memperoleh tambahan hibah, dari target 1000 Desa dan 68 Kecamatan telah tercapai sebanyak 1023 Desa, namun capaian untuk jumlah kecamatan masih dibawah target yaitu 25 Kecamatan. Pada triwulan ini tidak ditemui kendala yang berarti dalam pelaksanaan proyek PAMSIMAS maupun PAMSIMAS 2.

- **Urban Water Supply and Sanitation Project/UWSSP (7730-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Sampai dengan Triwulan III TA 2014, penyerapan kumulatif proyek ini telah mencapai USD 22,16 juta atau sebesar 94,06% dari komitmen pinjaman dengan nilai *progress variant* cukup baik yaitu -1,00. Penyerapan dana dari Triwulan I hingga Triwulan III juga sangat baik yaitu sebesar 93,81% dari target tahun 2014.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sebagian besar capaian indikator PDO maupun *intermediate result* proyek ini telah mendekati target, beberapa diantaranya telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun indikator *intermediate result* yang capaiannya masih rendah yaitu jumlah sambungan ke rumah penduduk yang diperbaiki/diganti dari target sebanyak 31.350 sambungan baru tercapai sebanyak 340 sambungan. Sementara itu pada indikator PDO yang capaiannya masih rendah yaitu terkait *operating ratio* dengan target lebih rendah dari 1, hanya Kota Bogor yang telah berhasil mencapai target.

Dari tiga lokasi pelaksanaan proyek UWSSP, sebanyak dua lokasi telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100% yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Kapuas, dan saat ini sedang dalam tahap penyelesaian administrasi keuangan. Satu lokasi lainnya yaitu Kabupaten Muara Enim sampai dengan Triwulan III TA 2014 dari 5 paket pekerjaan baru 1 paket pekerjaan (BWSC 1.8 *uprating* IPA Cikareteg) yang telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100%, paket ini sebelumnya mengalami keterlambatan karena terjadinya longsor dan banjir di lokasi *intake*, sedangkan 4 paket lainnya pelaksanaan fisiknya sudah di atas 90% sehingga diperkirakan pada bulan desember 2014 semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan.

Pada paket MWSC 1.2 (konstruksi IPA Karang Asam) sampai saat ini belum dapat diserahkan-terimakan karena belum selesainya penambahan daya listrik oleh PT. PLN, sementara itu paket MWSC 1.8 (*office building*) juga mengalami sedikit keterlambatan karena permasalahan administrasi untuk *addendum* kontrak. Penanggung jawab kegiatan diharapkan dapat melakukan percepatan mengingat proyek ini akan segera berakhir.

• **Kementerian Dalam Negeri**

- **National Programme for Community Empowerment in Rural Area/PNPM Rural 2012-2015 (8217-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Pada Triwulan III TA 2014 terdapat satu proyek pinjaman Bank Dunia yang sedang berjalan yaitu *Loan* 8217-ID PNPM Rural 2012-2015. Untuk proyek PNPM Rural IV (8079-ID) yang telah berakhir pada bulan Juni 2014 terdapat sisa dana sebesar USD 5,5 juta, pada awalnya direncanakan akan di-*reimburse* namun karena terkendala oleh sistem SPAN kemungkinan akan di-*refund*, saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan DJKN, selain itu juga masih terdapat dana di rekening khusus sebesar USD 72 juta yang belum dapat diserap karena terkendala administrasi menggunakan sistem SPAN. Penyerapan kumulatif untuk PNPM Rural 2012-2015 mencapai USD 125,39 juta

atau sebesar 27,86% dari nilai komitmen proyek, sementara itu realisasi pada Triwulan I hingga Triwulan III mencapai 44,58% dari target tahun 2014.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sebanyak 3 dari 8 indikator PDO untuk proyek ini telah menunjukkan progres capaian yang signifikan, bahkan dua diantaranya telah tercapai melampaui target yaitu untuk indikator terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam forum pengambilan kebijakan, dan indikator mengenai jumlah penerima manfaat perempuan. Capaian untuk indikator *intermediate result* juga sudah menunjukkan kemajuan, beberapa indikator telah tercapai melampaui target, tetapi indikator terkait pendanaan proposal bisnis, koordinasi dengan program PNPM Perdesaan lainnya dan pembentukan tim *oversight* belum menunjukkan progres yang signifikan. Informasi capaian ini masih sama dengan informasi pada triwulan sebelumnya karena belum tersedianya dokumen ISR yang baru pada triwulan ini.

Berkaitan dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa pendanaan PNPM Mandiri yang berasal dari pinjaman luar negeri hanya dapat dilaksanakan hingga bulan April 2015, untuk PNPM Perdesaan (*Rural*) DPR telah menyetujui alokasi dana sebesar Rp 1,1 triliun untuk tahun 2015 yang terdiri dari PHLN sebesar Rp 550 miliar untuk membiayai pendampingan (fasilitator) sampai bulan April 2015 dan rupiah murni sebesar Rp 550 miliar untuk membiayai pendampingan dari bulan Mei hingga Desember 2015. Sementara itu dana BLM mulai 1 Januari akan berubah menjadi dana desa. Jika pada bulan April tahun 2015 masih terdapat sisa dana pinjaman maka akan dikembalikan ke Bank Dunia.

Selain itu, terdapat permasalahan terkait instansi penanggung jawab kegiatan terkait penggabungan Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri dengan kementerian yang baru dibentuk yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- **PT. PLN**

- ***Power Transmission Development Project/PTD I (7940-IND) dan Scattered Transmission and Substation in Indonesia (Phase II)/IPTD II (8280-ID)***

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif untuk proyek IPTD I telah mencapai USD 50,4 juta atau sebesar 22,4% dari nilai komitmen pinjaman. Penyerapan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III mencapai 60,24% dari target tahun ini. Diperkirakan akan ada sisa dana sebesar USD 83,65 juta yang akan dimanfaatkan pada tahun 2015 hingga 2017, usulan pemanfaatan dana tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada pemerintah dilengkapi dengan perubahan *procurement guideline* yang digunakan agar PLN dapat menggunakan *domestic preference*. Saat ini hal tersebut dimungkinkan dengan menggunakan pedoman pengadaan yang baru. Sementara itu, untuk IPTD II, hingga saat ini belum terdapat penarikan pinjaman. Proyek ini merupakan proyek PT. PLN pertama yang mengimplementasikan *domestic preference*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga Triwulan III TA 2014 belum ada informasi mengenai capaian indikator PDO maupun *intermediate result*, diharapkan penanggung jawab proyek dapat segera melaporkan capaiannya. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, saat ini proyek IPTD II sedang dalam tahap pengadaan barang dan jasa, sementara itu proyek IPTD I mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dari 6 paket pekerjaan yang harus dilaksanakan, sampai dengan Triwulan III TA 2014 hanya 1 paket (paket J1) yang progres pelaksanaannya telah mencapai 60% dan 1 paket lainnya (paket J3) telah mencapai 35%.

Sementara itu, 4 paket pekerjaan lainnya belum menunjukkan progres yang signifikan, realisasi pelaksanaan pekerjaan masih dibawah 10%. Hampir semua paket pekerjaan mengalami perubahan (penambahan/pengurangan) *item* pekerjaan selain itu beberapa paket pekerjaan telah berakhir masa berlaku kontraknya sementara pekerjaan belum dapat diselesaikan sehingga membutuhkan *addendum* kontrak. Permasalahan lain yang dihadapi adalah rendahnya kinerja kontraktor yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan, PT. PLN telah mengirimkan surat beberapa kali kepada kontraktor untuk meningkatkan kinerjanya, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak kontraktor tersebut. PT. PLN perlu merumuskan langkah-langkah tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ini.

- Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (8057-ID)

Realisasi Penyerapan Dana

Peningkatan realisasi dana untuk proyek ini pada Triwulan III masih belum signifikan penyerapan kumulatif baru mencapai USD 5,42 juta atau hanya sebesar 0,85% dari nilai proyek, sehingga *progress variant* mencapai -34,71 yang mengindikasikan proyek mengalami keterlambatan yang serius. Realisasi dana pada Triwulan I hingga Triwulan III adalah sebesar 43,95% dari target tahun 2014.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada dokumen ISR terakhir, belum ada capaian untuk indikator PDO sedangkan untuk indikator *intermediate result* hanya 2 indikator yang telah menunjukkan progres capaian yaitu progres untuk seleksi *engineer* dengan capaian 100% dan jumlah rumah tangga yang telah diberikan kompensasi penuh untuk pembebasan lahan, dengan capaian sebesar 25%.

Permasalahan utama yang dihadapi proyek ini adalah pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lama. Pembebasan lahan di Kabupaten Bandung Barat yang diidentifikasi sebelumnya beresiko cukup besar karena ijin lokasi akan segera berakhir, saat ini telah terdapat tambahan lahan yang dibebaskan sebesar 14 Ha sehingga sisa lahan yang belum dibebaskan adalah sebesar 46 Ha, yang saat ini sedang dalam tahap musyawarah mengenai harga dan luasan. Untuk permasalahan tukar-menukar kawasan hutan telah disetujui oleh Plh. Menteri Kehutanan. Seluruh permasalahan pembebasan lahan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini karena pada tahun berikutnya akan diberlakukan aturan yang baru.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- *Health Professional Education Quality Project/HPEQ (7737-ID)*

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif proyek HPEQ sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 mencapai 81,68% dari nilai komitmen pinjaman. Sementara itu, kinerja penyerapan dana pada tahun ini masih cukup rendah yaitu hanya sebesar 28,74% dari target yang ditetapkan. Hingga akhir triwulan IV tahun 2014 diperkirakan penyerapan kumulatif akan mencapai 88% dari nilai komitmen pinjaman, sehingga akan terdapat sisa dana sebesar USD 9,8 juta (12%) yang berasal dari sisa hibah kompetensi yang dikembalikan oleh penerima hibah. Saat ini masih terdapat 11 kegiatan hibah kompetensi yang sedang berjalan, sehingga dimungkinkan adanya tambahan dana yang dikembalikan oleh pelaksana hibah tersebut. Penanggung jawab proyek perlu menyusun penjelasan yang rinci menurut komponen dan kategori terkait sisa dana tersebut. Penjelasan yang rinci dibutuhkan karena sebelumnya penanggung jawab proyek mengajukan usulan untuk pembatalan sebagian dana pinjaman, bersamaan dengan usulan perubahan target PDO dan realokasi. Usulan tersebut kemudian dibatalkan dengan adanya pengusulan baru dari Sekjen Kemdikbud yang hanya melingkupi realokasi antar komponen. Dengan adanya usulan ini, diasumsikan bahwa seluruh pinjaman akan terserap untuk percepatan kegiatan HPEQ. Namun, dari LPKPHLN yang disampaikan ternyata target tersebut tidak tercapai dan diperkirakan akan terdapat sisa dana pinjaman yang cukup besar. Diperlukan penjelasan secara kronologis mengenai hal ini, dan pembelajaran mengenai inkonsistensi pengusulan perubahan dan rencana penyerapan harus menjadi salah satu masukan dalam penyusunan *Project Completion Report*, agar dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak dan tidak melakukan kesalahan yang sama.

Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Usulan realokasi dana antar komponen/kategori yang disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan telah disetujui melalui surat Bank Dunia tanggal 29 Agustus 2014. Realokasi dana yang dilakukan yaitu pada komponen/kategori 1, 2 dan 4 untuk kebutuhan akselerasi berupa tambahan program LAM-PTKES dan LPUK, termasuk tambahan program di komponen 2 dan penanganan *retaker* uji (uji kompetensi ulang).

Capaian untuk indikator kinerja sebagian besar telah menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun beberapa indikator masih belum dicantumkan capaiannya dalam dokumen ISR karena dibutuhkan perhitungan lebih lanjut, namun diperkirakan semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target.

- **Kementerian PPN/Bappenas**

- *Scholarships Program for Strengthening Reforming Institutions/SPIRIT (8010-ID)*

Realisasi Penyerapan Dana

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 penyerapan kumulatif proyek SPIRIT mencapai 44,74% dari nilai pinjaman sehingga *progress variant* membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu menjadi -5,57. Penyerapan tahun 2014 telah mencapai 74,35% dari target yang ditetapkan. Nilai *committed loan* diperkirakan telah

mencapai 87,4%, dan pada akhir proyek penyerapan kumulatif untuk komponen yang dilaksanakan Bappenas diperkirakan akan mencapai 94,3% (dengan asumsi ada realokasi dana) sedangkan untuk komponen yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan diperkirakan mencapai 98%. Penyerapan dana paling rendah terjadi pada komponen program non gelar sehingga pada tahun ini penanggung jawab kegiatan akan fokus untuk memperbaiki kinerja komponen tersebut.

Pada Triwulan III Tahun 2014 permasalahan terkait dengan sistem SPAN sudah berkurang cukup signifikan dengan tingkat kesalahan sekitar 5%. Namun masih terjadi beberapa permasalahan antara lain daftar kode bank yang tidak terdeteksi di sistem dan khusus untuk program gelar di Amerika Serikat terkendala karena besarnya dana yang ditransfer ke rekening mahasiswa (karena termasuk *tuition fee*) sehingga dibutuhkan *clearance* dari *federal reserve*. Hal ini menyebabkan pencairan dana terlambat hingga 2-3 minggu.

Permasalahan kurangnya dana DIPA yang diidentifikasi pada triwulan sebelumnya telah diatasi dengan revisi (penambahan) DIPA sebesar USD 84 juta, namun setelah dianalisis kembali dari tambahan dana tersebut hanya akan terserap sebesar USD 50 juta sehingga dibutuhkan revisi lagi. Untuk itu, penanggungjawab kegiatan diharapkan agar dapat membuat perencanaan untuk penyerapan dana yang lebih baik ke depannya.

Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Progres pelaksanaan kegiatan SPIRIT pada Triwulan III TA 2014 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan terutama untuk komponen program gelar. Rekrutmen sudah selesai dilakukan untuk tahun 2015 sebagai tahun terakhir penerimaan calon penerima beasiswa. Tahap persiapan berupa pelatihan bahasa dan aplikasi ke universitas juga sudah dilakukan.

Diperkirakan terdapat sisa dana yang direncanakan akan dimanfaatkan untuk penambahan jumlah penerima program gelar (karyasiswa). Berdasarkan hasil *midterm review*, di Bappenas diperkirakan dapat dilakukan penambahan sebanyak 30 karyasiswa dan di Kementerian keuangan sebanyak 20 karyasiswa. Namun, perlu dilakukan penghitungan kembali terkait adanya isu rendahnya *living allowance* untuk mahasiswa yang diberikan oleh program SPIRIT dibandingkan dengan program beasiswa serupa. Saat ini sedang dilakukan pembahasan mengenai penyesuaian *living allowance* tersebut.

Dalam dokumen ISR terbaru capaian untuk semua indikator kinerja masih belum menunjukkan progress. Namun, dalam *mid term review* telah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut dan akan segera difinalkan melalui *technical review* dan kemudian dilaporkan capaiannya. Untuk indikator kinerja mengenai *re-entry* program saat ini telah direkrut konsultan yang bertugas menyusun pedoman terkait hal tersebut. Selain itu, *payment agent* juga telah diputuskan untuk tetap digunakan, saat ini telah terkontrak dan diharapkan dapat segera membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan.

- **Kementerian Keuangan**

- *Government Financial Management & Rev. Adm. Project/GFMRAP (4762-IND/ 4026-IND)*

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif proyek GFMRAP hingga triwulan ini mencapai 49,49% dari komitmen pinjaman, namun nilai *progress variant* masih cukup tinggi yaitu mencapai -38,21. Kinerja penyerapan tahun 2014 juga masih rendah yaitu sebesar 39,49% dari target yang ditetapkan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian indikator PDO dan *intermediate result* untuk proyek ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun diperkirakan pada akhir pelaksanaan proyek semua indikator akan tercapai. Progres pelaksanaan kegiatan SPAN saat ini masih dalam tahap pilot yang akan dilanjutkan dengan *roll out*. Laporan mengenai pelaksanaan pilot telah disusun pada bulan Juli tahun 2014, namun untuk memenuhi persyaratan *pilot acceptance* masih diperlukan beberapa perbaikan. Terkait banyak administrasi penarikan dana yang terkendala karena sistem SPAN, telah dibentuk tim *task force* yang membantu menangani berbagai permasalahan yang dilaporkan sehingga pada triwulan ini sebagian besar permasalahan sudah teratasi.

- **Badan Pusat Statistik (BPS)**

- *Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic/Statcap-Cerdas (8038-ID)*

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif untuk proyek STATCAP hingga triwulan ini masih sangat rendah yaitu USD 0,004 juta (0,01%). Penyerapan dana tahun 2014 diperkirakan hanya 30% dari DIPA yang telah ditetapkan. Terkait dana pendamping, tahun ini telah dialokasikan dana sebesar Rp 1 miliar yang dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas. Pada tahun 2010 juga dialokasikan dana pendamping sebesar Rp 2,5 miliar namun tidak dimanfaatkan. Meskipun demikian, penanggung jawab kegiatan harus tetap memenuhi komitmen dana pendamping sesuai dengan kesepakatan.

Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek STATCAP diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian target BPS untuk membuat sistem data statistik terpadu yang memudahkan semua *stakeholder* terkait. Setelah dilakukan restrukturisasi pada awal tahun 2014, penanggung jawab kegiatan berupaya untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, salah satunya dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif di internal tim melalui *steering comitee meeting* yang dilaksanakan setiap 2 minggu.

Progres sampai dengan saat ini untuk *owner agent* sedang dalam tahap pelelangan, prosesnya dinilai cukup cepat. Sementara itu, paket 1 (*generic statistic model*) yang merupakan inti dari proyek STATCAP, saat ini dalam tahap menunggu NOL dari Bank Dunia. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan disarankan agar proses pengadaan

untuk ICT *consultant* dan HR *consultant* dapat segera dimulai tahun ini sehingga tahun depan diharapkan kegiatan sudah dapat dimulai.

- **PT. SMI dan PT. PII**

- **Indonesia Infrastructure Finance/IIF (7731-ID) dan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/IIGF (8192-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Kinerja penyerapan dana proyek IIF sangat baik, hingga triwulan ini penyerapan kumulatif telah mencapai 97,18% dari komitmen pinjaman. Kinerja penyerapan dana tahun ini juga sangat baik yaitu mencapai 83,93% dari target yang direncanakan. Sementara itu, untuk proyek IIGF penyerapan kumulatif masih rendah yaitu hanya sebesar USD 50 ribu dan belum dibebankan ke rekening khusus karena belum memenuhi nilai minimal pembebanan ke rekening khusus (USD 100 ribu). Desain proyek IIGF berbeda dengan desain proyek pinjaman lainnya karena dari nilai total *loan* sebesar USD 29,6 juta, sebanyak USD 25 juta merupakan *standby loan* yang hanya dapat dicairkan apabila terdapat sub proyek yang meminta penjaminan dari PT. PII. Sisanya sebanyak USD 4,6 juta hanya dapat digunakan untuk membiayai konsultan dan tidak dapat digunakan untuk persiapan sub proyek yang akan dijaminan ke PT. PII.

Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian indikator PDO dan indikator *Intermediate result* proyek IIF pada Triwulan III TA 2014 belum menunjukkan kemajuan. Berkenaan dengan usulan untuk perubahan *Project Development Objectives* (PDO) telah dilakukan diskusi dengan Bank Dunia. Pihak Bank Dunia menyatakan akan sulit untuk mengusulkan perubahan PDO ke *board*, perlu dicari opsi lainnya. Sementara itu, untuk usulan perubahan syarat-syarat *Environmental and Social Safeguards Framework* (ESSF) juga dinilai tidak perlu dilakukan karena proyek sudah berjalan cukup baik dengan persyaratan yang ada. Sebagai tindak lanjut akan dibuat *minutes of meeting* yang akan dijadikan sebagai dasar pemahaman bersama terhadap persyaratan ESSF yang ada.

Progres pelaksanaan untuk proyek IIGF saat ini konsultan sudah siap untuk memulai pekerjaan, namun belum ada (sub) proyek yang meminta penjaminan dari PT. PII. Pada tahun 2015 akan dilaksanakan evaluasi paruh waktu atau *mid-term review* (MTR). Pada saat MTR diharapkan dapat dibahas dan direkomendasikan upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman dan pengelolaan dana pinjaman dalam bentuk *standby loan* dan TA dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih dapat diprediksi rencana serapannya.

- **Kementerian Pertanian**

- **Sustainable Agricultural Research and Technology/SMART-D (8188-ID)**

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif proyek SMART-D sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 mencapai 14,93% dari nilai proyek dan nilai *progress variant* mencapai -24,22. Penyerapan dana Triwulan I hingga Triwulan III 2014 mencapai 23,94%. Terdapat

potensi sisa dana yang berasal dari hasil efisiensi komponen B sebesar Rp 26,4 miliar dan selisih kurs sebesar Rp 160 miliar. Dari sisa dana tersebut diusulkan untuk dimanfaatkan sebesar Rp 125,4 miliar, sementara sisanya sebesar Rp 61 miliar belum ada usulan pemanfaatan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut akan dilakukan penelaahan lebih rinci mengenai pelaksanaan kegiatan dan penghitungan kembali sisa dana, sehingga diusulkan agar kegiatan *pre-mid term review* yang semula akan dilaksanakan pada awal bulan November 2014 diundur sampai pihak penanggung jawab proyek menyelesaikan penelaahan kembali tersebut.

Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III TA 2014 telah terdapat dokumen ISR terbaru, namun informasi capaian untuk masing-masing indikator baik PDO maupun *intermediate result* tidak dapat diperbaharui karena masih diperlukan adanya pengecekan terhadap konsistensi data capaian, untuk itu penanggung jawab proyek akan melaporkan capaian masing-masing indikator pada periode ISR berikutnya.

Terdapat 4 komponen kegiatan dalam proyek SMART-D yaitu: i) pengembangan SDM; ii) pengembangan infrastruktur; iii) manajemen penelitian dan dukungan kebijakan; dan iv) manajemen kegiatan, monitoring dan evaluasi. Realisasi pada komponen 1 sampai dengan Triwulan III masih rendah dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, terutama untuk program *training* jangka pendek *post* doktoral dan program *training* jangka panjang *sandwich*. Untuk program *training* jangka pendek *post* doktoral dari target sebanyak 10 orang belum ada realisasi. Sementara itu untuk program *training* jangka panjang *sandwich* dari target 10 orang hanya terealisasi untuk 1 orang.

Pada komponen 2, pembangunan gedung sebagian besar telah dimulai. Balit Buah Tropika, BPTP Sulawesi Utara, dan Balit Palma saat ini masih dalam proses pengadaan, sedangkan pembangunan gedung yang sudah berhasil diselesaikan adalah pembangunan laboratorium terpadu Balitri dan Balittas serta renovasi gedung BPTP Jambi. Sementara itu pengadaan peralatan di beberapa lokasi masih menunggu penyelesaian pembangunan gedung. Namun, diperkirakan pembangunan gedung akan sedikit mundur dari jadwal yang ditetapkan di awal karena adanya usulan dari Kepala Badan Litbang untuk *me-review* kembali kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan agar lebih optimal dan efisien.

- **Kementerian Riset dan Teknologi**

- *Research and Innovation in Science and Technology Project/RISET-Pro (8245-ID)*

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif untuk proyek Riset-Pro sampai dengan triwulan ini masih cukup rendah yaitu sebesar 0,09% dari komitmen pinjaman. Penyerapan dana untuk proyek ini masih rendah disebabkan oleh keterlambatan perekrutan karyasiswa pada tahun 2014, hal ini merupakan dampak dari terlambatnya penyelesaian AWP sehingga proyek baru mulai berjalan pada bulan Juni 2014.

Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Belum ada kemajuan yang signifikan dalam pencapaian indikator PDO maupun indikator *intermediate result* untuk proyek ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Progres pelaksanaan program gelar hingga Triwulan III TA 2014 baru diberangkatkan 3 orang karyasiswa untuk studi S2 dan S3 ke luar negeri dari target sebanyak 81 orang. Sedikitnya jumlah karyasiswa yang diberangkatkan ini disebabkan oleh berbagai permasalahan administrasi dan lambatnya proses penerbitan *Letter of Acceptance* (LoA) dari universitas. Diperkirakan target untuk program gelar tahun ini hanya akan tercapai sebanyak 50%. Progres pelaksanaan untuk program non-gelar telah terealisasi untuk 91 orang dari 7 LPNK kementerian Riset dan Teknologi, serta 25 orang dari enam koridor ekonomi yang ditetapkan. Proyek Riset-pro diharapkan dapat mengadopsi *lesson learned* dari proyek serupa dalam penyusunan HCDP (*Human Capital Development Plan*) dan *re-entry strategy*.

- **PT. Pertamina**

- ***Geothermal Clean Energy Investment Project (8082-ID)***

Realisasi Penyerapan Dana

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 belum ada progres dalam penyerapan dana proyek ini sehingga *progress variant* proyek mencapai -81,89. Proyek ini sedang dalam proses perpanjangan.

Progres Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian indikator PDO pada triwulan ini sudah menunjukkan kemajuan, sebanyak 2 indikator telah terdapat progres capaian yaitu: i) *contribute towards PGE becoming a leading geothermal developer* dari target sebesar 700 megawatt telah tercapai sebanyak 402 megawatt; dan ii) *maintain operation availability of geothermal power plants*, telah mencapai target yaitu sebesar 0,85 (85%). Pada indikator *intermediate result* hampir semua indikator telah menunjukkan progres capaian kecuali untuk indikator terkait program training dan kontrak EPC. Terkait dengan progres pelaksanaan lelang EPCC Ulubelu telah terkontrak pada bulan Agustus 2014, dan *advance paymet* sedang dalam proses administrasi pencairan. Sedangkan untuk lelang EPCC Lahendong diperkirakan baru akan kontrak pada bulan Desember 2014.

Tindak lanjut dari usulan perpanjangan masa laku kegiatan yang disampaikan kepada Bappenas pada triwulan sebelumnya dan saat ini sedang dibahas di Bank Dunia, diperkirakan persetujuan untuk perpanjangan akan disampaikan pada bulan Desember 2014.

Box 1: Kunjungan Lapangan

Loan Bank Dunia: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM Perkotaan) Di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur

Executing Agency: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Tujuan kunjungan lapangan:

Kunjungan dilaksanakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan PNPM Perkotaan, evaluasi capaian program dan mempelajari upaya replikasi program yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Hasil kunjungan lapangan:

Dukungan PNPM Perkotaan di Kabupaten Ngada pada tahun 2014, mencakup 9 Kelurahan dan 11 Desa dengan 2.834 jiwa penduduk, dan 2.474 di antaranya tergolong miskin. Total pendanaan BLM untuk kegiatan pembangunan infrastruktur adalah sebesar 1,27 miliar rupiah. Sementara itu, tingkat pengembalian dana bergulir untuk seluruh kelurahan/desa penerima PNPM mencapai 50%. Selain program PNPM Perkotaan Reguler, pemerintah daerah Kab Ngada telah mereplikasi program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kemitraan dengan dana APBD untuk kawasan perkotaan dan juga program Pelangi Desa (peningkatan layanan infrastruktur desa) untuk kawasan perdesaan.

PAKET Kemitraan (PAKEM) dilaksanakan pada jangka waktu tahun 2011-2013, melalui pemberian dana tambahan yang bersumber dari APBD untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah berjalan dengan baik dan berkelanjutan, dibuktikan dengan pemenuhan syarat-syarat penilaian PAKET, yaitu: melakukan pertemuan rutin, melakukan audit keuangan dan rapat pertanggungjawaban tahunan, dan tingkat pengembalian pinjaman pada tahun terakhir minimal 90%. Melalui mekanisme tersebut, pada tahun 2012 terdapat 3 Kelurahan dan 4 Desa penerima PAKEM. Total dana APBD untuk PAKEM tahun 2012 adalah sebesar 495 juta rupiah, yang didampingi dengan kontribusi swadaya masyarakat yang bernilai sebesar 305,19 juta rupiah. Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima PAKEM diantaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan, saluran sanitasi, tembok penahan, dan pembukaan jalan baru.

Capaian program pada masing-masing lokasi kunjungan, adalah sebagai berikut:

1. **Desa Bomari** menerima dana PAKEM sebesar 62 juta rupiah di tahun 2012, yang dimanfaatkan untuk pembangunan saluran dan jalan lingkungan sepanjang 235 meter. Tingkat pengembalian dana bergulir masyarakat telah mencapai 100 % yang digunakan masyarakat untuk mendanai berbagai usaha, seperti tenun, kios, dan lain-lain.
2. **Desa Borani** menerima dana PAKEM sebesar 80 juta rupiah di tahun 2012, yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan sepanjang 285 meter. Dana PNPM Perkotaan tahun 2014 untuk desa ini dimanfaatkan untuk pembangunan jamban sehat dan pembukaan jalan baru. Tingkat pengembalian dana bergulir masyarakat telah mencapai 100%.



Gambar 1. Hasil pembangunan jalan lingkungan Desa Bomari, Desa Borani, dan pembangunan saluran di Desa Beja (dari kiri ke kanan)

3. **Desa Beja** menerima dana PAKEM sebesar 64 juta rupiah di tahun 2012, yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, saluran dan tembok penahan. Dana PNPM Perkotaan tahun 2014 untuk desa ini dimanfaatkan untuk pembangunan jalan lingkungan, MCK dan kandang komunal. Desa ini juga akan mendapatkan dana PLPBK sebesar 1 miliar rupiah untuk penataan permukiman dan pembangunan bangunan informasi yang akan memperhatikan penataan tradisional di kawasan tersebut.

4. **Kelurahan Jawameze** menerima dana PAKEM sebesar 76 juta di tahun 2012 rupiah, yang dimanfaatkan untuk pembangunan tembok penahan. Tingkat pengembalian dana bergulir telah mencapai 90 % untuk pengembangan usaha masyarakat, seperti kios, pengembangan jahe, pasar, dan lain-lain. Selain itu, juga ada dana bantuan beasiswa sekolah dari BRI untuk siswa yang tidak mampu.



Gambar 2. Tembok penahan di Kelurahan Jawameze dan penataan permukiman Desa Bena yang memperhatikan karakter tradisional (dari kiri ke kanan)

Selain empat desa/kelurahan penerima program PNPM di atas, tim juga berkesempatan untuk mengunjungi Desa Bena yang telah mendapatkan bantuan dari Kementerian PU untuk penataan permukiman tradisional, yang ditata dengan memperhatikan karakter asli dari desa tradisional. Misalnya, penataan utilitas (listrik, saluran air dan sanitasi) yang dibangun di belakang rumah masyarakat agar tidak merusak karakter adat berbentuk lahan terbuka dengan artefak yang berada di tengah-tengah permukiman sebagai pusat pelaksanaan kegiatan adat. Desa Bena juga mendapatkan bantuan dari masyarakat internasional yang disalurkan oleh aktivis Caritas Internasional untuk membangun saluran air bersih. Saat ini Desa Bena telah menjadi permukiman tradisional yang banyak menjadi tujuan wisata wisatawan domestik dan asing. Pelaksanaan PNPM Perkotaan yang diterima oleh Kab Ngada, diharapkan dapat mencontoh penataan di Desa Bena, yang mempertimbangkan karakter asli dari masyarakatnya.

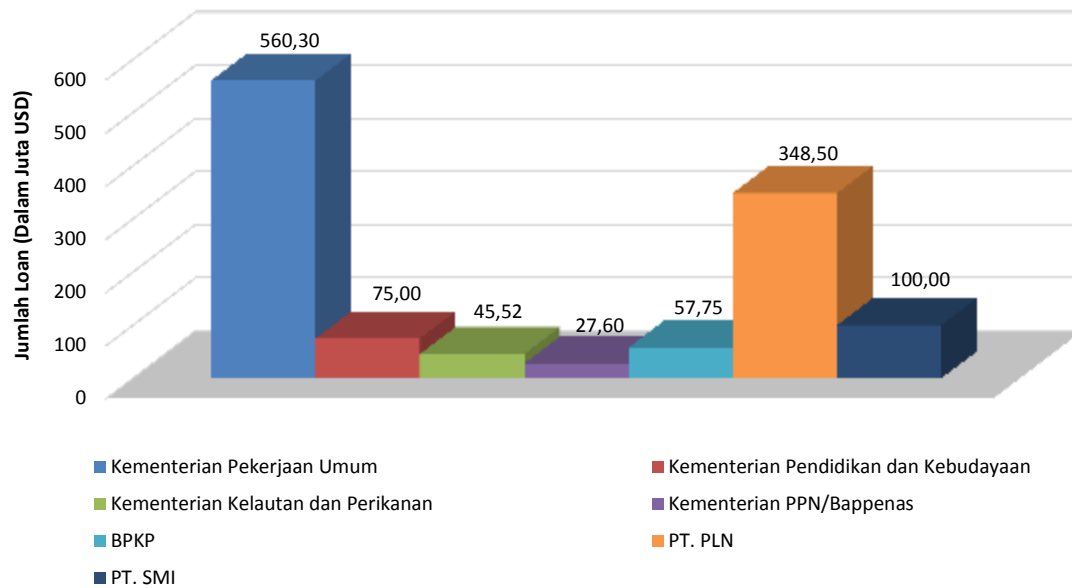
Melalui kunjungan langsung pada lokasi penerima program PNPM Perkotaan, baik reguler dan replikasi PAKEM, serta dialog dengan BKM, perangkat desa dan masyarakat, didapati bahwa program PNPM Perkotaan telah membantu pemenuhan infrastruktur masyarakat di tingkat kelurahan/desa. Dengan pendekatan program yang berbasis masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini cukup tinggi, dibuktikan dengan kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi swadaya seperti tenaga kerja, bahan material lokal, dan sebagainya dalam menambah capaian program. Infrastruktur yang dibangun dari program ini dinilai secara teknis lebih bagus dari pekerjaan pihak ketiga dan dengan biaya yang lebih murah. Untuk dana bergulir, sesuai syarat PAKEM, maka BKM penerima dana PAKEM memiliki tingkat pengembalian dana bergulir yang tinggi. Pelaksanaan program yang baik tersebut tidak terlepas dari kerelaan anggota masyarakat dalam menjalankan BKM dan kontribusi dari fasilitator dan konsultan pendamping di lapangan.

Replikasi program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Ngada dapat terwujud dengan komitmen kuat dari Pemerintah Daerah, baik dalam penyediaan dana maupun upaya untuk menjaga kualitas program. Pelaksanaan PNPM Perkotaan di kabupaten ini dipimpin oleh Bappeda, sehingga dapat mensinergikan program PNPM dengan program-program lain yang dikordinasikan oleh dinas teknis terkait. Selain dukungan pemda, juga terdapat dukungan dari kelompok peduli yang menyalurkan dana internasional untuk membangun Kab Ngada melalui program-program pemberdayaan masyarakatnya.

ADB

Pada Triwulan III TA 2014, terdapat 14 kegiatan dengan 17 *Loan Agreement* (Proyek ICWRMIP terdiri dari 2 *Loan Agreement* (2500-INO dan 2501-INO), *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* terdiri dari 2 *Loan Agreement* (3123-INO/8280-INO), dan *Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing* terdiri dari 2 *Loan Agreement* (3083-INO/8276-INO) yang didanai oleh pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) dengan total pinjaman sebesar USD 1.214,67 juta. Kegiatan-kegiatan tersebut

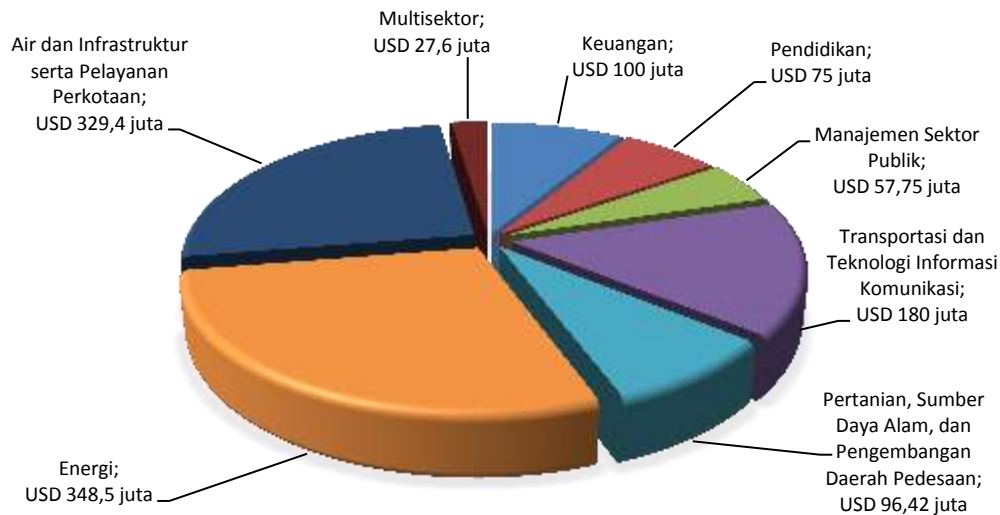
dilaksanakan oleh tujuh Kementerian/Lembaga seperti yang diilustrasikan melalui gambar berikut ini:



Gambar 2.2 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan III TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Sampai dengan Triwulan III TA 2014, jumlah kegiatan yang dibiayai pinjaman ADB paling banyak dilakukan oleh Kementerian PU mencapai USD 560,3 juta yang dilaksanakan untuk 6 kegiatan, yang mencakup pengelolaan sumber daya air terpadu di wilayah sungai Citarum, pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas serta dukungan terhadap ketersediaan air serta infrastruktur dan pelayanan perkotaan lainnya. Sementara itu, kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman ADB terbesar kedua merupakan penerusan pinjaman yang dilaksanakan oleh PT. PLN untuk pembangunan sektor energi dengan total pinjaman sebesar USD 348,5 juta yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan.

Jika dilihat berdasarkan sektor, kegiatan yang banyak didanai melalui pinjaman ADB adalah di sektor energi dengan jumlah pinjaman sebesar USD 348,5 juta yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Untuk pembagian kegiatan yang didanai oleh pinjaman ADB berdasarkan sektor kegiatan dapat diilustrasikan melalui gambar berikut:



Gambar 2.3 Jumlah Pinjaman Kegiatan ADB pada Triwulan III TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Pada Triwulan III TA 2014, ada tiga kegiatan baru efektif yang terdiri dari dua kegiatan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan satu kegiatan yang dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara, Persero. Dua kegiatan baru efektif yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum adalah *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)*, yang mulai efektif pada tanggal 17 Juli 2014 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, dan *Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)* yang mulai efektif pada tanggal 9 Juli 2014 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kegiatan baru efektif yang dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara, Persero adalah *Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project* yang mulai efektif pada tanggal 29 September 2014 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2019.

Sementara itu, kegiatan *Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)*, yang dikelola oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah mengalami perpanjangan masa laku dua kali. Perpanjangan pertama dilakukan untuk memperpanjang masa tutup pinjaman dari tanggal 30 September 2012 sampai 30 Agustus 2014 (Triwulan III TA 2014). Perpanjangan kedua dilakukan kembali untuk memperpanjang masa tutup pinjaman dari tanggal 30 Agustus 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 (Triwulan IV TA 2015).

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh pinjaman ADB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab Triwulan III TA 2014

(Dalam Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		10	766,17	160,57	20,96	605,60	134,67	28,79	21,38
1	Kemen PU	6	560,30	130,69	25,12	429,61	90,63	22,43	24,75
2	Kemendikbud	1	75,00	5,43	7,24	69,57	24,01	0,43	1,80
3	Kemen KP	1	45,52	1,00	2,20	44,52	1,97	1,00	50,72
4	BPKP	1	57,75	4,96	8,58	52,79	13,63	3,05	22,37
5	Bappenas	1	27,60	18,49	67,00	9,11	4,43	1,88	42,48
Diteruspinjamkan (SLA)		4	448,50	121,90	28,78	326,60	30,52	9,05	29,65
6	PT PLN	3	348,50	27,30	7,83	321,21	25,12	9,05	36,02
7	PT SMI	1	100,00	94,60	94,60	5,40	5,40	0,00	0,00
Total		14	1.214,67	282,47	23,25	932,21	165,20	37,85	22,91

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan sampai dengan bulan September 2014 mencapai USD 282,47 juta atau 23,25% dari total nilai pinjaman kegiatan. Penyerapan sampai dengan Triwulan III TA 2014 mencapai 22,91% dari target penyerapan dana pinjaman pada TA 2014.

Pada umumnya, kegiatan-kegiatan yang didanai dengan pinjaman dari ADB tidak mengalami hambatan secara serius, namun 5 dari total 14 proyek yang berjalan mengalami perpanjangan atau akan mengajukan perpanjangan pinjaman yang pada akhirnya mengurangi efisiensi pelaksanaan proyek. Proyek yang mengalami perpanjangan yaitu ICWRMIP, IRSDP, dan *Java-Bali Electricity Distribution Performance*, sedangkan proyek yang akan mengajukan perpanjangan yaitu RRDP dan MSMHP. Permasalahan mengenai Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sudah mulai teratasi dan tidak lagi menjadi kendala. Hal yang menjadi perhatian pada Triwulan III TA 2014 ini adalah rencana penarikan dana pinjaman sampai umur kegiatan selesai. Data tersebut diperlukan untuk menentukan alokasi pinjaman baru selama tahun 2015 – 2019.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- *Integrated Citarum Water Resources Management and Investment Program (2500-INO & 2501-INO)*

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Integrated Citarum Water Resources Management and Investment Program (ICWRMIP)* dengan nomor *Loan* 2500-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 3,44 juta (17,19% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut) dan telah melakukan penyerapan sebesar USD 14,85 juta (48,06% dari total nilai pinjaman) untuk nomor *Loan* 2501-INO. Penyerapan untuk nomor *Loan* 2500-INO yang dilakukan di TA 2014 masih belum ada (0% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 2,23 juta) sedangkan nomor *Loan* 2501-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 0,56 juta (32,37% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 1,74 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *loan* 2500-INO adalah -58,97, artinya kinerja nomor *loan* tersebut mengalami *serious delay*. Sedangkan nilai *progress variant* untuk nomor

Loan 2501-INO adalah -28,10, artinya kinerja nomor *loan* tersebut mengalami sedikit kendala dan keterlambatan tetapi masih dapat diselesaikan dengan baik.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini telah mengalami perpanjangan masa laku selama 23 bulan dari tanggal penutupan awal pada 30 Juni 2014 menjadi 31 Mei 2016. Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan saat ini telah selesai dikerjakan. Untuk komponen yang telah selesai dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan adalah program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Kementerian Kesehatan telah berhasil membangun 80 unit fasilitas umum secara partisipatif di 5 (lima) desa di masing-masing kabupaten/kota. Namun, masih ada 4 (empat) bangunan pengambilan air baku dari Saluran Tarum Barat (STB) di Kabupaten Karawang yang masih terkendala masalah Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) karena adanya pergantian kepala balai sehingga kepala balai yang baru perlu meninjau kembali dokumen SIPA tersebut sebelum dikirimkan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembayaran kompensasi untuk masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan saat ini sudah mencapai 95% untuk Paket 1 dan 80% untuk Paket 2. Kegiatan ini sudah melaksanakan *clearance working zone* sejak bulan Mei 2014. ADB sudah mengirimkan *No Objection Letter* (NOL) untuk tiap paket di komponen *construction working zone*, sehingga untuk pekerjaan konstruksi sudah dapat dilaksanakan. Namun demikian, ADB masih menunggu *executing agency* mengirimkan dokumen pengajuan *construction working zone* ke ADB. Konsultan untuk komponen *raw water zone* (PPTA) masih membuat *master plan* dan ada usulan untuk memperpanjang kontrak konsultan tersebut. Eskalasi kontrak juga sudah selesai dilaksanakan tetapi pembayaran untuk eskalasi kontrak belum selesai dilaksanakan. Dalam rapat pemantauan Triwulan III, ADB menyampaikan agar pihak PMU segera menghitung pembayaran dan disampaikan ke ADB. Menanggapi hal tersebut, pihak PMU menyampaikan bahwa untuk eskalasi harus melibatkan BPKP karena kontrak sudah selesai dilaksanakan.

- *Regional Road Development Project* (2817-INO)

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Regional Road Development Project* (RRDP) dengan nomor *Loan* 2817-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 14,14 juta (7,85% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *Loan* 2817-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 8,15 juta (16% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 50,9 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2817-INO adalah -45,2, artinya kinerja nomor *loan* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Dari 11 paket fisik kegiatan RRDP, sembilan di antaranya sudah terkontrak. Selain itu, NOL untuk satu paket yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 7 kali sudah keluar dan ditandatangani pada bulan Oktober 2014. Satu paket lainnya yang sudah

melakukan *re-tender* sudah menyampaikan dokumen yang diperlukan ke ADB dan sedang menunggu respon dari ADB. Kegiatan RRDP ini perlu melakukan perpanjangan masa laku dikarenakan untuk mengakomodasi paket yang perlu *re-tender* dan akan segera mengajukan usulan perpanjangan selama 23 bulan. *Consultant recruitment* sedang diproses dan sedang menunggu tahap *submission 2*.

Pada saat ADB *review mission* melakukan survei ke Kalimantan Barat, tim mendapati bahwa terdapat jalan dari Kalimantan Barat ke Serawak (sepanjang 15 km) yang tidak masuk ke komponen kegiatan RRDP karena jalan tersebut awalnya merupakan jalan kabupaten tetapi sudah berubah menjadi jalan nasional. Untuk hal tersebut, ADB mengusulkan untuk memasukkan pekerjaan jalan sepanjang 15 km tersebut ke dalam komponen kegiatan RRDP karena jika tidak dimasukkan, akan mengurangi manfaat ekonomis dari kegiatan RRDP.

Sampai saat ini, untuk kegiatan yang menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan dalam komponen kegiatan RRDP, belum dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu untuk hasil dari *review ToR* yang telah disampaikan oleh ADB belum ditanggapi. Untuk menindaklanjuti isu tersebut, ADB mengusulkan adanya rapat khusus dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas hal tersebut, termasuk pembahasan mengenai usulan penambahan jalan sepanjang 15 km di Kalimantan Barat.

Disbursement plan hingga tahun 2018 telah disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, ADB masih menyanggalkan target kinerja yang tidak tercapai dari yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, Bappenas menyarankan untuk rekonsiliasi target supaya lebih realistis sesuai dengan keadaan proyek.

- ***Metropolitan Sanitation Management and Health Project (2654-INO)***
Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) dengan nomor *Loan* 2654-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 17,8 juta (50,85% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *Loan* 2654-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 2,48 juta (57,56% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 4,3 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2654-INO adalah -32,91, artinya kinerja nomor *loan* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga saat ini, pelaksanaan kegiatan MSMHP khususnya di wilayah Medan masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh kondisi tanah yang sering longsor dan berpasir yang mempengaruhi pencapaian output khususnya komponen 3 dan 4. Masalah AMDAL yang terjadi di paket 2 sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan akan disediakan dana oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2015, sedangkan untuk paket 5, masih memerlukan relokasi rumah pompa. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka *Executing Agency* (EA)

dan ADB akan menyusun justifikasi teknis, khususnya untuk mengatasi masalah tanah dan pompa. Terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan tersebut, maka *Executing Agency* (EA) menyampaikan adanya kemungkinan kebutuhan perpanjangan masa laku pinjaman selama 1 tahun, yang akan berakhir pada 30 Juni 2015, akan diusulkan menjadi 30 Juni 2016.

Pihak ADB mengatakan bahwa paket 4 dan paket 5 memerlukan addendum tetapi dokumen addendum belum disampaikan ke ADB. Menanggapi hal tersebut, pihak EA mengatakan bahwa addendum untuk paket 4 masih dalam proses penghitungan sedangkan addendum untuk paket 5 sudah siap disampaikan ke ADB.

- ***Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM (2768-INO)***

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM* (USRI) dengan nomor *Loan* 2768-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 80,46 juta (80,46% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *Loan* 2768-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 11,25 juta (51,17% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 21,98 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2768-INO adalah 1,1, artinya kinerja nomor *loan* tersebut sangat baik dan bahkan lebih cepat dari perencanaan sebelumnya.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada umumnya, pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai rencana. Permasalahan yang dihadapi kegiatan ini adalah revisi DIPA yang masih belum selesai, khususnya untuk kategori 1A *Rural Infrastructure* 400 Desa. Hingga saat ini, kategori tersebut masih belum bisa mencairkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) karena DIPA Revisi-2 belum terbit. *Executing Agency* di tingkat pusat menindaklanjuti hal ini dengan mengawal langsung percepatan proses revisi DIPA. Selain itu, *Executing Agency* di tingkat daerah juga menyelesaikan dan memastikan bahwa semua tahapan perencanaan telah selesai sehingga ketika DIPA Revisi telah terbit, pelaksanaan kegiatan fisik tidak lagi mengalami kendala.

- ***Metropolitan Sanitation Management Investment Project (3123-INO)***

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP) dengan nomor *Loan* 3123-INO belum melakukan penyerapan mengingat kegiatan ini baru efektif pada tanggal 9 Juli 2014. Kegiatan ini menargetkan akan melakukan penyerapan sebesar USD 0,04 juta pada TA 2014 ini. Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 3123-INO adalah -3,51, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik dan masih tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMIP) merupakan kegiatan yang baru efektif pada Triwulan III TA 2014. Kegiatan ini baru dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juli 2014 dan akan tutup pada tanggal 31 Desember 2020.

Kegiatan MSMIP menggunakan dana pinjaman dari ADB sebesar USD 80 juta dan dana ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF) sebesar USD 40 juta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, yang bertujuan untuk: i) meningkatkan fasilitas sanitasi dalam rangka memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin, di Kota Cimahi, Jambi, Makassar, dan Pekanbaru; serta ii) meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air limbah di kota-kota tersebut.

- ***Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (3122-INO)***

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2) dengan nomor *Loan* 3122-INO belum melakukan penyerapan mengingat kegiatan ini baru efektif pada tanggal 17 Juli 2014. Kegiatan ini menargetkan akan melakukan penyerapan sebesar USD 9,43 juta pada TA 2014 ini. Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 3123-INO adalah -5,19, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik dan masih tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP 2) merupakan kelanjutan dari *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP). Kegiatan NUSP 2 ini baru dinyatakan efektif pada tanggal 17 Juli 2014 dan akan tutup pada tanggal 30 Juni 2018. Kegiatan NUSP 2 dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman dari ADB sejumlah USD 74,4 juta dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Lokasi proyek mencakup 20 Kota/Kabupaten di 16 Propinsi di seluruh Indonesia dan 670.000 rumah tangga sebagai penerima manfaat. Kegiatan NUSP 2 ini bertujuan untuk: i) menyediakan sumber daya kepada Pemerintah Daerah dan komunitas untuk meningkatkan infrastruktur dasar di daerah kumuh; ii) memperkuat perencanaan dan manajemen kapasitas administrasi lokal untuk perencanaan inklusif yang mendukung masyarakat urban miskin; iii) menciptakan mekanisme berkelanjutan untuk mengikutsertakan komunitas dalam proses perencanaan pembangunan urban; dan iv) melancarkan kerja sama publik dan privat (*public private partnerships*) untuk menciptakan area pemukiman yang terjangkau oleh masyarakat miskin.

Hingga Triwulan III 2014, belum ada kegiatan fisik yang dilakukan dibawah NUSP 2. Beberapa kegiatan yang mulai dilakukan antara lain: pembentukan PMU, penyusunan pedoman umum penanganan permukiman kumuh dan petunjuk teknis NUSP, pengadaan konsultan, serta sosialisasi tingkat kota dan kabupaten. *Inception mission* dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2014 hingga 25 November 2014 untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pelaksanaan kegiatan NUSP 2 serta mengkonfirmasi komitmen Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam kegiatan ini.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
 - ***Polytechnic Education Development Project (2928-INO)***

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Polytechnic Education Development Project* (PEDP) dengan nomor *Loan* 2928-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 5,43 juta (7,24% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *loan* 2928-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 0,43 juta (1,8% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 24,01 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2928-INO adalah -23,23, artinya kinerja nomor *loan* tersebut masih baik walaupun mengalami sedikit keterlambatan dan kendala.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek PEDP adalah proses *bidding* yang masih bermasalah dikarenakan kurangnya kapasitas politeknik mengenai proses *bidding*. Setelah dilakukan pengawasan, evaluasi, dan bimbingan, dari 34 politeknik yang awalnya mengalami kendala, saat ini hanya tinggal 8 politeknik yang masih mengalami kendala. Pihak *Executing Agency* berkomitmen akan mengunjungi delapan politeknik yang masih mengalami kendala tersebut untuk membantu menyelesaikan *bidding document* dan melakukan pendampingan eksklusif. Jika tahun depan masih mengalami permasalahan yang sama, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan mengambil alih permasalahan di politeknik tersebut. Kendala lain yang terjadi adalah pergantian kepemimpinan di politeknik yang juga menyebabkan pergantian SDM kegiatan PEDP di politeknik tersebut. Pihak PMU sendiri berharap akan adanya penyerapan yang besar pada akhir tahun ini karena adanya pembayaran kontrak. Pihak PMU juga mengusulkan penambahan *supporting staff* untuk membantu kerja politeknik.

Kendala lain yang ditemui kegiatan ini adalah perwakilan politeknik yang sering tidak hadir dari awal sampai akhir bimbingan (DRK) atau bahkan sama sekali tidak hadir karena kurangnya biaya untuk akomodasi bimbingan (DRK). Kendala ini sering ditemui oleh politeknik-politeknik yang lokasinya jauh dari PMU. Selain itu, *bidding* banyak yang kurang peminat karena harga yang ditetapkan pada saat penetapan alokasi DIPA dengan saat penawaran lelang sudah berubah.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)**
 - ***Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (3094-INO)***

Kegiatan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) merupakan kegiatan yang didanai oleh pinjaman dari ADB sebesar USD 45,52 juta. Kegiatan ini baru efektif pada tanggal 24 Februari 2014 dan dijadwalkan akan tutup pada tanggal 30 Juni 2019. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai *executing agency* dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai *implementing agency*, dengan tujuan untuk mengelola sumber daya terumbu karang dan ekosistem terkait serta keanekaragaman hayati secara lestari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui

pelembagaan pengelolaan terumbu karang, meliputi pengelolaan kawasan konservasi, sumberdaya berbasis ekosistem, pengembangan ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat, dan penyadaran serta edukasi pada masyarakat.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) dengan nomor *Loan* 3094-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 1,00 juta (2,2% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *Loan* 3094-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 1,00 juta (50,72% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 1,97 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 3094-INO adalah -8,97, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik dan masih tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai *executing agency* dari kegiatan COREMAP-CTI, telah menyiapkan i) kajian mengenai pengelolaan zonasi kawasan wisata bahari (*diving*); ii) pembinaan terhadap masyarakat berdasarkan zonasi kawasan wisata untuk menentukan lokasi wisata dan bentuk kegiatan berdasarkan usulan masyarakat setempat; iii) *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan kabupaten/kota terkait komitmen dalam mendukung kegiatan COREMAP-CTI yang dilaksanakan pada saat *launching* pada 20 November 2014 di Surabaya; dan iv) koordinasi dengan Dinas Pariwisata terkait untuk penyiapan lokasi dan infrastruktur daerah/lokasi wisata.

Kendala teknis yang dihadapi oleh kegiatan COREMAP-CTI berupa keterlambatan dimulainya proyek yang disebabkan oleh keterlambatan surat terkait Rekening Khusus (Reksus) serta keterlambatan administratif lainnya. Selain kendala teknis, kegiatan COREMAP-CTI ini juga mengalami kendala non-teknis berupa pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena adanya mutasi.

- **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**
 - ***Strengthening Accountability Revitalization Project (2927-INO)***

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Strengthening Accountability Revitalization Project* (STAR) dengan nomor *Loan* 2927-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 4,96 juta (8,58% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *Loan* 2264-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 3,05 juta (22,37% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 13,63 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2927-INO adalah -21,46, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik walaupun mengalami sedikit kendala dan keterlambatan. Penyerapan kegiatan STAR ini masih rendah karena terkendala dengan SPAN meskipun sudah mulai menemukan titik sukses penggunaan SPAN. Pada tahun 2014, terdapat selisih dana sekitar 11 miliar rupiah antara penerbitan SPP dengan SP2D sehingga memerlukan percepatan proses penyerapan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan September 2014, jumlah mahasiswa yang mengikuti program *degree* berjumlah 1.170 orang atau 78% dari target tahun 2014 (1.500 orang). Kegiatan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) atau *JFA Certification* juga sudah dilaksanakan dan diikuti oleh 904 peserta atau 94,2% dari target tahun 2014 (960 peserta). Kegiatan sertifikasi non-JFA baru saja mengumumkan calon peserta sertifikasi. Kegiatan *Substance Technical Training* sudah diikuti oleh 603 orang atau 74,6% dari target (806 orang).

Kegiatan ini sudah mulai melakukan upaya percepatan penyerapan dengan menandatangani surat perjanjian mutlak. Namun, proses verifikasi di universitas terkait mengalami kendala karena pihak universitas sangat berhati-hati sehingga pemeriksaan satu dokumen bisa memakan waktu lama. ADB menyarankan kepada *Executing Agency* agar alokasi dana untuk *international shortcourse/benchmarking* disesuaikan kembali dan agar dapat dialokasikan untuk kegiatan lain seperti program *degree* dan sertifikasi. Pemilihan konsultan untuk komponen *State Accountability Management Information System* atau Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) belum masuk ke *submission 2* dan masih ada di tahap negosiasi karena kurangnya peminat. Terkait hal tersebut, pihak *Executing Agency* akan melakukan koordinasi dengan ADB dan Biro Hukum dan Humas BPKP untuk menyelesaikan proses pembuatan kontrak. Komponen *e-learning* juga diperkirakan akan mengalami keterlambatan karena *tender* harus diulang sehubungan dengan tidak ada peserta *tender* yang memenuhi standar. Temuan BPK perihal kontrak dengan universitas-universitas juga sudah ditindaklanjuti tetapi belum ada respon dari BPK. Walaupun terjadi keterlambatan proses dan kendala, *executing agency* berkomitmen untuk menyelesaikan kegiatan ini sesuai dengan tanggal penutupan pinjaman dan tidak ada indikasi untuk perpanjangan masa laku pinjaman.

ADB menilai bahwa walaupun pencapaian target kegiatan ini masih masuk dalam kategori *underachieved*, pihak *executing agency* memiliki komitmen yang cukup tinggi. ADB menyarankan kepada pihak *executing agency* untuk fokus terhadap pencapaian target. ADB juga bersedia membantu konsultasi *1 on 1* terkait dengan rekrutmen konsultan jika memang diperlukan oleh pihak *executing agency*. ADB berpendapat bahwa kelemahan kegiatan ini ada di sisi prosedur pelaksanaan kegiatan, sehingga ADB berharap pihak *executing agency* dapat meng-*streamline* prosedur-prosedurnya. ADB juga memperingatkan pihak *executing agency* untuk tidak menjalankan program sebelum proses kontrak selesai.

- **Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**
 - ***Infrastructure Reform Sector Development (2264-INO)***

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)* dengan nomor *Loan 2264-INO* telah melakukan penyerapan sebesar USD 18,49 juta (67% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *Loan 2264-INO* yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 1,88 juta (42,48% dari target

penyerapan TA 2014 sebesar USD 4,43 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2264-INO adalah -19,23. *Progress variant* ini membaik dari Triwulan II TA 2014 (yaitu -43,74, artinya sudah termasuk proyek yang mengalami *serious delay*) karena adanya perpanjangan masa laku. Perpanjangan masa laku ini mengubah tanggal tutup yang semula 30 Agustus 2014 menjadi 31 Desember 2015.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini diperpanjang sampai 31 Desember 2015. ADB meminta *executing agency* untuk menggunakan waktu dengan efektif dan efisien supaya bisa tepat sasaran. Paket kegiatan “*Bandung Solid Waste to Energy*” masih mengalami kendala dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung karena Pemerintah Daerah Kota Bandung masih belum bisa menerima penjelasan PMU IRSDP mengenai perhitungan *tipping fee* dan akan meminta pendapat akademisi yang ada di Kota Bandung mengenai hal tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Bandung ingin ikut terlibat dalam penyertaan saham *Special Purpose Vehicle* (SPV). Untuk Paket kegiatan “*Coal Railway Central Kalimantan*”, pada bulan Oktober 2014, pemenang lelang sedang membentuk SPV dan melakukan finalisasi *draft* perjanjian kerja sama. Direncanakan tanda tangan kontrak pada awal bulan November 2014. Namun, paket ini masih harus melalui konsolidasi mengenai *termination guarantee*, jaminan yang akan didapatkan oleh pemenang lelang jika pemerintah memiliki prioritas lain dan paket kegiatan tersebut harus diterminasi. Paket kegiatan “*Lamongan Water Supply*” memiliki risiko kegagalan yang tinggi karena Pemerintah Daerah kurang terdorong untuk menyukseskan paket kegiatan *small scale water supply* ini. Oleh karena itu, paket kegiatan ini akan melakukan *pre-qualification* (PQ) ulang pada bulan November 2014. Selain itu, konsultan juga perlu memperbaiki dokumen *Full Business Case* (FBC).

Kegiatan ini juga memiliki beberapa paket kegiatan baru, seperti “*Pondok Gede Water Supply*”, sehingga secara teoritis, perlu melakukan rekrutmen konsultan baru. Namun mengingat umur proyek, *executing agency* mengusulkan untuk menggunakan konsultan lama yang transaksinya belum selesai. Mengenai hal ini, Bappenas menyarankan kepada *executing agency* untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan LKPP dan BPKP. ADB Indonesia Resident Mission, melalui *consultant qualification selection* akan melihat kemungkinan untuk usulan penggunaan konsultan lama yang transaksinya belum selesai. Selain hal tersebut, ADB meminta elaborasi dari Bappenas untuk konsultan tersebut. Mengenai komitmen Pemerintah Daerah, ADB dan Bappenas juga menyarankan untuk mencermati kembali komitmen Pemerintah Daerah mengingat kegiatan ini ada di Pemerintah Daerah.

- **PT. PLN**

- ***Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement (2619-INO)***

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* dengan nomor *Loan* 2619-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 23,76 juta (47,52% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *Loan* 2619-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 5,52 juta (27,78% dari

target penyerapan TA 2014 sebesar USD 19,85 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2619-INO adalah -50,06, artinya kinerja nomor *loan* tersebut mengalami *serious delay*. Penyerapan pinjaman pada Triwulan III TA 2014 masih belum memenuhi target karena ada keterlambatan dalam proses kegiatan. Namun, *executing agency* berkomitmen akan mengejar keterlambatan tersebut.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini sudah ada persetujuan perpanjangan masa laku pinjaman untuk porsi ADB dari 31 Oktober 2014 sampai 30 November 2015. Pengerjaan di Jawa Timur masih tersisa 2 paket yang sedang berjalan, yaitu paket *Supply and Installation of Distributed Material and Equipment for East Java Region (LOT 1)* dan *Supply and Installation of Distributed Material and Equipment for East Java Region (LOT 2)*, sedangkan di DKI Jakarta masih tersisa 1 paket untuk pekerjaan, yaitu paket *Supply and Installation of Distributed Material and Equipment for DKI Jakarta Region*. Paket tersebut sempat mengalami kendala tetapi sudah diselesaikan dan saat ini sudah mulai berjalan.

Selain itu, kegiatan ini mengalami *amendment loan* dengan menambahkan kategori baru untuk memenuhi kebutuhan penerapan *front loading scheme* komponen kategori 2A (*Works/Installation DKI and East Java*). Presentasi pembiayaan ADB untuk paket ini juga telah diubah dari 42,48% menjadi 84,96%. Paket pekerjaan yang dianggap memenuhi syarat dari kategori yang baru tersebut adalah paket pekerjaan P6 dan paket pekerjaan P10. Kedua paket pekerjaan tersebut akan dikerjakan dengan menggunakan porsi AFD terlebih dahulu sampai progres fisik mencapai 50% dan setelah itu, pengerjaan akan dilakukan dengan menggunakan porsi ADB.

- West Kalimantan Power Grid Strengthening Project (3015-INO)

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *West Kalimantan Power Grid Strengthening Project* dengan nomor *Loan* 3015-INO telah melakukan penyerapan sebesar USD 3,53 juta (7,14% dari total pinjaman dengan nomor *loan* tersebut). Penyerapan untuk nomor *Loan* 3015-INO yang dilakukan di TA 2014 sebesar USD 3,53 juta (67,06% dari target penyerapan TA 2014 sebesar USD 5,27 juta). Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 3015-INO adalah -19,7, artinya kinerja nomor *loan* tersebut baik walaupun mengalami sedikit kendala dan keterlambatan. Pada akhir tahun 2014, pihak *Executing Agency* memperkirakan bahwa akan ada penyerapan sampai sekitar 418 miliar rupiah atau sekitar 89,3% dari target penyerapan tahun ini.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan ini baru mulai efektif pada tanggal 4 April 2014. Pada saat ini, kegiatan *West Kalimantan Power Grid Strengthening Project* ini sedang melakukan amandemen untuk paket 1. Namun jika *invoice* amandemen tersebut harus masuk ke *Project Management Unit (PMU)* pusat pada akhir Oktober 2014, *Project Implementing Unit (PIU)* memperkirakan bahwa *invoice* tersebut tidak dapat terselesaikan. Selain itu di paket 1, keterlambatan tanggal efektif kegiatan menyebabkan pembayaran material CIF

(Insulator-PS1) dilakukan oleh anggaran PLN sehingga barang tersebut tetap terkena bea impor.

Di paket 2, paket 3, dan paket 4, terjadi kendala yang terkait dengan keterlambatan terbitnya DIPA. Keterlambatan terbitnya DIPA mengakibatkan keterlambatan penerbitan *master list*. Sementara itu, *material import* hampir sampai di Indonesia. Tidak disertakannya *master list* ini dapat mengakibatkan barang-barang tersebut terkena bea masuk barang impor. Padahal, pengerjaan dengan sumber dana pinjaman mendapatkan fasilitas bebas bea masuk barang impor jika disertai dengan *master list*. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kontraktor akan membayar bea masuk barang-barang tersebut dan mengajukan *re-imburse* ke anggaran PLN. Untuk paket 2, amandemen untuk hal tersebut telah selesai dilaksanakan. Untuk paket 3, izin prinsip untuk *re-imburse* bea impor telah terbit. Untuk paket 4, proses amandemen terkait bea impor sedang dilaksanakan.

- **Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project (3083-INO& 8276-INO)**
Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project* dengan nomor *Loan* 3083-INO dan 8276-INO belum melakukan penyerapan mengingat kegiatan ini baru efektif pada 29 September 2014. Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 3083-INO dan 8276-INO adalah -0,05, artinya kinerja nomor *loan* tersebut masih baik dan tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project* merupakan kegiatan *co-financing* ADB dan ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF). Kegiatan ini menggunakan dana pinjaman dari *Ordinary Capital Resources* (OCR) ADB sebesar USD 224 juta di bawah nomor *Loan* 3083-INO, dana pinjaman dari AIF sebesar USD 25 juta di bawah nomor *Loan* 8276-INO, dan dana *counterpart* sebesar USD 0,16 juta. Kegiatan ini baru efektif pada tanggal 29 September 2014 dan dijadwalkan untuk tutup pada tanggal 30 September 2019. Kegiatan *Java-Bali 500 Kilovolt Power Grid Strengthening Project* bertujuan untuk mengembangkan jaringan transmisi daya di Jawa dan Bali untuk memenuhi permintaan di Pulau Bali pada masa yang akan datang, serta untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi suplai daya jangka panjang.

Kegiatan ini terdiri dari tiga komponen: i) ekspansi jaringan transmisi 500 kilovolt; ii) pengembangan *substations* 500/1500 kilovolt dan 150/20 kilovolt; serta iii) manajemen proyek. Komponen 1 meliputi konstruksi dari: i) *double circuit transmission line* antara *substation* Paiton dengan Watudodol di Jawa; ii) *double circuit transmission line* antara Gilimanuk dan Segara Rupek dengan menyeberangi Selat Bali; iii) *double circuit transmission line* antara Segara Rupek dengan Gilimanuk di sekitar batas pinggir Taman Nasional Bali Barat; dan iv) *double circuit transmission line* antara Gilimanuk dan Antosari. Komponen 2 meliputi: i) ekstensi dari *substation* Paiton 500 kilovolt di Jawa Timur; ii) konstruksi *substation* baru (500/150 kilovolt) di Bali; dan iii) ekstensi/peningkatan kualitas 11 *substation* (150/20 kilovolt) yang terdiri dari 6

substation di Pulau Jawa dan 5 *substation* Pulau Bali. Komponen 3 meliputi jasa konsultan untuk mendukung manajemen proyek dalam mengawasi konstruksi, perlindungan keselamatan (*safeguards*), dan pembangunan kapasitas.

- **PT. Sarana Multi Infrastruktur, Persero**

- **Indonesia Infrastructure Finance Facility Company (2516-INO)**

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, kegiatan *Indonesia Infrastructure Finance Facility Company* (IIFF) dengan nomor *Loan* 2516-INO melakukan penyerapan sebesar USD 94,6 juta (94,6% dari jumlah nilai pinjaman proyek tersebut). Nomor *Loan* 2516-INO belum melakukan penyerapan di TA 2014 tetapi proyek ini menargetkan untuk melakukan penyerapan sebesar USD 5,4 juta. Nilai *progress variant* untuk nomor *Loan* 2516-INO adalah 1,44, artinya kinerja nomor *loan* tersebut sangat baik dan bahkan lebih cepat dari rencana kegiatan.

Sampai saat ini, sisa SLA sebesar USD 5,39 juta belum bisa diajukan penarikannya karena SP3 atas penarikan sebelumnya sebesar USD 6,4 juta dengan NoD dari ADB tertanggal 9 Desember 2013 belum diterbitkan oleh KPPN. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak *executing agency* akan segera menyampaikan dokumen penarikan kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan setelah mendapatkan konfirmasi nominal rupiah yang dapat ditarik berdasarkan DIPA Revisi setelah dikurangi dengan pencatatan atas penarikan sebelumnya (USD 6,4 juta).

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan *Indonesia Infrastructure Finance Facility* (IIFF) *Company* merupakan kegiatan yang menggunakan dana pinjaman dari ADB sebesar USD 100 juta. Kegiatan ini efektif pada tanggal 25 April 2011 dan dijadwalkan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Kegiatan ini telah menyelesaikan pengerjaannya. Namun pada masa akhir proyek, ADB meminta pihak *executing agency* untuk mengadakan pertemuan guna membahas isu *foreign exchange* yang terjadi pada *disbursement* terakhir.

Tabel 2.5 Perbandingan Nilai PV Kegiatan Pinjaman ADB dengan Kinerja Penyerapan Rendah (PV ≤ -30,00) pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III TA 2014

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TW I 2014	TW II 2014	TW III 2014
1	2500-INO	<i>Integrated Citarum Water Resources Management</i>	03/06/2009	31/05/2016	-63,50	-40,96	-58,97
2	2817-INO	<i>Regional Road Development Project</i>	31/07/2012	30/08/2016	-22,62	-28,51	-45,20
3	2654-INO	<i>Metropolitan Sanitation Management Health Project</i>	22/11/2010	30/06/2015	-12,46	-13,58	-32,91
4	2619-INO	<i>Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement Project</i>	25/04/2011	31/10/2014	-61,56	-59,71	-50,06

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

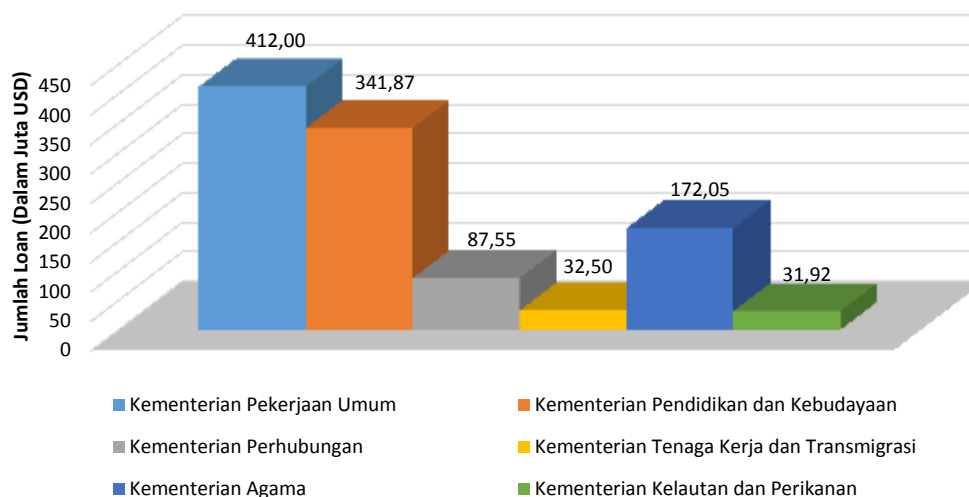
IDB

Proyek pinjaman luar negeri dari *Islamic Development Bank* (IDB) dibiayai dengan menggunakan skema syariah/*Islamic Finance*, melalui beberapa model pembiayaan yang berbeda berdasar prinsip dan jenis kegiatan yang dibiayai. Model pembiayaan tersebut diantaranya adalah:

- *Istisna'a*, untuk kegiatan pembangunan infrastruktur/bangunan;
- *Installment Sale*, untuk kegiatan pengadaan/ pembelian barang;
- *Leasing*, untuk sewa beli peralatan;
- *Loan*, yang digunakan untuk pembiayaan *capacity building* (*training/soft skill* program);
- *Mudharabah* dan *Equity Participation* berupa penyertaan modal, biasanya digunakan untuk sektor bisnis/swasta yang menghasilkan keuntungan.

Secara umum, pembiayaan dari IDB dilakukan atas prinsip jual beli dan atau sewa beli. Pihak IDB bertindak sebagai penyedia output proyek atau barang yang dibeli oleh pemerintah dengan harga yang telah disepakati bersama, dan dibayar melalui angsuran dalam jangka menengah/panjang. Dengan mekanisme ini, pembiayaan dilakukan tidak berdasar *interest* tetapi berdasar *sale price* dari harga di masa depan, yang telah disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dan IDB saat pembahasan *financing agreement*. Dalam proses penyediaan output proyek atau barang tersebut, pihak IDB menunjuk pihak *Executing Agency* sebagai agen yang akan melaksanakan proses *tender/lelang* atas output proyek atau barang yang akan dibangun/dibeli.

Pada Triwulan III TA 2014, ada 16 proyek dengan 26 *financing agreement* yang didanai oleh pinjaman dari IDB dengan total pinjaman sebesar USD 1.077,89 juta. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh enam Kementerian/Lembaga seperti yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan III TA 2014 Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Sampai dengan Triwulan III TA 2014, proyek IDB paling banyak terdapat di sektor pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 6 proyek dan Kementerian Agama sebanyak 4 proyek, sementara Kementerian Pekerjaan Umum mengelola 3 proyek dengan jumlah pinjaman terbanyak, yaitu USD 412 juta. Di bawah ini pinjaman IDB dikelompokkan menurut sektor:



Gambar 2.5 Jumlah Pinjaman Proyek IDB pada Triwulan III TA 2014 Berdasarkan Sektor Kegiatan

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman IDB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan III TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	3	412,00	222,07	55,11	189,93	92,19	45,25	49,08
2	Kemendikbud	6	341,87	4,91	1,44	336,96	81,76	1,31	1,60
3	Kemenhub	1	87,55	0,80	0,91	86,75	2,62	0,32	12,07
4	Kemenag	4	172,05	0,86	0,50	171,19	45,77	0,16	0,35
5	Kemen KP	1	31,92	5,74	17,99	26,18	6,53	0,30	4,64
6	Kemenakertrans	1	32,50	0,00	0,00	32,50	0,38	0,00	0,00
Total		16	1.077,89	234,38	21,74	843,51	229,25	47,34	20,65

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan sampai dengan bulan September 2014 mencapai USD 234,38 juta atau 21,74% dari total nilai pinjaman proyek. Penyerapan sampai dengan Triwulan III TA 2014 mencapai 20,65% dari target penyerapan dana pinjaman pada TA 2014.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- **PNPM ICDD Phase III (IND-0169, IND-0170, IND-0171)**

Kegiatan ICDD PNPM III merupakan kelanjutan dari kegiatan PNPM ICDD Phase II di lokasi yang sama kecuali di Provinsi Aceh. Kegiatan ini efektif pada tanggal 15 Desember 2013. Saat ini, pelaksanaan kegiatan PNPM ICDD III dilakukan percepatan pelaksanaannya sehingga ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2015. Hingga bulan September 2014, penyerapan untuk total 3 *loan* mencapai 22,15%. Beberapa kegiatan yang tengah dilaksanakan saat ini, ditargetkan penyerapan

kumulatifnya mencapai USD 80,53 juta pada akhir tahun 2014 atau sekitar 39% dari total dana pinjaman USD 204 juta.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, penyerapan untuk total 3 *financing agreement* mencapai 22,15%. Pinjaman dengan *financing agreement* IND-0169 telah melakukan penyerapan kumulatif sebesar USD 80,23 juta (42,90%). Untuk IND-0171 telah melakukan penyerapan kumulatif sebesar USD 0,30 juta atau 3,03%, sedangkan untuk IND-0170 belum terdapat penyerapan. *Progress variant* (PV) dari *financing agreement* IND-0169 adalah 14,57, artinya kinerja penyerapan masih baik dan tepat waktu. Namun, PV untuk IND-0170 dan IND-0171 masing-masing sebesar -28,33 dan -25,3, artinya kedua *financing agreement* tersebut mengalami keterlambatan yang cukup signifikan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Beberapa output yang telah tercapai diantaranya sekitar 32% *block finance* telah dibayarkan, atau sekitar USD 36 juta. Hingga akhir tahun 2014, total nilai BLM yang akan di-*disbursed* ditargetkan sebesar 58%, atau sekitar USD 66,81 juta. Komponen lain yang telah dikerjakan pada Triwulan III ini adalah *capacity building for communities, facilities, and local government* serta kegiatan fasilitasi.

- PNPM ICDD Phase II (IND-0147 & IND-0148)

Proyek PNPM ICDD Phase II merupakan kegiatan pembangunan kapasitas komunitas dan masyarakat miskin di perkotaan di 14 provinsi, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Proyek ini terdiri dari 4 *financing agreement* dengan nomor IND-0147, IND-0148, IND-0149, dan IND-0150. Saat ini *financing agreement* yang masih *on-going* adalah IND-0147 yang telah diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2014 dan IND-0148 yang berakhir pada 24 September 2014. Sedangkan *financing agreement* dengan nomor IND-0149 dan IND-0150 telah berakhir pada 31 Desember 2013.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, proyek PNPM ICDD Phase II sudah melakukan penyerapan sebesar USD 5,54 juta (92,40% dari jumlah pinjaman) untuk IND-0147. Untuk IND-0148 telah menyerap seluruh alokasi pinjaman, atau sebesar USD 136,00 juta. Nilai *progress variant* untuk proyek ini adalah 0,11 untuk IND-0147 dan 0 untuk IND-0148, artinya kedua *financing agreement* proyek ini telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian *output* untuk masing-masing *financing agreement* adalah sebagai berikut:

- IND-0147

Realisasi komponen *communication and advocacy* dan juga *capacity building and institutional development* telah tercapai 100%. Komponen *orientation workshop and*

familiarization akan dilaksanakan pada bulan November 2014. Adapun untuk seluruh *block finance*/BLM dari kategori *Loan* IND-0147 telah selesai diberikan.

- IND-0148

Hingga bulan September 2014, komponen yang telah tercapai adalah *capacity building and institutional development* serta kegiatan fasilitasi (gaji fasilitator), seluruh pekerjaan konsultansi. Untuk dana BLM, masih tersisa sekitar USD 2,5 juta dari total yang dialokasikan sebesar USD 85 juta.

- **Regional Road Development Project (IND-0161)**

Proyek *Regional Road Development* merupakan proyek *co-financing* antara ADB dan IDB. Kegiatan ini berupa pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 410 km dan renovasi 169 jembatan di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, serta Jawa Tengah. Pinjaman IDB mendanai kegiatan di wilayah Jawa Tengah dengan total panjang kurang lebih 86,3 km yang terdiri dari 3 ruas jalan, yaitu ruas jalan Tambak Mulyo – Wawar, Giri Woyo – Duwet, dan Wawar – Congot. Selain itu, proyek ini juga mencakup pengembangan kebijakan di bidang jalan, berupa *Road Safety Program*, studi pengembangan, dan *capacity development* bagi *stakeholder* terkait di bidang transportasi jalan raya.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, proyek RRDP belum melakukan penyerapan sehingga target penyerapan tahun 2014 ini (yaitu USD 8,03 juta) belum tercapai. Nilai *progress variant* untuk proyek ini adalah -35,52, artinya proyek ini sudah termasuk proyek yang mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2014 ini, PMU telah menyelesaikan evaluasi *tender* untuk:

- Paket fisik lot 1,2,dan 3. Dokumen tersebut telah dikirimkan kepada IDB pada tanggal 23 September 2014, dan pekerjaan fisik ditargetkan dapat terkontrak pada akhir tahun 2014.
- Paket konsultan (*Design and Supervision Consultant/DSC*). Hasil evaluasi teknik telah disampaikan kepada IDB, namun masih diperlukan beberapa klarifikasi dan sedang dikomunikasikan oleh PMU dengan pihak IDB.

Permasalahan dalam proses *tender*, antara lain karena adanya dualisme penggunaan *procurement guidelines* (Perpres 54 tahun 2010 beserta turunannya dan IDB *guidelines*), sehingga harus berkali-kali dilakukan klarifikasi dan permintaan persetujuan. Saat ini hasil evaluasi tender telah mendapatkan klarifikasi akhir dari IDB, namun masih terdapat beberapa data yang harus disampaikan oleh PMU, dan baru disampaikan pada minggu kedua November 2014. Diharapkan proses ini akan selesai pada akhir November 2014.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- ***The Support to Higher Education Project (IND-0168)***

Proyek *The Support to Higher Education Project (Development and Upgrading of Seven Universities in Indonesia in Improving the Quality and Relevance of Education)* atau dikenal sebagai Proyek 7 in 1, didanai dengan pinjaman IDB sebesar USD 174,01 juta dan *co-finance* dengan *Saudi Fund for Development (SFD)* dengan pinjaman sebesar USD 35 juta. Proyek ini berupa pembangunan 60 gedung baru dengan jumlah area bangunan seluas 168.075 m², renovasi dari 16 gedung yang sudah ada, dan pengadaan peralatan, pengembangan kurikulum, pelatihan, *e-learning*, buku/jurnal, dan bantuan penelitian. IDB mendanai proyek yang dilakukan di enam universitas, yaitu Universitas Tanjungpura (Kalimantan), Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan), Universitas Sam Ratulangi (Sulawesi), Universitas Negeri Gorontalo (Sulawesi), Universitas Negeri Yogyakarta (Jawa), dan Universitas Negeri Surabaya (Jawa). Satu universitas lagi, yaitu Universitas Syiah Kuala, didanai oleh SFD.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, proyek ini belum melakukan penyerapan pinjaman karena baru saja melakukan *start up workshop* pada bulan Agustus 2014. Jika berjalan sesuai rencana maka *first disbursement* akan terjadi pada akhir tahun 2014. Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* IND-0168 ini mencapai -11,57, artinya proyek ini masih berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini efektif pada tanggal 14 April 2014 dan telah melakukan *start up workshop* pada bulan Agustus 2014. Saat ini, proyek ini masih dalam tahap pengadaan konsultan untuk pekerjaan detail desain, supervisi dan juga PMU *expert*. *Executing Agency* telah mengirimkan dokumen RFP DEDC kepada IDB pada tanggal 27 September 2014 untuk mendapatkan *No Objection Letter (NOL)* dari IDB. Selanjutnya, dokumen RFP PMSC akan dikirimkan ke IDB setelah NOL DEDC terbit.

Executing agency juga merencanakan untuk melakukan *familiarization* pada tahun ini dengan alokasi anggaran yang ada. Terkait rencana tersebut, IDB menyarankan untuk melakukan *familiarization* pada bulan Februari 2015.

- ***Development and Upgrading of State University of Padang (IND-0155 & IND-0156)***

Proyek *The Reconstruction and Upgrading of the State University of Padang Project (UNP)* berupa rekonstruksi dan pembangunan 7 gedung beserta infrastruktur pendukungnya, pengadaan peralatan laboratorium, serta pekerjaan konsultasi. Proyek ini efektif pada 28 November 2011 mendapatkan pinjaman dari IDB sebesar USD 29,5 juta dan pendanaan dari Pemerintah Indonesia sebesar USD 6,9 juta.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, penyerapan kumulatif untuk IND-0155 sebesar USD 0,33 juta (1,33%) dan IND-0156 sebesar USD 0,03 juta (0,65%). *Progress variant* untuk IND-0155 adalah -55,43 dan untuk IND-0156 sebesar -56,11, artinya kedua *financing agreement* tersebut mengalami keterlambatan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Saat ini, proyek ini dalam proses pengadaan FAC dan pengadaan kontraktor untuk pekerjaan fisik. *Executing Agency* juga menargetkan bahwa pada awal Januari 2015, *civil works* sudah bisa dikerjakan.

Kegiatan ini mengalami keterlambatan dimana target kontrak pekerjaan fisik pada tahun 2014 belum tercapai. Rencana penarikan dana pada tahun 2014 yang masih tersisa satu kali lagi, akhirnya diundur ke tahun 2015 karena belum ada *progress* pembangunan. *Executing agency* juga meminta agar dana Rupiah Pendamping 2015 dapat dialihkan ke tahun 2016. Bappenas menyarankan kepada *Executing Agency* untuk mengirimkan jadwal pemasukan dokumen dan *action plan* pekerjaan *civil works* kepada *Project Officer* IDB sehingga dapat dijadwalkan *procurement committee meeting* dan kontrak dapat ditandatangani pada 31 Desember 2014.

- *Development and Quality Improvement of State University of Semarang (IND-0152, IND-0153, IND-0154)*

Proyek *The Development and Quality Improvement of the Semarang State University (UNNES)* berupa pembangunan 13 gedung baru seluas 34.600 m² beserta peralatannya, pengembangan infrastruktur pendukung, renovasi 4 gedung lama, pengembangan kurikulum, dan pendidikan doktoral ke luar negeri. Proyek UNNES bernilai USD 45,29 juta, terdiri atas pinjaman IDB sebesar USD 36,02 juta dan dana pendamping GoI sebesar USD 9,27 juta. Proyek ini telah efektif pada 28 November 2011.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, penyerapan kumulatif IND-0152 sebesar USD 1,21 juta (36,13%), IND 153 sebesar USD 0,35 juta (1,37%) dan IND-0154 belum melakukan penyerapan. Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* IND-0152 sebesar -33,28, untuk *financing agreement* IND-0153 sebesar -90,48, dan untuk *financing agreement* IND-0154 sebesar -91,85, artinya ketiga *financing agreement* tersebut mengalami keterlambatan.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga saat ini, progres pelaksanaannya adalah pekerjaan konsultasi untuk DEDC, PMSC, dan EQC telah terkontrak. Kegiatan pengembangan kurikulum (*academic curriculum development*) juga telah dimulai. Untuk komponen *skill development program*, 16 peserta program doktoral sudah diberangkatkan, dan 13 *workshop/training* untuk dosen dan tenaga pendidikan telah dilaksanakan. Kegiatan ini berkontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan di UNNES, di samping pengembangan infrastrukturnya.

Untuk pengadaan kontraktor pekerjaan fisik, hasil evaluasi tender telah disetujui IDB pada minggu kedua November 2014 dan sedang dalam proses persiapan kontrak.

Proyek ini mengalami keterlambatan dari target pelaksanaan konstruksi yang telah ditetapkan pada Triwulan ini. Untuk mengejar keterlambatan tersebut, Bappenas dan IDB menyarankan kepada *executing agency* untuk mempersiapkan semua *draft*

dokumen yang diperlukan terlebih dahulu dan mengirimkannya ke IDB untuk di-*review* sehingga jika dokumen BER selesai diproses, tanda tangan kontrak bisa dilaksanakan seminggu sebelum tanggal 29 November 2014 dan *withdrawal application* bisa dikirimkan ke KPPN sebelum 29 November 2014. Selain itu, Bappenas juga menyarankan agar *Executing Agency* terus menginformasikan dan mengingatkan *project Officer* IDB mengenai jadwal untuk tanda tangan kontrak dan pemrosesan dokumen.

Proyek ini mengusulkan perpanjangan untuk *Loan* IND-0152 dari sebelumnya berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi 15 Juni 2016. Perpanjangan ini terjadi karena proses *procurement* konsultan komponen pengembangan kurikulum memakan waktu yang lama karena kurangnya ahli yang berkualitas dalam bidang tersebut dan karena adanya kendala dalam memperoleh *Letter of Acceptance* (LoA) dari universitas terkait dalam proses pemberian beasiswa. Pada tanggal 30 Oktober 2014, IDB telah menyetujui perpanjangan masa laku untuk nomor *Loan* IND-0152 sampai dengan 31 Desember 2015.

- ***The Quality Improvement of Padjadjaran University (IND-0140 & IND-0141)***

Proyek *The Quality Improvement of Padjadjaran University* ini berupa pembangunan 18 gedung baru seluas 40.000 m² beserta infrastruktur pendukungnya, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, serta pengembangan kurikulum. Proyek ini efektif pada 24 Juli 2011 dengan total pinjaman dari IDB sebesar USD 43,97 juta dan pendanaan dari GoI sebesar USD 8,75 juta.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, penyerapan untuk IND-0140 adalah sebesar USD 0,53 juta (1,95%) sedangkan untuk IND-0141 belum melakukan penyerapan. Nilai *progress variant* untuk IND-0137 adalah -73,00 dan untuk IND-0138 adalah -74,95, artinya kedua *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Output pada Triwulan III ini, telah dilakukan tanda tangan kontrak untuk pekerjaan fisik pada tanggal 17 Oktober 2014, pembayaran DP sudah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2014 dan sedang diproses dana ke rekening proyek. Seluruh pekerjaan konsultansi (DEDC, PMSC, dan EQC) telah terkontrak dan saat ini tengah menyelesaikan pekerjaan masing-masing.

Proyek ini sempat mengalami keterlambatan akibat lamanya proses pengadaan kontraktor untuk pekerjaan fisik, yang diantaranya disebabkan oleh adanya *komplain procurement* yang dilakukan oleh salah satu peserta tender. Permasalahan tersebut telah terselesaikan setelah Bappenas berkoordinasi dengan IDB, dan melakukan misi bersama IDB ke UNPAD pada tanggal 13 September 2014. Kontraktor *civil work* telah terkontrak dan telah memulai pembangunan fisik.

- ***The Development of Medical Research Center and Two Univeristy Hospitals (IND-0137 & IND-0138)***

Kegiatan *Development of Medical Education and Research Center at Two University Hospitals* dibiayai secara *co-finance* dengan *Saudi Fund for Development (SFD)*. Kegiatan ini berupa pembangunan gedung pusat riset kedokteran di Universitas Indonesia, dan pembangunan rumah sakit pendidikan di Universitas Sebelas Maret dan Universitas Andalas. Untuk kegiatan fisik di Universitas Andalas dan Universitas Negeri Sebelas Maret, telah dimulai sejak Triwulan I Tahun 2014 yang lalu. Total nilai proyek sebesar USD 128,17 juta, terdiri atas pinjaman IDB sebesar USD 63,97 juta, pinjaman SFD sebesar USD 36 juta, dan dana pendamping GoI sebesar USD 28,2 juta. Proyek ini telah efektif pada 26 Februari 2011 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, penyerapan kumulatif untuk IND-0137 sebesar USD 0,81 juta (2,59%), sedangkan untuk IND-0138 belum terdapat penyerapan. Nilai *progress variant* untuk IND-0137 adalah -90,86 dan untuk IND-0138 adalah -93,45, artinya kedua *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Komponen proyek yang dibiayai oleh SFD (*Saudi Fund for Development*) dilaksanakan di Universitas Negeri Sebelas Maret dan Universitas Andalas saat ini sudah dalam proses konstruksi pekerjaan fisik yang dimulai sejak Maret 2014 yang lalu.

Untuk komponen proyek yang dibiayai IDB yang dilaksanakan di Universitas Indonesia, saat ini hasil evaluasi *tender civil work* telah disetujui oleh IDB, dan sedang dalam proses internal untuk penandatanganan kontrak. Penetapan pemenang *civil work* direncanakan dilakukan pada bulan November atau Desember 2014. Kontrak Konsultansi EQC sudah tanda tangani pada 27 Oktober 2014.

Secara umum, permasalahan yang terjadi dalam triwulan sebelumnya, saat ini telah dapat diselesaikan, dan terdapat perkembangan dalam proses penyelesaiannya. *Progress variant* proyek ini rendah akibat lamanya proses persiapan tender di Universitas Indonesia pada Triwulan I dan II, karena bangunan lama merupakan cagar budaya.

Dalam rapat pemantauan, dilaporkan bahwa terdapat kesulitan dari SFD untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), karena persyaratan teknis dari bank pengirim. Adapun di Universitas Andalas (Unand), *Note of Disbursement (NoD)* belum terbit tetapi uang sudah masuk ke rekening. Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Bappenas telah melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Bank Indonesia dan SFD. Sampai saat ini, masih belum ada informasi perkembangan dari SFD.

- ***Development and Upgrading of State University of Jakarta (IND-0130)***

Proyek pembangunan fisik di UNJ telah selesai pada 31 Desember 2013 dan menghasilkan output berupa 3 gedung baru (2 gedung menggunakan biaya pinjaman

dari IDB dan 1 gedung menggunakan dana GoI) seluas 29.500 m² beserta infrastruktur pendukungnya, renovasi 15 gedung dengan total luas 22.570 m² melalui dana pendamping GoI, pengadaan konsultan *expert* (*Construction Manager* dan *Procurement Specialist*); peralatan laboratorium pembelajaran serta furnitur, pengembangan akademik (pengembangan kurikulum dan peningkatan kapasitas SDM), serta jasa-jasa konsultasi untuk mendukung pelaksanaan proyek. Kedua nomor *loan* proyek ini efektif pada 12 April 2009. Nomor *Loan* IND-0129 berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan nomor *Loan* IND-0130 berakhir pada tanggal 30 Desember 2014.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, proyek *Development and Upgrading of State University of Jakarta* dengan *financing agreement* IND-0130 melakukan penyerapan sebesar USD 1,65 juta (52,07% dari jumlah pinjaman *financing agreement* IND-0130). Nilai *progress variant* untuk proyek ini adalah -43,53, artinya proyek ini sudah termasuk proyek yang mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga saat ini, komponen yang masih belum diselesaikan adalah *staff development* dimana peserta program PhD baru akan lulus pada September 2015. PMU secara resmi telah melakukan pembatalan komponen *curriculum development* dan telah disetujui oleh IDB pada Maret 2014. Kegiatan tersebut akhirnya dibiayai oleh pihak UNJ . Proyek ini diharapkan segera mempersiapkan *Project Completion Report* (PCR) dan disampaikan setelah *closing date* tanggal 30 September 2014.

Loan ini akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2014 dan diupayakan untuk tidak ada perpanjangan. Terkait program PhD yang baru akan selesai pada tahun 2015, *Executing agency* merencanakan untuk melakukannya dengan *advance disbursement* pada 2014. Perwakilan dari Kementerian Keuangan menyarankan bahwa jika sampai bulan November 2014 *advance disbursement* tersebut tidak bisa dipastikan, perpanjangan *loan* perlu segera dilakukan supaya tercatat di DIPA 2015. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa program PhD tersebut baru akan selesai lebih dari 6 bulan setelah *closing date*.

- **Kementerian Perhubungan**

- ***Development of Belawan Port Phase 1 (IND-0133)***

Proyek ini berupa pekerjaan pengerukan, *land reclamation*, *soil improvement*, *utilities*, dan *pavement* di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0133 telah melakukan penyerapan kumulatif sebesar USD 0,8 juta (0,91%). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* IND-0133 adalah -74,08, artinya *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini dalam tahap akhir pengadaan kontraktor *civil work* dimana hasil evaluasi telah disampaikan kepada IDB pada tanggal 18 September 2014. IDB menyatakan saat ini masih menunggu *clearance* dari *evaluation committee* terkait dengan hasil evaluasi oleh panitia pengadaan (calon pemenang yang diusulkan bukan penawar terendah).

Proyek ini sempat mengalami keterlambatan akibat pemrosesan usulan *rescoping* paket pekerjaan *civil work*. *Rescoping* tersebut telah disetujui oleh IDB, dimana Paket I dibiayai melalui pinjaman IDB, dan Paket II dan III akan diselesaikan melalui pendanaan rupiah (PT. PELINDO). Untuk percepatan proses dimulainya pekerjaan fisik, IDB menyarankan *executing agency* untuk segera mengirimkan *draft* kontrak supaya bisa *review* terlebih dahulu oleh IDB sambil menunggu NOL hasil evaluasi *civil work*. Jika tanda tangan kontrak dan penyerahan *withdrawal application* ke KPPN bisa dilakukan sebelum tanggal 29 November 2014 (*deadline* penyerahan terakhir *withdrawal application* ke KPPN), penyerapan pada tahun ini bisa mencapai Rp 150 miliar.

Target tersebut nampaknya akan sulit dicapai, karena hasil evaluasi *tender* oleh Panitia Pengadaan yang disampaikan kepada IDB belum disetujui, dan masih harus dilakukan klarifikasi. Panitia mengusulkan calon pemenang yang bukan penawar terendah, dan mendiskualifikasi penawaran terendah. IDB masih menunggu hasil klarifikasi lebih lanjut dari Panitia Pengadaan/PMU.

Dalam pembuatan rencana penyerapan, *executing agency* mengindikasikan adanya perpanjangan *loan* sampai tahun 2017 yang disebabkan oleh mundurnya jadwal tanda tangan kontrak. Namun demikian, usulan tersebut harus menunggu progres pelaksanaan pekerjaan fisik di tahun 2015.

- **Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

- ***Revitalization of Vocational Training Center (IND-0159 & IND-0160)***

Proyek *Revitalization of Vocational Training Centers (VTC)* berupa program ekspansi, pembelian peralatan, pengembangan keterampilan, dan pelatihan dari 11 Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia. Proyek ini didanai dengan total pinjaman IDB sebesar USD 32,5 juta dan efektif sejak 23 Desember 2013.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, proyek ini belum melakukan penyerapan pinjaman karena baru saja melakukan *start up workshop* pada bulan Agustus 2014. Jika berjalan sesuai rencana, *first disbursement* akan ada pada akhir tahun 2014. Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* IND-0159 ini mencapai -19,23, artinya proyek ini masih berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan adalah *start up workshop* pada tanggal 10 – 12 September 2014 yang lalu. Hingga saat ini, dana pendamping (rupiah) untuk proyek ini telah diserap sekitar 90%, dan untuk penyerapan dana *loan* masih belum ada. Proses pekerjaan fisik (dari sumber rupiah pendamping) direncanakan akan dilaksanakan di

tahun 2015, di mana *executing agency* telah mengalokasikan dana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar 45 miliar rupiah untuk tahun 2015.

Pekerjaan konsultan PMEQC (*Project Management and Equipment Consultant*) saat ini sedang dalam proses finalisasi dokumen *tender*.

Terkait *first disbursement* untuk kegiatan *start up workshop*, dokumen *withdrawal application* sudah dikirimkan KPPN ke IDB pada akhir bulan September 2014 dan sampai saat ini belum ada dana yang masuk ke rekening proyek. Untuk hal ini, IDB dan Bappenas menyarankan untuk mengirimkan pula dokumen *hardcopy* dan terus memberi notifikasi kepada IDB *Country Gateway Office* Jakarta mengenai segala hal yang telah dilaksanakan dan sedang diproses.

Disbursement plan sudah disusun pada saat *start up workshop* dan sudah disetujui oleh IDB. Namun karena penyusunan *disbursement plan* dan *start up workshop* dilaksanakan setelah rapat trilateral, angka target *disbursement* pun berbeda. Pada rapat trilateral, target *disbursement* 2015 sejumlah 393 miliar rupiah. Namun pada *start up workshop* dan penyusunan *disbursement plan*, target *disbursement* 2015 hanya sejumlah 7 miliar rupiah. Hal ini disebabkan oleh adanya prediksi keterlambatan penandatanganan kontrak konsultan alat yang awalnya direncanakan akan ditandatangani pada akhir 2014 tetapi mundur karena hingga saat ini prosesnya baru pada tahap penyusunan dokumen *tender*. Mengenai permasalahan tersebut, Bappenas tetap menyarankan untuk mempercepat proses tanda tangan kontrak dan kerja PMEQC supaya penyerapan sesuai target *disbursement* 2015 yang disetujui pada rapat trilateral dapat terlaksana. IDB merekomendasikan adanya rapat terpisah guna menindaklanjuti hal tersebut.

- **Kementerian Agama**

- ***Support to Development of Islamic Higher Education (IND-0164)***

Proyek *The Support to Quality Improvement of Islamic Higher Education Project* (IND-0164) atau dikenal juga sebagai Proyek 4 in 1, merupakan proyek pembangunan dan pengembangan 4 IAIN, yaitu IAIN Sumatera Utara di Medan, IAIN Raden Fatah di Palembang, IAIN Walisongo di Semarang, dan IAIN Mataram di NTB. Proyek ini berupa pembangunan 33 gedung baru dan fasilitas pendukung beserta furnitur dan peralatan laboratorium, pengembangan kurikulum dan *training program*, serta pekerjaan konsultansi dan PMU. Proyek ini telah efektif pada 18 Mei 2013 dengan nilai USD 163,28 juta yang terdiri dari pinjaman IDB sebesar USD 123,75 juta dan dana pendamping GoI sebesar USD 39,53 juta. Proyek ini dikelola dan dilaksanakan oleh PMU di Pusat di bawah Kementerian Agama.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0164 belum terdapat penyerapan. Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* tersebut adalah -34,22, artinya *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini telah melaksanakan *start up workshop* pada tanggal 17 September 2013. Permintaan *first disbursement* untuk *start up workshop* proyek ini telah dikirim ke IDB pada tanggal 2 Oktober 2014. Saat ini, PMU sedang melakukan persiapan pengadaan jasa konsultasi. Dokumen RFP DEDC juga sudah dikirimkan ke IDB pada bulan Oktober 2014.

Proyek ini mengalami keterlambatan akibat rendahnya kapasitas PMU dalam mempersiapkan proses pengadaan dan pemaketan jasa konsultasi. Terkait usulan *executing agency* untuk meminta perubahan pemaketan, IDB menyatakan bahwa surat mengenai perubahan paket proyek bisa dikeluarkan langsung dari PMU atau *executing agency* ke IDB, mengingat kesepakatan terkait hal tersebut tidak terdapat dalam *financing agreement* ataupun *minutes of meeting*. Perubahan pemaketan tersebut diperlukan mengingat adanya kendala SDM di lingkungan PMU pusat.

- *Development of IAIN Sunan Ampel (IND-0157 & IND-0158)*

Proyek *The Development and Quality Improvement of State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Surabaya* berupa pembangunan 7 gedung baru seluas 33.680 m², renovasi 6 bangunan lama, penyediaan infrastruktur pendukung, peralatan, pengembangan kurikulum, dan keterampilan staf. Pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman IDB sebesar USD 35 juta serta dari dana pendamping GoI sebesar USD 7 juta. Proyek ini efektif sejak 28 November 2011.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0157 terdapat penyerapan sebesar USD 0,65 juta (2,14%) dan untuk IND-0158 telah melakukan penyerapan sebesar USD 0,03 juta (0,68%). Nilai *progress variant* untuk IND-0157 mencapai -68,84 dan untuk IND-0158 mencapai -80,33, artinya kedua *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Saat ini, proyek ini sedang melaksanakan pekerjaan fisik yang diperkirakan akan terdapat penyerapan dalam jumlah yang besar (sekitar Rp 40 – 50 miliar) pada bulan November 2014. Progress saat ini, *bidding* FAC yang saat ini tengah dalam proses *clearance* hasil evaluasi. Untuk komponen PMSC saat ini sedang berlangsung dan akan melakukan *disbursement* sebanyak 483 juta rupiah dan 486 juta rupiah.

Untuk *financing agreement* IND-0158 (*installment sale*), proyek ini sudah mengalami perpanjangan tanggal tutup proyek dari semula tanggal 1 Juni 2014 menjadi 31 Mei 2015. Namun demikian, *executing agency* menyatakan bahwa proyek ini masih memerlukan perpanjangan masa laku lagi untuk IND-0158 tersebut. Pihak IDB mengusulkan untuk melihat lebih lanjut *progress* sampai dengan bulan Januari atau Februari 2015 dan kemudian baru melakukan justifikasi untuk menentukan perlu tidaknya perpanjangan masa laku *loan*. Bappenas juga menyarankan alternatif lain mengenai hal tersebut, yaitu dengan meminta kontraktor untuk mengakselerasi

pengerjaan proyek. Selain itu, IDB juga menyarankan untuk melakukan *site visit* untuk melihat *progress* proyek sebelum rapat *monitoring* dan evaluasi TW IV 2014.

- ***Upgrading and Development of UIN Sunan Gunung Djati (IND-0127)***

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0127 telah melakukan penyerapan sebesar USD 0,11 juta (2,04%). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* tersebut mencapai -94,07, artinya *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik untuk proyek ini telah selesai pada akhir tahun 2013, dan saat ini sedang dilaksanakan komponen *loan* IND-0127 yang akan berakhir pada 31 Desember 2014. *Loan* IND-0127 memiliki 2 paket, yaitu paket 1 (meliputi *integrated laboratory, biology laboratory, chemistry and physics laboratory, mathematics laboratory*) dan paket 2 (meliputi *language center, library, dan faculty of da'wah and tarbi'ah*). Saat ini, kedua paket tersebut sudah dalam proses pengiriman. Pihak *executing agency* telah mengingatkan *supplier* untuk melakukan *shipping* terakhir pada tanggal 30 November 2014.

Pada Triwulan III ini, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan komponen *loan* IND-0127 dan saat ini dalam tahap pemasangan. Isu terkait *tax* sudah selesai dan saat ini barang-barang tersebut sedang dalam proses *custom check*. IDB juga sudah mengeluarkan *Implementation Completion Report (ICR)*. Jika tidak ada kendala ataupun keterlambatan *shipping* dari Singapura, proyek ini dapat diselesaikan pada bulan Desember 2014.

- ***The Reconstruction of IAIN Ar Raniry (IND-0113)***

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0113 telah melakukan penyerapan sebesar USD 0,07 juta (0,88%). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* tersebut adalah -95,99, artinya *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik atas proyek ini telah selesai pada akhir tahun 2012, dan saat ini finalisasi pengadaan peralatan. Proyek ini melakukan perpanjangan masa laku sampai 31 Desember 2014 dari sebelumnya berakhir tanggal 30 September 2014. *Executing agency* menyatakan bahwa seluruh pengerjaan kegiatan akan diusahakan selesai bulan November 2014.

Sampai tanggal 20 September 2014, *progress* paket 1 (komputer dan elektronik) sudah mencapai 80% dan diperkirakan sudah hampir mencapai 100% pada bulan Oktober 2014. Pengiriman dokumen *advance payment* sudah dikirimkan pada tanggal 25 Oktober 2014 dan *executing agency* berharap bahwa pada 30 Oktober 2014, uang sudah diterima di rekening proyek. Saat ini, *executing agency* sedang melakukan pemasangan (*installing process*) di IAIN Ar Raniry. Paket 2 proyek ini sudah dibatalkan dan direncanakan akan

menggunakan dana rupiah murni. Paket 3 masih membutuhkan *commissioning test*. Barang untuk paket 4 (*furniture and fixture*) sudah ada di lokasi proyek.

Pihak *executing agency* telah mengingatkan *equipment supplier* untuk menyelesaikan pengadaan barang sebelum pertengahan bulan November 2014 sehingga *executing agency* bisa melakukan *final disbursement* dan menyerahkan *withdrawal application* ke KPPN sebelum tanggal 29 November 2014.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai perbedaan pencatatan penyerapan antara PMU dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Kementerian Keuangan. Perbedaan pencatatan ini terjadi karena PMU mencatatkan angka penyerapan berdasarkan *withdrawal application* yang sudah dikirimkan ke IDB sedangkan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Kementerian Keuangan mencatatkan angka penyerapan berdasarkan *Note of Disbursement (NoD)* dari IDB. Adapun isu keterlambatan SP3 yang terjadi di triwulan sebelumnya sudah dapat diselesaikan. Pengoperasian SPAN juga sudah berjalan dengan baik.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- ***Development of Belawan and Sibolga Fishing Port (IND-0121)***

Proyek *The Development of Belawan and Sibolga Fishing Port (IND-0121)* berupa pembangunan dua fasilitas pelabuhan ikan di Belawan dan Sibolga, beserta infrastruktur pendukungnya. Proyek ini efektif pada tanggal 15 Juli 2008 dengan nilai pinjaman dari IDB sebesar USD 31,92 juta.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, pinjaman dengan *financing agreement* IND-0121 terdapat penyerapan sebesar USD 5,74 juta (17,99%). Nilai *progress variant* untuk *financing agreement* tersebut mencapai -79,39, artinya *financing agreement* tersebut mengalami *serious delay*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek ini telah menyelesaikan seluruh komponen pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan di Sibolga dan tutup pada tanggal 30 November 2014. Untuk komponen pembangunan Pelabuhan Ikan Belawan, telah dinyatakan batal, dan sedang dalam proses pembatalan *financing agreement* oleh Kementerian Keuangan.

Proyek ini sempat mengalami keterlambatan akibat lamanya *executing agency* dalam melakukan penetapan pemenang kontraktor di Pelabuhan Belawan, akhirnya telah diputuskan proses tersebut tidak dapat diteruskan. Kegiatan pembangunan di Pelabuhan Belawan akhirnya akan dibiayai oleh dana rupiah mengingat *loan* ini akan berakhir pada 30 November 2014. Untuk komponen pembangunan Pelabuhan Ikan Belawan, telah dinyatakan batal, dan sedang dalam proses pembatalan *financing agreement* oleh Kementerian Keuangan.

Box 2: Kunjungan Lapangan

Loan IDB IND-0109 & IND-0110 : Post Evaluation Mission Proyek Pembangunan Universitas Diponegoro (UNDIP)

Executing Agency : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan Kunjungan Lapangan :

Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil pembangunan proyek Universitas Diponegoro (UNDIP), terutama aspek *sustainability*, mengingat kunjungan lapangan ini dilaksanakan beberapa tahun setelah proses pembangunan selesai.

Hasil Kunjungan Lapangan :

Secara umum, pelaksanaan *post evaluation* di UNDIP berjalan dengan baik dan lancar. Pihak UNDIP terlihat solid dan siap dalam menyediakan data yang diminta dan sebagian besar telah menduduki jabatan atau mendapatkan promosi, baik di level fakultas maupun universitas.

Dalam implementasinya, proyek ini sempat mengalami *rescoping* akibat kenaikan harga material dan *currency instability* saat krisis tahun 2008, sehingga terdapat beberapa gedung baru yang tidak jadi dibangun, yaitu di Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, *Integrated Laboratory*, dan sebagian pekerjaan infrastruktur pendukung.

Dampak Proyek Pembangunan IDB :

Dengan peningkatan infrastruktur sebagai hasil atas proyek ini, UNDIP memiliki visi untuk menjadi *research university*. Mulai tahun 2011, pasca selesainya proyek ini, UNDIP memiliki kebijakan untuk meningkatkan jumlah publikasi jurnal nasional dan internasional, melalui pemberian insentif bagi dosen yang tulisannya diterbitkan dalam jurnal (Rp 10 juta), atau bagi dosen yang mengirimkan tulisan/*submission* ke pihak LPPM. Dengan kebijakan ini, UNDIP memiliki sekitar 700 tulisan per tahun sejak tahun 2011, dan 100 tulisan per tahun dipublikasikan dalam jurnal internasional. Pada tahun 2014, berhasil menduduki ranking produktivitas publikasi (*repository rank*) nomor 6 di Indonesia (setelah ITB, UI, IPB, ITS, UGM, dan Unair).

Peningkatan kualitas pendidikan di UNDIP juga terlihat dari peningkatan akreditasi UNDIP menjadi A (tahun 2014), peringkat ke 4 sebagai PTN yang paling banyak peminat/pendaftar (2014), pelaksanaan *double degree* untuk program master (dengan Perancis, Belanda, Australia, Vietnam, Thailand, dsb), serta adanya mahasiswa asing yang berkuliah di UNDIP (Libya, Papua Nugini, Korea Selatan).

Pembangunan gedung baru oleh IDB juga telah mendorong pembangunan gedung baru lainnya dalam satu fakultas, untuk menunjang pemanfaatan gedung baru dari IDB. Beberapa gedung baru (tambahan) yang dibangun pasca proyek IDB adalah 3 gedung tambahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 4 gedung tambahan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta 2 gedung tambahan di Fakultas Kedokteran.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian bagi pemrosesan proyek IDB berikutnya adalah terkait operasionalisasi Rumah Sakit Pendidikan yang dibangun. Rumah sakit pendidikan di UNDIP selesai dibangun pada tahun 2011 sebagai bagian dari proyek pinjaman IDB. Rumah sakit tersebut baru diresmikan dan mulai beroperasi pada bulan September 2014. Hal ini dikarenakan lamanya pemenuhan izin operasionalisasi rumah sakit, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Penerbitan izin tersebut diantaranya setelah persyaratan jumlah tenaga kesehatan terpenuhi, padahal tenaga kesehatan dialokasikan dari penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan (pusat). Pihak UNDIP juga menyatakan bahwa Rumah Sakit ini terkendala belum adanya akses jalan yang dilalui kendaraan umum, hanya jalan universitas saja.



Gambar 1. Gedung FISIP dan RS Pendidikan di UNDIP (dari kiri ke kanan)

Multilateral Lain

Proyek pinjaman dari lembaga multilateral lain terdiri dari 4 proyek pinjaman dari IFAD dan 1 proyek pinjaman dari *Saudi Fund* yang merupakan proyek *co-financing* dengan *Islamic Development Bank* (IDB). Total nilai pinjaman dari lembaga multilateral lain tersebut adalah (ekuivalen) USD 198,2 juta, sebanyak USD 162,21 juta diantaranya merupakan pinjaman dari IFAD dan USD 35,99 juta merupakan pinjaman dari *Saudi Fund*. Kinerja pelaksanaan untuk proyek dari pinjaman *Saudi Fund* akan dibahas lebih rinci pada bagian pembahasan proyek-proyek IDB.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan III TA 2014 total penyerapan untuk proyek pinjaman dari lembaga multilateral lain mencapai USD 84,57 juta atau setara dengan 42,67% dari jumlah pinjaman, dengan demikian jumlah pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar USD 113,63 juta. Realisasi pada tahun ini dibandingkan dengan target penyerapan yang tercermin dalam nilai DIPA relatif masih rendah yaitu baru mencapai 32,1%.

Tabel 2.7 Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain Menurut Instansi Penanggung Jawab
Triwulan III TA 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
IFAD		4	162,21	84,57	51,98	77,64	19,51	6,26	32,10
1	Kementan	2	67,07	29,55	44,06	37,52	12,00	5,54 ²⁾	46,16
2	Kemendagri	1	63,2	52,37	82,83	10,83	1,82	0,44	24,03
3	Kemen KP	1	31,94	2,65	8,15	29,29	5,68	0,28	5,01
SAUDI FUND ³⁾		1	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00
4	Kemendikbud ⁴⁾	1	35,99	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00
Total		5	198,20	84,57	42,67	113,63	19,51	6,26	32,10

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Keterangan: 1) Terdapat perubahan target (DIPA)

2) Termasuk realisasi triwulan sebelumnya yang belum dilaporkan

3) Pembahasan untuk proyek *Saudi Fund* digabungkan dengan pembahasan pada bagian IDB karena merupakan proyek *co-financing* dengan IDB

4) Sudah ada dana masuk ke rekening proyek tetapi *Note of Disbursement* (NOD) belum diterbitkan, pencatatan sebagai *disbursement* akan dilakukan setelah NOD diterima

- **Kementerian Pertanian**

- ***Rural Empowerment and Agricultural Development/READ (645-ID)***

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif proyek READ sampai dengan triwulan ini telah mencapai 87,12%, dibandingkan dengan waktu terpakai yang sudah mencapai 95,88%. *Progress variant* untuk proyek ini adalah -8,76. Dari nilai *progress variant* tersebut kinerja pelaksanaan proyek READ tergolong cukup baik. Penyerapan tahun ini dibandingkan dengan nilai DIPA masih cukup rendah yaitu hanya sebesar 41,46%.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek READ akan berakhir pada 31 Desember 2014, strategi penyapihan atau *exit strategy* telah disusun dan pada saat ini sedang terus disempurnakan melalui pertemuan multi pihak baik dengan instansi di pusat maupun dengan *stakeholder* di Sulawesi Tengah. Rencananya replikasi di provinsi yang sama akan dilakukan pada tahun 2015 dengan sumber pembiayaan APBN dan APBD. Replikasi di Sulawesi Tengah dilaksanakan untuk penguatan di desa-desa yang telah menjadi sasaran program READ sebelumnya, dan penambahan di lokasi yang baru. Pada tahun 2016, replikasi akan dilaksanakan di dua provinsi di perbatasan yaitu Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur.

- *Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia/SOLID (835-ID)* Realisasi Penyerapan Dana

Pada proyek SOLID penyerapan kumulatif hingga triwulan ini telah mencapai 23,33% dari jumlah pinjaman, sementara itu waktu terpakai telah mencapai 40,11% sehingga nilai *progress variant* menjadi -16,78. Sampai saat ini masih ada SP2D dari Kabupaten Sumba Bagian Timur yang belum disampaikan ke PMU (Pusat) senilai Rp 2 miliar. Untuk itu, PMU (Pusat) akan meminta koordinator kabupaten tersebut untuk mempercepat pengiriman SP2D dan proses *Withdrawal Application (WA)*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pelaksanaan kegiatan SOLID pada Triwulan III semakin membaik, pengadaan untuk konsultan dan LSM sebagian besar telah selesai dilakukan dan sudah dilakukan penandatanganan kontrak. Namun, terdapat satu paket konsultan yang proses pengadaannya masih menunggu persetujuan dari IFAD yaitu layanan jasa konsultan *firm*. Layanan jasa konsultan *firm* tersebut bertugas menyediakan tenaga ahli dengan bidang dan pengalaman kerja yang sesuai untuk membantu dan memfasilitasi tim pelaksana kegiatan SOLID di pusat, provinsi, dan kabupaten.

Permasalahan yang dihadapi pada triwulan ini adalah diperlukannya perpanjangan kontrak untuk Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Konsultan Monitoring dan Evaluasi (ME). Saat ini kontrak untuk konsultan PBJ telah diperpanjang sementara itu kontrak untuk konsultan ME masih dalam tahap diskusi internal.

• Kementerian Dalam Negeri

- *National Programme for Community Empowerment in Rural Area (755-ID)* Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif untuk proyek PNPM Rural sampai dengan triwulan ini telah mencapai 82,83%. Kinerja penyerapan dana untuk proyek ini cukup baik karena *progress variant* bernilai positif yaitu 4,15.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat isu yang sama dengan proyek PNPM yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dari Lembaga Multilateral lainnya (Bank Dunia) yaitu mengenai penggabungan Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selain itu, sesuai dengan kesepakatan dengan DPR pada tahun 2013 bahwa pinjaman untuk mendukung program PNPM akan berakhir pada akhir tahun 2014, pelaksanaan kegiatan diharapkan menyusun *exit strategy* dan segera melaksanakan upaya-upaya *phasing-out*, untuk meminimalkan dampak pengakhiran program dan melanjutkan pembelajaran dan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- *Coastal Community Development Project (880-ID)*

Realisasi Penyerapan Dana

Pada Triwulan III TA 2014, data penyerapan kumulatif untuk proyek CCDP masih sama dengan triwulan sebelumnya karena LPKPHLN belum disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan, sehingga realisasi triwulan ini akan dicatatkan pada laporan triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan telah terdapat kemajuan yang signifikan dalam hal penyerapan dana pada triwulan ini, namun masih terdapat variasi kinerja penyerapan pada masing-masing wilayah proyek. Wilayah dengan kinerja penyerapan paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Barat yaitu mencapai 68,95% sementara itu di Kabupaten Pare-pare masih rendah yaitu sebesar 42,38%.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Kemajuan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing lokasi proyek CCDP sangat beragam dan telah disusun pemetaan mengenai kinerja masing-masing lokasi untuk setiap komponen kegiatan. Adapun kegiatan yang telah berhasil diselesaikan di seluruh lokasi proyek CCDP antara lain: i) sosialisasi; ii) pertemuan desa untuk perencanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan; iii) pengembangan pasar bagi produsen kecil dan kelompok masyarakat; serta iv) sinkronisasi perencanaan dan koordinasi. Sementara itu, kegiatan dengan persentase progres pelaksanaan masih rendah hampir di semua lokasi proyek antara lain: i) *review* kegiatan desa berbasis masyarakat, baru selesai dilaksanakan di 4 lokasi dari 12 lokasi proyek; ii) dokumentasi dan publikasi mengenai *sucesstory*, baru selesai dilakukan di 2 lokasi; iii) demplot teknologi produksi dan pasca panen juga baru di selesaikan di 2 lokasi, sementara progres di lokasi lainnya rata-rata masih dibawah 20%. Dengan demikian diharapkan dapat dilakukan upaya-upaya percepatan untuk lokasi-lokasi yang progres pelaksanaan kegiatannya masih rendah.

Pada proyek CCDP diberlakukan mekanisme *reward* dan *punishment* yaitu dengan memberikan tambahan dana hibah untuk lokasi dengan kinerja baik dan sebaliknya pengurangan dana hibah untuk lokasi yang kinerjanya kurang berdasarkan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Dengan mekanisme ini banyak lokasi yang semula kinerjanya kurang baik berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Pembelajaran lain dari program CCDP adalah pelaksanaan kegiatannya yang fokus pada komoditas unggulan sesuai lokasi proyek, selain itu dilengkapi juga dengan pengembangan inovasi terutama di bidang pengolahan bahan makanan.

Pada Tahun 2015 akan dilakukan *mid term review* untuk proyek ini, selanjutnya akan dilakukan ekspansi ke 6 (enam) desa baru untuk tiap-tiap kabupaten, dan kemudian dilakukan kegiatan replikasi.

KREDITOR BILATERAL

Pada Triwulan III TA 2014, terdapat 68 jumlah pinjaman proyek yang berasal dari kelompok Kreditor Bilateral yang terdiri dari 43 pinjaman proyek JICA dan 25 Bilateral lain. Total nilai pinjaman proyek dari kreditor Bilateral tersebut sebesar ekuivalen USD 6.989,86 juta dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III TA 2014 sebesar USD 2.506,44 juta atau 35,86% dari total nilai pinjaman. Sementara realisasi pada Tahun Anggaran 2014 periode Januari – September sebesar USD 364,95 juta atau 32,80% dari target Tahun 2014. Berikut rincian pinjaman proyek berasal dari kelompok Kreditor Bilateral:

Tabel 2.8 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	JICA	43	5.320,32	1.905,33	35,81	3.414,98	757,31	219,23	28,95
2	Australia	1	261,75	222,22	84,90	39,53	32,91	10,97	33,32
3	Jerman	3	79,66	30,93	38,83	48,73	24,78	0,57	2,28
4	Korea	7	357,34	58,79	16,45	298,55	37,58	4,75	12,65
5	Perancis	4	259,22	25,55	9,86	233,66	21,13	6,85	32,43
6	AFD	3	129,50	48,70	30,12	80,80	33,11	9,71	29,33
7	RR Tiongkok	5	531,89	172,05	32,35	359,84	176,21	89,67	50,89
8	Spainol	2	50,19	42,86	85,39	7,33	29,42	23,18	78,80
Total		68	6.989,86	2.506,44	35,86	4.483,44	1.112,45	364,94	32,80

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan instansi penanggung jawab, pada Triwulan III TA 2014 terdapat 15 Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemda yang menjadi instansi penanggung jawab (*Executing Agency*) atas 68 pinjaman luar negeri, dimana sebagian besar berada di 3 Kementerian/Lembaga dan 1 BUMN, yaitu di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan berada di PT. PLN, sisa proyek lainnya tersebar di 11 Kementerian/Lembaga lainnya. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan III TA 2014 menurut instansi penanggung jawab (*Executing Agency*) dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		53	4.849,12	2.132,10	43,97	2.717,03	784,76	311,31	39,67
1	Kemhub	8	1.162,48	153,25	13,18	1.009,22	216,04	23,14	10,71
2	Kemendikbud	4	281,14	98,38	34,99	182,76	64,88	9,07	13,97
3	Kemenkes	3	76,39	66,19	86,65	10,20	1,08	0,00	0,00
4	Kemen KP	1	30,00	13,95	46,50	16,05	11,68	5,39	46,15
5	Kemen PU	27	2.816,20	1.640,01	58,24	1.176,18	426,86	257,94	60,43
6	Bappenas	2	153,60	62,22	40,51	91,38	7,45	2,56	34,32
7	Kemenkominfo	2	87,53	10,80	12,34	76,72	12,56	0,00	0,00
8	Kepolisian RI	2	75,84	0,47	0,62	75,37	13,42	0,47	3,52

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
9	Badan Otorita Batam	1	50,56	0,00	0,00	50,56	1,52	0,00	0,00
10	BMKG	1	38,44	25,55	66,47	12,89	11,96	6,85	57,26
11	LIPI	1	18,65	11,72	62,86	6,93	6,06	0,08	1,26
12	BIG	1	58,29	49,55	84,99	8,75	11,24	5,83	51,86
Diteruspinjamakan (SLA)		13	1.683,22	264,59	15,72	1.418,63	158,92	44,34	27,90
13	PT. PLN	12	1.436,56	260,91	18,16	1.175,64	146,14	43,61	29,84
14	PT. Pertamina	1	246,66	3,67	1,49	242,99	12,78	0,73	5,68
Diterushibahkan		2	457,53	109,75	23,99	347,78	168,77	9,28	5,50
15	Pemda DKI	2	457,53	109,75	23,99	347,78	168,77	9,28	5,50
Total		68	6.989,86	2.506,44	35,86	4.483,44	1.112,45	364,94	32,80

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek pinjaman dari lembaga bilateral berdasarkan lembaga pemberi pinjaman. Pembahasan terdiri dari gambaran umum pinjaman, kinerja pelaksanaan permasalahan dan tindak lanjut, serta hasil kunjungan lapangan.

JICA

Selama Triwulan III TA 2014, jumlah pinjaman JICA yang efektif dan dipantau pelaksanaannya berjumlah 43 proyek dengan nilai pinjaman JPY 581.643,18 juta. Penarikan pinjaman sampai dengan akhir Triwulan III TA 2014 sebesar JPY 208.300,31 juta atau 35,81% dari total pinjaman, sehingga dana pinjaman yang belum ditarik senilai JPY 373.342,87 juta atau 64,19% dari total pinjaman.

Dari 43 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA, sebanyak 31 pinjaman proyek dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga, 2 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerushibahan (*on-granting*) dan 10 pinjaman proyek dilaksanakan oleh BUMN melalui penerusan pinjaman atau *Subsidiary Loan Agreement* (SLA).

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Pada Triwulan III TA 2014, 3 (tiga) proyek Kementerian Pekerjaan Umum yang baru efektif pada TA 2014 belum melakukan penyerapan pinjaman (0%). Ketiga proyek tersebut adalah IP-566 *Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi and Lower Solo Progo River Area II*, IP- 567 *Countermeasure for Sediment in Wonogori Multipurpose Dam Reservoir (III)*, dan IP-565 *Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Engineering Services for Sewerage System Development in Dki Jakarta*. Proyek belum dapat melakukan penarikan dan pelaksanaan pekerjaan fisik karena belum adanya kesepakatan dengan pihak JICA tentang penerapan *e-procurement*.

Terdapat 3 proyek pinjaman JICA yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan dana pinjaman proyek JICA yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Daftar Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik

(Dalam Juta JPY)

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Pinjaman Belum Ditarik s.d TA III 2014		Keterangan
					Nilai	%	
1	IP-524	<i>Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi</i>	28/07/2005	28/07/2014	6,25	0,04	Pekerjaan fisik sudah selesai. Proyek akan diperpanjang untuk menyelesaikan pembayaran.
2	IP-543	<i>Regional Infrastructure for Social & Economic Dev</i>	29/07/2007	29/07/2014	2.992,14	12,72	Tidak diperpanjang.
3	IP-536	<i>E/S Jakarta Mass Rapid Transit System</i>	22/03/2007	31/12/2014	604,98	32,37	Tidak diperpanjang.

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Jumlah penarikan pinjaman pada TA 2014 sebesar JPY 23.967,57 juta atau 28,95% dari target penyerapan TA 2014. Penarikan Triwulan III TA 2014 meningkat sebesar 14,21% dibandingkan Triwulan II TA 2014. Rendahnya persentase penyerapan pinjaman dibandingkan dengan nilai pinjaman disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- Proyek-proyek yang baru efektif dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa yaitu:
 - 4 proyek dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yaitu IP-559 *Upper Citarum Basin Flood Management*, IP-566 *Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi and Lower Solo Progo River Area II*, IP-567 *Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (III)*, dan IP-565 *Metropolitan Sanitation Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Engineering Services for Sewerage System Development in Dki Jakarta*;
 - 1 proyek dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yaitu IP-563 *Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I*;
 - 1 Proyek dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu IP-568 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV*;
 - 1 proyek dilaksanakan oleh PT. PLN yaitu IP-556 *Java-Sumatera Interconnection Transmission Line*;
- Masalah administrasi/pengesahan DIPA yang terjadi pada beberapa proyek pinjaman JICA terkait masalah kurangnya alokasi yang dianggarkan sehingga tidak sesuai dengan rencana kerja pelaksana teknis proyek. Proyek telah mengajukan revisi DIPA dan menunggu proses revisi tersebut. Belum selesainya proses pelengkapan administrasi pembayaran untuk output yang telah dihasilkan pada proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu IP-542 *ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province*;
- Proyek dalam tahap penyelesaian pengadaan barang/jasa, proses perijinan, manajemen proyek, dan masalah teknis yaitu pada proyek IP-536 *E/S Jakarta Mass Rapid Transit System*, IP-548 *Railway Double Tracking on Java South Line Project (III)*, IP-562 *Railway Double Tracking on Java South Line Project (IV)*, dan IP-561 *Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)*.

Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman proyek yang dibiayai JICA status pada Triwulan III TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Pinjaman Proyek yang Dibiayai JICA sampai dengan Triwulan III TA 2014

(Dalam Juta JPY)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman belum ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga									
1	KemenPU	19	213.658,00	132.715,70	62,12	80.942,30	25.445,57	14.834,56	58,30
2	Kemendikbud	3	28.100,18	10.648,90	37,90	17.451,28	6.644,76	928,70	13,98
3	Kemendikbud	5	105.102,00	15.042,69	14,31	90.059,31	21.413,45	2.529,80	11,81
4	Kemkominfo	1	2.911,00	1.181,24	40,58	1.729,76	374,81	0,00	0,00
5	LPNK	3	23.165,00	12.218,51	52,75	10.946,49	2.042,63	916,55	44,87
Diterushibahkan (On-Granting)									
6	Pemda DKI Jakarta	2	50.019,00	11.998,43	23,99	38.020,57	18.450,28	1.014,63	5,50
Diteruspinjamkan (SLA)									
7	BUMN	10	158.688,00	24.494,83	15,44	134.193,17	8.406,59	3.743,33	44,53
Total		43	581.643,18	208.300,31	35,81	373.342,87	82.792,74	23.967,57	28,95

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Pada Triwulan III TA 2014 terdapat 31 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan kinerja pelaksanaan sebagai berikut:

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan 19 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA. Pinjaman meliputi 11 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Sumber Daya Air; 3 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Bina Marga; dan 5 pinjaman proyek dikelola Ditjen Cipta Karya.

Realisasi Penyerapan Dana

Pada Triwulan III TA 2014, penyerapan pinjaman di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar JPY 14.834,56 juta atau 58,3% dari target 2014. Penyerapan pinjaman tersebut lebih tinggi 3 kali lipat dibandingkan triwulan sebelumnya (18,56%). Persentase penyerapan pinjaman pada Triwulan III TA 2014 lebih besar dibandingkan penyerapan Triwulan III TA 2013. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan III TA 2013 dengan Triwulan III TA 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kementerian PU)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan III/2013	109.266,45	12.178,46	51,38
Triwulan III/2014	132.715,70	14.834,56	58,30

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Proyek IP-564 Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II) melakukan penyerapan pinjaman terbesar di Kementerian Pekerjaan Umum yaitu sebesar JPY 7.000 juta untuk pembayaran 5 sub paket pekerjaan. Pada Triwulan III,

proyek telah melakukan pekerjaan yaitu *Local Management Assistance Service North Sumatera, Local Management Assistance Service South Kalimantan, Local Management Assistance Service South Sulawesi, Local Management Assistance Service West Sulawesi, dan Civil Work* (Bantuan Langsung Masyarakat di 9 Propinsi).

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-547 *Decentralized Irrigation System Improvement Project II* merupakan salah satu proyek di Kementerian Pekerjaan Umum yang mengalami kekurangan anggaran pada DIPA 2014. Pelaksana proyek membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik di lokasi Sulawesi Selatan (DI Sadang dan DI Bajo). Revisi DIPA sedang diproses di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Masalah pengadaan lahan yang menghambat secara signifikan pelaksanaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum terjadi pada proyek IP-522 *Lower Solo River Improvement Project II*, IP-547 *Decentralized Irrigation System Improvement Project II*, IP-551 *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities*, dan IP-558 *Regional Solid Waste Management for Mamminasata*. Masalah terjadi karena terdapat lahan yang belum dibebaskan yang disebabkan oleh belum tersedianya anggaran untuk pembebasan lahan, kesepakatan dengan pemerintah daerah, dan masalah sosial dengan masyarakat.

Pencapaian fisik atau output 19 (sembilan belas) pinjaman proyek pada Triwulan II 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Terdapat 3 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 28.100,18 juta. Pinjaman tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development*, IP-549 *Development of World Class University at University of Indonesia*, dan IP-553 *Development of Bandung Institute of Technology*.

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan pinjaman JICA Triwulan III TA 2014 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih sangat rendah yaitu sebesar JPY 928,7 juta atau 13,98% dari target 2014. Jumlah penyerapan pinjaman Triwulan III TA 2014 lebih rendah jika dibandingkan dengan Triwulan III TA 2013 tetapi persentasenya lebih tinggi. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan III TA 2013 dengan Triwulan III TA 2014 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014
(Kemendikbud)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan III/2013	8.505,01	1.183,06	12,25
Triwulan III/2014	10.648,90	928,70	13,98

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan terendah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terjadi pada proyek IP-549 *Development of World Class University at University of Indonesia*. Pada Triwulan III TA 2014, proyek baru melakukan penyerapan sebesar JPY 123,01 juta atau 3,63% dari target TA 2014. Rendahnya penyerapan disebabkan oleh belum tercatatnya penyerapan pinjaman yang dilakukan pelaksana proyek akibat belum dikeluarkannya dokumen SP3D oleh Kementerian Keuangan sebagai bukti pencairan pinjaman. Selain itu, pelaksana proyek menghadapi masalah dengan kontraktor yang tidak mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Masalah pengesahan DIPA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terjadi pada proyek IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development Project*. Pelaksana proyek membutuhkan tambahan anggaran untuk menyelesaikan program *short term course*. Revisi DIPA 2014 telah diajukan ke DIKTI dan BPKLN.

Masalah pengadaan barang dan jasa. Hal ini terjadi pada proyek IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development Project*. Pengadaan untuk Paket 2 belum disetujui oleh Menteri Pendidikan karena proses pengadaannya dinilai tidak sepenuhnya mengikuti Peraturan Pemerintah. Pelaksana proyek berencana akan melaksanakan *rebidding* pada Triwulan IV TA 2014.

- **Kementerian Perhubungan**

Terdapat 5 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 105.102,00 juta dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terdiri atas 1 proyek yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Laut dan 4 proyek yang dikelola oleh Ditjen Perkeretaapian. Terdapat 2 proyek baru yang dipantau pelaksanaannya di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan yaitu IP-562 *Railway Double Tracking on Java South Line Project (IV) (Kroya - Kutoarjo Phase II)* dan IP-563 *Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I*.

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar JPY 15.042,69 juta atau 14,31% dari total pinjaman. Persentase penyerapan yang dilakukan Kementerian Perhubungan pada Triwulan III TA 2014 lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan III TA 2013. Hal ini karena terdapat 3 proyek di Ditjen Perkeretaapian yang belum melakukan penyerapan karena permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan III TA 2013 dengan Triwulan III TA 2014 di Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014
(Kemenhub)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan III/2013	10.104,70	2.543,02	35,95
Triwulan III/2014	15.042,69	2.529,80	11,81

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Proyek IP-521 *The Urgent Rehab. Project of Tj. Priok Port* merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut. Proyek ini melakukan penyerapan terbesar di Kementerian Perhubungan pada Triwulan III TA 2014 yaitu sebesar JPY 2.516,6 juta atau 76,17% dari target TA 2014. Pelaksana proyek membutuhkan tambahan anggaran untuk pembayaran pekerjaan sipil TA 2014 dan rencana pengajuan perubahan harga. Pencapaian fisik atau output 5 (lima) pinjaman proyek pada TA 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Terdapat 1 (satu) pinjaman proyek dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu IP-542 *ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province*.

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek belum melakukan penyerapan pinjaman TA 2014. Pada Triwulan III TA 2014, terdapat perkembangan pada pelaksanaan paket *consulting services*. Paket tersebut telah selesai dilaksanakan (100%) dan dalam proses pembayaran. Pelaksana proyek sedang menyelesaikan paket 3 pengadaan peralatan untuk 150 sekolah. Pengadaan barang untuk paket 3 telah selesai dilaksanakan (100%) tetapi pembayaran belum bisa dilakukan karena masih terdapat perbedaan penghitungan besaran jumlah denda akibat keterlambatan.

Tabel 2.15 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Kemenkominfo)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan III/2013	1.083,22	0,00	0,00
Triwulan III/2014	1.181,24	0,00	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

- **Badan Informasi Geospasial (BIG)**

Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan 1 (satu) pinjaman proyek yaitu IP-544 *National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project*.

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan pada Triwulan III TA 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan III TA 2013. Proyek menargetkan akan menyelesaikan semua paket pada Tahun Anggaran 2014. Pada Triwulan III TA 2014, penyerapan yang dilakukan oleh proyek sebesar JPY 637,2 juta atau 51,86% dari target 2014. Pelaksana proyek sedang melakukan revisi DIPA untuk penambahan alokasi pagu TA 2014.

Tabel 2.16 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (BIG)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan III/2013	4.239,16	244,77	12,62
Triwulan III/2014	5.416,54	637,20	51,86

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Bappenas melaksanakan 2 (dua) pinjaman proyek yaitu IP-535 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – III* dan IP-568 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – IV*. Proyek IP-568 merupakan kelanjutan dari proyek IP-535.

Realisasi Penyerapan Dana

Pada Triwulan III TA 2014, penyerapan pinjaman hanya dilakukan oleh proyek IP-535 yaitu sebesar JPY 279,35 juta atau 43,04% dari target TA 2014. Pelaksana proyek sedang menyelesaikan 3 paket *domestic training* yaitu JFP Tingkat Pertama, JFP Muda, dan JFP Madya. Permasalahan yang dihadapi oleh proyek IP-535 yaitu mengenai pengumpulan *statement of expenditure*.

Tabel 2.17 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Bappenas)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan III/2013	6.368,62	421,79	45,04
Triwulan III/2014	6.801,97	279,35	34,32

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

- **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Sebanyak 2 (dua) pinjaman proyek yang bersumber dari pinjaman JICA dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu IP-536 *E/S Jakarta Mass Rapid Transit System* dan IP-554 *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project*.

Realisasi Penyerapan Dana

Hingga Triwulan III TA 2014, Pemerintah DKI Jakarta baru melakukan penyerapan pinjaman sebesar 5,5% dari target TA 2014. Penyerapan tersebut dilakukan oleh proyek IP-554 *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project*.

Tabel 2.18 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (Pemda DKI)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan III/2013	1.107,52	0,00	0,00
Triwulan III/2014	10.734,41	1.014,63	5,50

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Proyek IP-554 *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project* mengerjakan 11 paket kontrak yang terdiri dari paket kontrak Sipil Konstruksi Atas (CP 101, CP 102, dan CP 103), Sipil Konstruksi Bawah (CP 104, CP 105, CP 106, CP 107, dan CP 108), *construction management consulting services*, *operation management consulting services*, dan *tender assistant*. Pekerjaan konstruksi terkendala beberapa masalah di lapangan antara lain pembebasan dan penguasaan lahan, relokasi utilitas, dan penentuan lokasi untuk *ventilation and cooling*

tower. Keterlambatan pada pembebasan lahan dan relokasi utilitas menyebabkan keterlambatan pada proses konstruksi. Untuk mengurangi keterlambatan yang mungkin terjadi, kontraktor membuat *detail design* dan tahapan konstruksi yang disesuaikan dengan lahan yang telah dibebaskan.

- **PT. PLN**

Terdapat 9 (sembilan) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan total pinjaman sebesar JPY 131,72 miliar.

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar JPY 24.093,29 juta. Pada Triwulan III, PT. PLN telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar 3.663,93 juta atau 52,16% dari target TA 2014. Persentase penyerapan Triwulan III TA 2014 lebih besar dibandingkan penyerapan Triwulan III TA 2013.

Tabel 2.19 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (PT. PLN)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan III/2013	17.385,80	3.945,75	25,95
Triwulan III/2014	24.093,29	3.663,93	52,16

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan pinjaman terbesar pada PT. PLN dilakukan oleh IP-539 *North-West Sumatera Interconnector Transmission* yaitu sebesar JPY 1.386,74 juta atau 69,23% dari target TA 2014. Pada Triwulan III TA 2014, pelaksana proyek telah mendapatkan rekomendasi penggunaan hutan lindung dan hutan produksi dari Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, pelaksana proyek sedang menunggu proses final MoU dengan BKSDA Sumatera Barat mengenai lokasi di hutan suaka alam. Pelaksana proyek juga sedang mempersiapkan peninjauan lapangan untuk mendapatkan rekomendasi penggunaan kawasan hutan di Sumatera Utara.

Proyek IP-556 *Java-Sumatera Interconnection Transmission Line* dan IP-561 *Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)* merupakan proyek yang tidak melakukan penarikan pinjaman hingga Triwulan III TA 2014. PT PLN berencana tidak akan menyerap pinjaman untuk proyek IP-556 karena ditargetkan baru akan melakukan penandatanganan kontrak pada TA 2015. Proyek IP-561 belum melakukan penarikan pinjaman karena pelaksana proyek belum dapat memulai pekerjaan. Pekerjaan terkendala masalah dokumen AMDAL yang merupakan prasyarat perijinan dari Bupati Indramayu.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pengadaan lahan di PT. PLN sudah mengalami kemajuan dan sedang dalam proses pengurusan perijinan seperti pada proyek IP-560 *Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)* untuk *drilling test*. Proyek-proyek yang belum mengalami kemajuan sejak TA 2013 dan membutuhkan perhatian serta kerja sama dengan pemerintah daerah antara lain IP-538 *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction*, IP-532 *Construction of Asahan 3 HEPP*, dan IP-561 *Indramayu Coal Fire Power Plant*. Masalah terjadi pada proses pengadaan

lahan yang terkait dengan masalah perijinan dan negosiasi kepada warga maupun pemerintah daerah.

Pencapaian fisik atau output 9 (sembilan) pinjaman proyek pada TA 2014 yang dilaksanakan oleh PT. PLN dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

- **PT. Pertamina**

PT. Pertamina melaksanakan 1 pinjaman proyek yaitu IP-557 *Lumut Balai Geothermal Power Plant*.

Realisasi Penyerapan Dana

Pada Triwulan III, proyek sedang dalam tahapan proses negosiasi kontrak dengan vendor. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama karena perbedaan lingkup dan spesifikasi desain. Pada Triwulan III TA 2014, PT. Pertamina melakukan penarikan pinjaman sebesar JPY 79,4 juta atau 5,68% dari target TA 2014.

Tabel 2.20 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan III Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (PT. Pertamina)

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan	% terhadap Target Tahun Anggaran
Triwulan III/2013	275,87	75,86	2,81
Triwulan III/2014	401,54	79,40	5,68

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan III TA 2014 diketahui terdapat 14 proyek pinjaman JICA yang berada pada kategori at risk ($PV \leq -30$). Proyek pinjaman JICA yang masuk kategori *at risk* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Progress Variant Proyek Pinjaman JICA

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013	TA 2014		
					TW IV	TW I	TW II	TW III
1	IP-548	<i>Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III</i>	25/07/2008	25/07/2016	-64,50	-67,58	-70,69	-73,84
2	IP-508	<i>Railway Electrification and D.D. Tracking Project I</i>	13/12/2001	11/19/2016	-68,35	-70,02	-71,71	-73,39
3	IP-532	<i>Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III</i>	15/05/2007	15/05/2017	-59,04	-61,77	-64,47	-67,24
4	IP-537	<i>PLN Operation Improvement System for Support</i>	15/05/2008	26/01/2018	-49,76	-52,50	-54,47	-57,27
5	IP-542	<i>ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement</i>	29/03/2007	29/05/2015	-42,19	-45,21	-48,26	-51,34
6	IP-539	<i>North-West Sumatera Inter-Connector Transmission</i>	26/01/2009	26/01/2019	-49,88	-48,84	-51,20	-50,62
7	IP-531	<i>Tanjung Priok Acces Road Construction Proj.II</i>	01/04/2006	30/06/2013	-45,53	-47,13	-47,87	-47,65
8	IP-558	<i>Regional Solid Waste Management for Maminasata</i>	01/09/2010	01/09/2018	-36,06	-39,14	-42,03	-45,00
9	IP-529	<i>Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. I</i>	28/07/2005	28/01/2015	-36,41	-36,95	-39,41	-40,51
10	IP-553	<i>Development of Bandung Institute of Technology</i>	28/07/2009	30/09/2018	-42,05	-38,56	-41,01	-40,03
11	IP-552	<i>Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose</i>	28/07/2009	28/07/2015	-38,90	-41,39	-36,98	-36,92

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013	TA 2014		
					TW IV	TW I	TW II	TW III
12	IP-557	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	25/10/2011	25/10/2019	-26,12	-29,20	-32,17	-35,16
13	IP-551	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	28/07/2009	28/07/2017	-34,93	-34,40	-33,08	-32,98
14	IP-545	Aceh Reconstruction Project	29/03/2007	26/07/2017	-28,55	-29,49	-31,90	-32,16

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Proyek IP-552 tercatat termasuk at risk dengan PV: -41,39. Hal ini disebabkan pelaksana proyek tidak akan memanfaatkan seluruh dana pinjaman sebagai konsekuensi perubahan desain dan penggunaan material.

Australia

Pinjaman dari Pemerintah Australia yang efektif dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan III TA 2014 yaitu proyek EINRIP (*Eastern Indonesia National Road Improvement Project*) dengan nilai pinjaman sebesar AUD 300 juta (ekuivalen USD 261,75 juta). Proyek EINRIP bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan 20 paket kegiatan tersebar di 9 provinsi, Instansi pelaksana adalah Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek EINRIP dalam TA 2014 target penyerapan sebesar AUD 37,72 juta (ekuivalen USD 32,91 juta) dan realisasi penyerapan pada Triwulan III TA 2014 sebesar AUD 12,57 juta (ekuivalen USD 10,97 juta). Penyerapan kumulatif pinjaman Australia hingga bulan September tahun 2014 mencapai AUD 254,69 juta (84,9%), sehingga sisa dana pinjaman yang belum ditarik sebesar AUD 45,31 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan EINRIP hingga saat ini telah menyelesaikan 2 dari 3 target indikator kinerja output, antara lain penyiapan proyek EINRIP (identifikasi, FS, *Screening, Design, Document*) dan pengadaan rangka baja AWP 1. Progres pelaksanaan indikator kinerja output lainnya, yaitu "pelaksanaan konstruksi EINRIP" masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan dengan target pekerjaan akan diselesaikan yaitu: kegiatan ENT-01 bulan Juli 2015, ESS-05 bulan April 2015, dan ESS-06 bulan Maret 2015.

Sampai dengan Triwulan III TA 2014, proyek EINRIP memiliki PV sebesar -1,91 yang berarti realisasi penyerapan pinjaman yang bersangkutan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan sehingga perlu percepatan pelaksanaan.

Secara umum, terdapat isu yang masih belum terselesaikan sejak kegiatan pemantauan proyek EINRIP triwulan sebelumnya, diantaranya:

- Beberapa paket mengalami masalah pemindahan tiang listrik dan pipa air bersih sehingga sedang diproses dengan instansi terkait;

- Pemerintah Australia mewajibkan untuk membuat sertifikasi tanah bagi seluruh lahan yang dilalui dan terkena proyek pembangunan jalan, sebagaimana tertulis juga dalam perjanjian kerjasama Proyek EINRIP. Saat ini hampir seluruh sertifikasi lahan masih dikoordinasikan dengan Pemkab dan BPN.

Dari 20 paket kegiatan yang ditargetkan selesai sampai tahun 2014, baru 16 paket yang telah diselesaikan dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2014. Dari 4 paket tersebut, 3 paket yaitu ENT-01, ESS-05, dan ESS-06 diperkirakan tidak selesai hingga akhir Desember 2014, sehingga diperlukan perpanjangan masa laku *loan closing date* yang ketiga kali sampai dengan 30 September 2015. Saat ini sedang diproses pengusulan perpanjangan tersebut.

Jerman

Pada Triwulan III TA 2014 terdapat 3 pinjaman proyek dari Pemerintah Jerman yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya yaitu: i) *Sustainable Economic Development through Tech and Vocational Education and Training (SED-TVET)*; ii) *Track Maintenance Improvement Programme*; dan iii) *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital*. Total nilai pinjaman ketiga proyek tersebut adalah sebesar EUR 62,78 juta dengan penyerapan kumulatif hingga September 2014 sebesar EUR 24,38 juta (38,83%) sehingga masih terdapat sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 38,41 juta.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Target penarikan pinjaman Jerman pada TA 2014 sebesar EUR 19,53 juta, dan realisasi penarikan pada periode Januari-September tahun 2014 adalah sebesar EUR 0,45 juta atau 2,28% dari target penarikan pinjaman TA 2014.

Tabel 2.22 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan III TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Pelaksana	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari-Maret)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Kemendikbud Kemenperindustrian Kemenakertrans	1	19,00	24,11	0,77	0,98	18,23	23,13	0,45	0,57	13,82
Kemenhub	1	32,50	41,24	12,34	15,66	20,16	25,58	0,00	0,00	0,00
Kemenkes	1	11,28	14,31	11,27	14,30	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Total	3	62,78	79,66	24,38	30,93	38,41	48,73	0,45	0,57	2,28

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 September 2014 (1 EUR = 1,268800 USD)

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan III TA 2014 diketahui bahwa terdapat proyek yang didanai dari pinjaman Pemerintah Jerman dengan kategori *at risk*, yakni proyek SED-TVET dengan progres varian menunjukkan angka -65,77 dan proyek *Track Maintenance Improvement Programme* dengan *progress variant* menunjukkan angka -35,2 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23 Pinjaman Jerman dengan PV <-30 (Status Pada Triwulan II dan Triwulan III 2014)

Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2014	
				TW II	TW III
2007 66 071	<i>Sustainable Economic Dev't through Tech & Voc</i>	15/12/2011	15/12/2015	-61,04	-65,77
2005 66 612	<i>Track Maintenance Improvement Programme</i>	22/12/2009	30/06/2016	-31,33	-35,20

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- ***Sustainable Economic Development through Technical & Vocational Education and Training***

Penanggung jawab (*Executing Agency*) SED-TVET adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan *Implementing Agency* adalah: i) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ii) Kementerian Perindustrian; dan iii) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proyek tersebut memiliki durasi pelaksanaan selama 4 (empat) tahun yang dimulai sejak tanggal 15 Desember 2011 hingga 15 Desember 2015.

Proyek ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas institusi, peningkatan penyediaan dan kemampuan tenaga kerja, serta peningkatan kualitas lulusan SMKN. Alokasi anggaran untuk masing-masing Instansi Pelaksana adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar EUR 7 juta (33%), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar EUR 5 juta (24%), Kementerian Perindustrian sebesar EUR 5 juta (24%), untuk pekerjaan konsultan sebesar EUR 2 juta (9,5%), kemudian sisanya adalah EUR 2 juta (9,5%) yang berasal dari hibah untuk pelatihan lanjutan guru.

Realisasi Penyerapan Dana

Nilai pinjaman proyek SED-TVET adalah sebesar EUR 19 juta dan hibah sebesar EUR 2 juta dengan realisasi penyerapan pinjaman Januari – September 2014 sebesar EUR 0,45 juta atau 13,82% dari target penarikan pinjaman TA 2014 sebesar EUR 3,23 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga saat ini, realisasi fisik untuk pekerjaan pengadaan jasa konsultasi peralatan mencapai 27% dari target penarikan pinjaman TA 2014, proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan III TA 2014.

Pada proyek SED-TVET terdapat keterlambatan serius karena pada awal pelaksanaan proyek terdapat permasalahan pembahasan harmonisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa yang akan digunakan sehingga alokasi waktu yang tersedia sebagian telah terpakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk Triwulan III 2014, paket kontrak pengadaan *advance training* tahap pra-kualifikasi dinyatakan gagal karena hanya 1 (satu) perusahaan, yang memasukkan prakualifikasi sehingga perlu lelang ulang. Saat ini hasil evaluasi pra-kualifikasi telah diusulkan ke KfW untuk mendapatkan persetujuan.

- **Kementerian Perhubungan**

- *Track Maintenance Improvement Programme*

Tujuan proyek adalah meningkatkan pemeliharaan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa. Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek *Track Maintenance Improvement Programme* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan III TA 2014.

Realisasi Penyerapan Dana

Nilai pinjaman proyek *Track Maintenance Improvement Programme* adalah sebesar EUR 32,5 juta dengan penyerapan kumulatif hingga bulan September 2014 adalah sebesar EUR 12,34 juta (37,98%). Namun untuk Tahun Anggaran 2014 (periode Januari-September) penyerapan proyek ini masih 0% atau belum ada penyerapan dari target penarikan pinjaman TA 2014 sebesar EUR 15,89 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Instansi pelaksana proyek *Track Maintenance Improvement Programme* adalah Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Proyek ini telah mengalami 1 kali perpanjangan pelaksanaan dan masa laku pinjaman direncanakan akan berakhir pada 30 Juni 2016.

Closing date proyek *Track Maintenance Improvement Programme* telah diperpanjang yang semula berakhir pada 30 Juni 2014 diperpanjang menjadi 30 Juni 2016. Disamping itu ada realokasi dana sebesar EUR 700 ribu dari katagori *Contingency* ke *Consulting Services and Training*. Kementerian Keuangan telah meminta perhitungan kebutuhan anggaran proyek tersebut agar sisa dana pinjaman yang tidak akan terpakai dapat di-*cancel* untuk menghindari beban *commitment fee*. Permasalahan pada proyek ini adalah keterlambatan pekerjaan yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2013 yang masih berimbas hingga saat ini, yaitu adanya kegiatan perubahan standarisasi teknik jalan deret sehingga dibutuhkan tambahan jumlah konsultan, adanya perubahan lokasi *workshop* dari Solo ke Ngrombo, dan adanya lelang ulang untuk pekerjaan jasa konsultansi. Disamping itu terdapat kekurangan anggaran untuk pembayaran peralatan perawatan prasarana. Terkait hal tersebut DJKA Kemhub telah mengajukan usulan revisi DIPA POK penambahan dan realokasi anggaran.

- **Kementerian Kesehatan**

- *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital*

Proyek ini merupakan pengadaan peralatan kesehatan, *rezoning*, dan pelatihan bagi pegawai dan perawat rumah sakit Moh. Hoesin Palembang. Instansi pelaksana proyek *The Improvement of the M. Hoesin Hospital* adalah Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Proyek ini telah mengalami 3 kali perpanjangan pelaksanaan dan masa laku pinjaman akan berakhir pada 31 Desember 2014. Sudah diajukan usulan perpanjangan sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Penyerapan Dana

Nilai pinjaman proyek *The Improvement of the Moehamad Hoesin Hospital* adalah sebesar EUR 11,28 juta dan hibah sebesar EUR 1,5 juta dengan penyerapan kumulatif pinjaman mencapai EUR 11,27 juta atau 99,86% dan sisanya sebesar EUR 0,02 juta yang akan ditarik seluruhnya sampai proyek berakhir.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Rencana pencapaian output TA 2014 untuk proyek *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan III TA 2014.

Permasalahan pada proyek *The Improvement of Moh. Hoesin Hospital Palembang* adalah dibebankannya bea masuk oleh Ditjen Bea dan Cukai untuk pengiriman barang tambahan (*sparepart*) CT Scan. Pembebasan bea masuk untuk proyek-proyek yang didanai PHLN hanya dapat berlaku untuk barang-barang utama dan tidak dapat dilakukan pembebasan bea masuk untuk pengadaan *spare part* terkait pemeliharaan. Terkait masalah tersebut, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan dan diputuskan bea masuk barang tersebut akan dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan. Disamping itu, Kementerian Kesehatan perlu mempercepat proses pembayaran pekerjaan supervisi dan pemeliharaan semester 3 dan 4. Untuk itu pihak Rumah Sakit Moh Hoesin perlu memanggil Konsultan dalam rangka penandatanganan *Certificate of Acceptance*.

Korea

Pada Triwulan III TA 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari EDCF Korea sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan total pinjaman sebesar KRW 377.495,65 juta. Penarikan pinjaman sampai dengan akhir Triwulan III TA 2014 sebesar KRW 62.106,55 juta atau 16,45% dari jumlah yang pinjaman.

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Terdapat 2 (dua) proyek pinjaman EDCF Korea yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014 yaitu proyek INA-10 dan INA-14.

Tabel 2.24 Daftar Pinjaman Proyek Korea yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

(Dalam Juta KRW)

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik		Ket.
					Jumlah	%	Jumlah	%	
1	INA-10	<i>Strengthening of Teaching Hospital</i>	06/08/2007	31/12/2014	22.660,56	95,34	1.107,84	4,66	-
2	INA-14	<i>Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan</i>	27/05/2009	27/06/2014	32.160,55	76,92	9.651,45	23,08	Diperpanjang hingga 31 Des 2014

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Penarikan pinjaman proyek yang dibiayai oleh Pemerintah Korea pada Triwulan III TA 2014 adalah sebesar KRW 5.020,44 juta atau 12,65%. Penarikan tersebut dilakukan oleh 2 proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan 1 proyek di Kepolisian RI, sedangkan keempat proyek lainnya belum melakukan penyerapan pada TA 2014.

Tabel 2.25 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta KRW)

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Proyek	Nilai pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman belum ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	2	178.378,95	6.786,04	3,80	171.592,91	23.346,82	4.521,04	19,36
2	Kemenkes	2	65.580,40	54.821,11	83,59	10.759,29	573,79	0,00	0,00
3	POLRI	2	80.121,78	499,40	0,62	79.622,38	14.175,18	499,40	3,52
4	Badan Otorita Batam	1	53.414,52	0,00	0,00	53.414,52	1.603,19	0,00	0,00
Total		7	377.495,65	62.106,55	16,45	315.389,11	39.698,97	5.020,44	12,65

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Rendahnya tingkat penyerapan pada Triwulan III TA 2014 disebabkan oleh masalah yang terjadi pada triwulan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

- Proses revisi DIPA TA 2014 pada 2 proyek di Kementerian Kesehatan yaitu INA-10 *Strengthening of Teaching Hospital* dan INA-14 *Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan*. Kedua proyek membutuhkan revisi DIPA untuk pembayaran pekerjaan tahun 2013 dan pengadaan barang.
- Masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pada proyek INA-19 *Construction of Karian Multipurpose Dam Project*, INA-17 *Padang By-Pass Capacity Expansion Project*, dan INA-10 *Strengthening of Teaching Hospital*.
- Proses lelang kontrak pada proyek di Kepolisian RI yaitu proyek INA-18 *Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police Project* dan INA-21 *Fast Patrol Boats for Indonesian National Police Project*
- Proyek dalam tahap penyelesaian proses efektif kontrak pada proyek INA-20 *Development of Sewerage System in Batam Island*.

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan III TA 2014 terdapat 3 (tiga) proyek pinjaman EDCF Korea yang berada pada kategori *at risk* ($PV \leq -30$) bahkan memiliki $PV \leq -50$. Kedua proyek tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 26 Progress Variant Proyek Pinjaman Korea

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013	TA 2014		
					TW IV	TW I	TW II	TW III
1	INA-17	<i>Padang By Pass Capacity Expansion Project</i>	14/04/2011	14/10/2015	-59,17	-64,65	-70,18	-69,55
2	INA-19	<i>Construction of Karian Multipurpose Dam Project</i>	14/02/2012	14/02/2018	-29,96	-34,07	-37,91	-42,11
3	INA-18	<i>Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police Project</i>	14/02/2012	14/11/2015	-	-56,68	-62,16	-68,88

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Proyek pinjaman Korea yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum meliputi 1 proyek dikelola Ditjen Sumber Daya Air dan 1 proyek dikelola oleh Ditjen Bina Marga.

- ***Construction of Karian Multipurpose Dam Project (INA-19)***

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilakukan yaitu KRW 1.823,48 juta atau 1,64% dari total pinjaman. Pada TA 2014, proyek telah melakukan penarikan sebesar KRW 341,48 juta. Proyek mengerjakan 3 paket kegiatan yaitu paket konsultan supervisi, *civil work*, dan *hydromechanical*.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik paket kontrak *civil work* mengalami kendala pada proses lelang sejak Triwulan III TA 2013. Pelaksana proyek telah melakukan lelang ulang paket tersebut dan sedang dalam proses pra-kualifikasi. Keterlambatan pada paket *civil work* mempengaruhi pelaksanaan kontrak paket *hydromechanical* karena pelelangan paket *hydromechanical* akan dilaksanakan setelah pelelangan paket *civil kontrak* selesai. Pelaksana proyek perlu mempercepat proses pelelangan paket *civil work* agar dapat memulai paket *hydromechanical* dan melakukan penyerapan anggaran TA 2014.

- ***Padang By-Pass Capacity Expansion Project (EDCF INA-17)***

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilakukan yaitu KRW 4.962,56 juta atau 7,4% dari total pinjaman. Proyek telah melakukan penyerapan pada Triwulan III TA 2014 sebesar KRW 4.179,56 juta atau 89,06% dari target TA 2014.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III 2014, Pelaksana proyek telah memulai konstruksi fisik. Akan tetapi, terdapat keterlambatan dalam pelaksanaannya karena mobilisasi peralatan konstruksi yang lambat.

- **Kementerian Kesehatan**

Terdapat 2 pinjaman proyek yang bersumber dari EDCF yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dengan total nilai proyek sebesar KRW 65.580,4 juta. Hingga Triwulan III TA 2014, proyek INA-10 *Strengthening of Teaching Hospital* dan INA-14 *Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan* belum melakukan penarikan pinjaman TA 2014.

- ***Strengthening of Teaching Hospital (INA-10)***

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar KRW 22.660,56 juta atau 95,34% dari total pinjaman. Proyek mengalami kekurangan alokasi DIPA TA 2014 untuk jasa konsultansi dan pembelian alat kesehatan. Pelaksana proyek telah mengajukan revisi DIPA untuk pembayaran paket tersebut.

- *Improvement of H Hospital in Medan (INA-14)*
Realisasi Penyerapan Dana
 Penyerapan kumulatif dana yang telah dilakukan sebesar KRW 32.160,55 juta atau 76,92% dari total pinjaman. Pelaksanaan fisik proyek telah selesai 100%. Pelaksana proyek melakukan revisi DIPA TA 2014 untuk pembayaran pekerjaan tahun 2013. Masa berlaku proyek diperpanjang hingga 31 Desember 2014 untuk masa pemeliharaan.
- **POLRI/Kepolisian Negara RI**
 Terdapat 2 proyek pinjaman EDCF Korea yang dilaksanakan oleh POLRI yaitu INA-18 *Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police Project* dan INA-21 *Fast Patrol Boats for Indonesian National Police Project* dengan total pinjaman sebesar KRW 80.121,78 juta. Hingga Triwulan III TA 2014, proyek INA-18 telah melakukan penyerapan pinjaman sebesar KRW 499,4 juta.
 - *Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police Project (INA-18)*
Realisasi Penyerapan Dana
 Proyek telah melakukan penyerapan untuk pembayaran uang muka sebesar KRW 499,4 juta. Pelaksana proyek menargetkan akan melakukan pelelangan kontrak untuk pengadaan barang pada TA 2015.
 - *Fast Patrol Boats for Indonesian National Police Project (INA-21)*
Realisasi Penyerapan Dana
 Proyek INA-21 belum melakukan penyerapan pinjaman pada TA 2014. Pelaksanaan pekerjaan proyek sedang dalam proses persiapan lelang.
- **Badan Otorita Batam**
 - *Development of Sewerage System in Batam Island (INA-20)*
Realisasi Penyerapan Dana
 Proyek INA-20 *Development of Sewerage System in Batam Island* belum melakukan penarikan pinjaman hingga Triwulan III TA 2014. Pelaksana proyek masih memproses dokumen AMDAL (revisi) yang dibutuhkan sebagai prasyarat efektifnya kontrak.

Perancis dan AFD

Pada Triwulan III TA 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Perancis dan AFD yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya. Jumlah total masing- masing sumber pendanaan pinjaman proyek tersebut adalah sebesar EUR 204,3 juta dari Pemerintah Perancis, dan sebesar USD 129,5 juta dari AFD.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Target penarikan pinjaman Perancis pada Tahun Anggaran 2014 sebesar EUR 16,65 juta, dengan realisasi pinjaman Perancis pada periode Januari-September tahun 2014 sebesar EUR 5,4 juta atau 32,43%. Penyerapan sampai dengan Triwulan III TA 2014 untuk 4 (empat)

proyek pinjaman Perancis (termasuk 1 proyek *co-financing* dengan AFD) adalah sebesar EUR 20,14 juta (9,86%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 184,16 juta (90,14%).

Tabel 2.27 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan III TA 2014
Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari–September)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
BMKG	1	30,30	38,44	20,14	25,55	10,16	12,89	5,40	6,85	57,20
Kem. Perhubungan	2	126,00	159,87	0,00	0,00	126,00	159,87	0,01	0,01	0,00
Kem. Kominfo	1	48,00	60,90	0,00	0,00	48,00	60,90	0,00	0,00	0,00
Total	4	204,30	259,22	20,14	25,55	184,16	233,66	5,40	6,85	32,43

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 September 2014 (1 EUR = 1,268800 USD)

Target penarikan pinjaman AFD Tahun Anggaran 2014 sebesar USD 33,11 juta, dan realisasi pinjaman AFD pada periode Januari-September tahun 2014 sebesar USD 9,71 juta atau 29,33%. Penyerapan kumulatif 3 proyek pinjaman AFD sebesar USD 48,70 juta (37,61%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 80,8 juta (62,39%).

Tabel 2.28 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan III TA 2014
Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014	Pinjaman Belum Ditarik	Penarikan TA 2014 (Januari–September)	
		USD	USD	USD	USD	%
Kem. Kelautan & Perikanan	1	30,00	13,95	16,05	5,39	46,13
PT. PLN	2	99,50	34,75	64,75	4,32	20,15
Total	3	129,50	48,70	80,80	9,71	29,33

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Masalah yang cukup menonjol dalam pelaksanaan pinjaman proyek Perancis dan AFD selama Triwulan III TA 2014 adalah terkait masalah teknis pelaksanaan proyek dan pencantuman DIPA.

- **Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika**

- *Strengthening of BMKG Climate and Weather Services*

Proyek ini bertujuan untuk penguatan infrastruktur dan sistem informasi Meteorologi BMKG dalam rangka mengembangkan peringatan iklim dan cuaca secara ekstensif dan layanan kepada masyarakat untuk sektor ekonomi, sektor transportasi dan sektor pertanian serta sektor lainnya yang terkait.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 30,3 juta. Rencana pencapaian *output* TA 2014 proyek *Strengthening of BMKG Climate and Weather Services* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan III TA 2014. Realisasi target

pencapaian fisik tahun 2014 untuk pembelian peralatan, pembangunan sistem, dan pelatihan personil mencapai 67,52% dari keseluruhan pekerjaan proyek. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 66,46% dari total pinjaman.

Permasalahan teknis pada proyek *Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity* adalah belum dapat terbitnya SP3 karena belum berhasilnya DJPU, Kemenkeu meng-*upload* data SP4HLN kedalam aplikasi SPAN. Menindaklanjuti hal tersebut BMKG telah berkoordinasi secara optimal dengan Dit EAS, DJPU, Kemenkeu.

- **Kementerian Perhubungan**

- ***Bandung Urban Railway Transport Development***

Proyek ini bertujuan untuk peningkatan jalur kereta api dan penyusunan kembali tata letak stasiun kereta api, menambah stasiun menengah untuk peningkatan kualitas sinyal dan sistem telekomunikasi, elektrifikasi jalur rel kereta Padalarang-Cicalengka, peningkatan sistem persinyalan dan pembangunan depot dan workshop untuk pemeliharaan fasilitas.

Proyek ini dibiayai oleh 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu Pemerintah Perancis (Natixis) dan AFD dengan nilai pinjaman masing-masing adalah EUR 80 juta berasal dari Natixis dan EUR 46 juta yang berasal dari AFD. Pelaksanaan pekerjaan untuk porsi pendanaan AFD di fokuskan pada kegiatan jasa konsultasi dan konstruksi *elevated structure*, dan porsi pendanaan Natixis di fokuskan pada kegiatan konstruksi dan elektrifikasi.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III TA 2014 belum ada realisasi pencapaian output baik konsultasi maupun konstruksi. Pihak Satker sedang melakukan proses seleksi untuk jasa konsultasi dengan ruang lingkup yaitu penyusunan *detailed design, tender assistance* dan supervisi untuk konstruksi *viaduct* 4,1 km, di mana saat ini sedang dalam tahap persetujuan *short list* di Ditjen Perkeretaapian. Pelaksanaan pekerjaan yang didanai oleh AFD saat ini sudah dilaksanakan prakualifikasi lelang konsultan, telah disampaikan dokumen prakualifikasi lelang pada tanggal 28 April 2014.

Sedangkan untuk pekerjaan yang didanai oleh Natixis, saat ini pihak Satker sedang melakukan persiapan untuk proses seleksi konsultan dengan ruang lingkup yaitu manajemen *interface, technical studies, tender assistance* dan supervisi untuk pekerjaan jalur ganda, sintel, dan elektrifikasi Padalarang – Gedebage. Sedang dalam tahap finalisasi ToR.

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika**

- ***The Improvement on Television Transmitting Station***

Proyek ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan stasiun transmisi TV secara *turnkey*, mencakup: *survey*, pengadaan, *dismantle* barang lama, instalasi, testing, *commissioning*, pelatihan, bantuan teknis, dan pemeliharaan dari perangkat transmisi, fasilitas pendukung, dan infrastruktur di 60 lokasi.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan pekerjaan saat ini sudah dilaksanakan prakualifikasi lelang. Hingga Triwulan III TA 2014 belum ada realisasi pencapaian output baik konsultansi maupun konstruksi.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- ***Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)***

Proyek ini bertujuan untuk mendukung program-program kelautan dan perikanan di dalam mengembangkan stasiun penerima data yang dipergunakan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan internasional di masa depan. Nilai pinjaman untuk proyek ini adalah sebesar USD 30 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pengelolaan sumber daya kelautan oseanografi perlu didukung oleh 3 komponen penting, yaitu pengamatan berbasis ruang, pengamatan in-situ, dan biokimia laut dan permodelan fisik. Ketiga unsur tersebut diperlukan untuk memahami dinamika laut dan menggunakannya untuk meramalkan fenomena alam. Rencana pencapaian output proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan III TA 2014. Realisasi target pencapaian fisik tahun 2014 untuk pembangunan infrastruktur, sistem, dan manajemen proyek mencapai 77,7% dari keseluruhan pekerjaan proyek. Sedangkan penyerapan kumulatif anggaran mencapai 46,51% dari total pinjaman.

Pada proyek *Infrastructure Development Space Oceanography* (INDESO) terdapat kekurangan DIPA 2014, terkait hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengajukan revisi DIPA 2014 ke Kementerian Keuangan, namun hingga kini masih dalam proses revisi DIPA. Disamping itu, proyek ini telah melakukan penyerapan anggaran sebesar EUR 5,39 juta sampai dengan Triwulan III TA 2014.

- **PT. PLN**

- ***Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement***

Kegiatan *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement* sangat dibutuhkan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik yang cukup tinggi dan terbatasnya investasi perluasan jaringan distribusi dan suplai PT. PLN. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem distribusi PT. PLN melalui peningkatan efisiensi dan kualitas. Proyek ini merupakan proyek *co-financing* antara AFD dan ADB. Jumlah pinjaman luar negeri dari pendanaan yang berasal dari AFD sebesar USD 50 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III TA 2014 belum ada realisasi target pencapaian fisik untuk pengadaan peralatan, instalasi dan konsultansi. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 44,21% dari total pinjaman.

Pada proyek *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement* terdapat permasalahan terkait mekanisme penarikan pinjaman dimana pinjaman yang berasal dari AFD memiliki batas waktu yang tidak sama (lebih pendek) dari pada pinjaman

yang berasal dari ADB. Untuk mengatasi hal tersebut PT. PLN telah mengajukan *explanatory notes* yang mengusulkan: i) perpanjangan masa laku pinjaman baik yang bersumber dari ADB, maupun AFD; ii) membatalkan sebagian pinjaman USD 4,46 juta porsi AFD; dan iii) realokasi kategori pinjaman. Setelah melakukan koordinasi dan diskusi dengan institusi terkait, Bappenas telah memberikan persetujuan untuk usulan perpanjangan *Loan Agreement* AFD sampai dengan 30 Juni 2015 dan *Loan Agreement* ADB sampai dengan 30 November 2015. Disamping itu, terkait perbaikan *Financial Plan* yang diusulkan oleh AFD, PLN akan segera mengirimkan perbaikannya dalam waktu dekat. Khusus mengenai mekanisme *front loading* (penarikan porsi AFD terlebih dahulu dapat dilakukan selama dokumen pendukung tersedia seperti amandemen kontrak, *credit agreement* dan *work annual plan*) untuk proses tersebut telah dipenuhi oleh PT PLN. Saat ini PT. PLN sedang berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan III TA 2014 diketahui bahwa proyek *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* memiliki *progress variant* sebesar -53,4.

- ***Strengthening West Kalimantan Power Grid***

Proyek ini bertujuan untuk efisiensi biaya operasi bisnis dan distribusi PLN di Kalimantan Barat. Pelaksanaan proyek ini mencakup 3 (tiga) aspek pekerjaan: i) pembangunan 275 kV jaringan transmisi; ii) meningkatkan jaringan transmisi 150KV di Kalimantan Barat; dan iv) membangun model jaringan baru untuk meningkatkan akses listrik untuk rumah tangga. Proyek ini merupakan proyek *co-financing* antara AFD dan ADB. Jumlah pinjaman luar negeri sebesar USD 49,5 juta.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III TA 2014 terdapat realisasi pencapaian output untuk pelaksanaan konstruksi paket 1 sebesar 81,75% dari target pelaksanaan pekerjaan tahun 2014.

Pada proyek *Strengthening West Kalimantan Power Grid* terdapat permasalahan pembebasan lahan untuk 6 (enam) *tower* transmisi di beberapa lokasi yang termasuk dalam kawasan hutan produksi. Keterlambatan terbitnya DIPA mengakibatkan keterlambatan penerbitan *master list*, sementara material barang sudah hampir sampai di Indonesia.

RR Tiongkok

Pada Triwulan III TA 2014, terdapat 5 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah RR Tiongkok yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan jumlah total nilai pinjaman sebesar USD 531,89 juta. Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (4 proyek) dan PT. PLN (1 proyek). Penyerapan pinjaman sampai dengan akhir Triwulan III TA 2014 sebesar USD 172,05 juta atau 32,35% dari jumlah pinjaman, sehingga pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 359,84 juta atau 67,65% dari jumlah pinjaman.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III TA 2014, pinjaman yang telah diserap yaitu sebesar USD 89,67 juta atau 50,89% dari target TA 2014. Penyerapan pinjaman di Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai 72,48% dari target TA 2014. Penyerapan tertinggi dilakukan oleh proyek *Additional Loan for Jatigede Dam* sebesar 84,3% dari target penyerapan TA 2014. Penyerapan terendah dilakukan oleh proyek yang dilaksanakan oleh PT. PLN yaitu *Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project*.

Tabel 2.29 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman RR Tiongkok menurut Instansi Penanggung jawab

(Dalam Juta USD)

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman belum ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	4	399,71	166,28	41,60	233,43	115,75	83,90	72,48
2	PT. PLN	1	132,19	5,78	4,37	126,41	60,46	5,78	9,56
Total		5	531,89	172,05	32,35	359,84	176,21	89,67	50,89

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan III TA 2014 diketahui terdapat 1 proyek pinjaman RR Tiongkok yang berada pada kategori *at risk* ($PV \leq -30$) yaitu proyek 21661901 *Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project*.

Tabel 2.30 Progress Variant Proyek Pinjaman RR Tiongkok

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013	TA 2014		
					TW IV	TW I	TW II	TW III
1	21661901	<i>Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project</i>	26/03/2013	28/04/2017	-	-24,59	-28,45	-32,64

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Sebanyak 4 pinjaman proyek yang bersumber dari RR Tiongkok dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yaitu 1 proyek oleh Ditjen Sumber Daya Air dan 3 proyek Ditjen Bina Marga. Pada Triwulan III TA 2014 terdapat kemajuan fisik pada proyek-proyek di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

- **Tayan Bridge Construction (21660201)**

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 42,19 juta atau 62,71% dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan Tayan telah mencapai 83,55% dari target output TA 2014. Pekerjaan fisik terhambat oleh proses pengajuan amandemen kontrak untuk perubahan beberapa item pekerjaan. Proses Pengajuan Amandemen Kontrak sudah dibahas di tingkat Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II.

- ***Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll (21662601)***

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 51,49 juta atau 55,36% dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik mengalami keterlambatan yang disebabkan masalah pembebasan lahan dan perubahan desain akibat perubahan kondisi di lapangan. Selain itu, proyek juga mengalami kekurangan anggaran pada DIPA 2014. Anggaran yang tersedia pada DIPA 2014 yaitu sebesar Rp 100 miliar sedangkan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 246 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran hingga bulan November 2014. Pelaksana proyek sedang mengusulkan perpanjangan waktu dan penambahan nilai pinjaman.

- ***Toll Road Development of Medan-Kualanamu (21663301)***

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 23,1 juta (18,87%) dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Meskipun terdapat kemajuan dalam pelaksanaan fisik proyek, pekerjaan proyek tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal karena terdapat lahan yang belum dapat dibebaskan. Perkembangan pekerjaan fisik proyek adalah sebagai berikut:

- 5,4 km dalam proses pelaksanaan konstruksi;
- 1,3 km area baru selesai diserahkan dan akan dilakukan pembersihan (*clearing*) untuk penyiapan lapangan; dan
- 3,3 km adalah lokasi *soft soil* (*review design* baru selesai pada Maret 2014) dalam proses persiapan pelaksanaan.

- ***Additional Loan for Jatigede Dam (21595701-31)***

Realisasi Penyerapan Dana

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 49,5 juta atau 42,31% dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pada Triwulan III 2014, proyek melaksanakan 5 paket kontrak pekerjaan fisik yaitu pembangunan *maindam*, *spillway*, *power waterway*, *plunge pool*, dan *grouting*.

• **PT. PLN**

- ***Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project (21661901)***

Realisasi Penyerapan Dana

Proyek telah melakukan penyerapan pada Triwulan III TA 2014 yaitu sebesar USD 5,78 atau 4,37% dari total pinjaman.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik proyek terdiri dari 4 paket kontrak yaitu *civil works and structural works*, *mechanical works*, *electrical and I & C*, dan pekerjaan fisik lainnya. Hingga akhir Triwulan III 2014, pekerjaan fisik baru berjalan hingga 20,7% dari target total pekerjaan konstruksi. Dalam pelaksanaannya, PT. PLN mengalami hambatan yaitu permasalahan teknis di lapangan yang menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan fisik.

Spanyol

Pada Triwulan III TA 2014, hanya terdapat 2 (dua) pinjaman proyek bersumber dari Spanyol yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, yaitu proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production* dengan nilai pinjaman sebesar EUR 14,7 juta dan *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* dengan nilai pinjaman sebesar EUR 24,86 juta.

Proyek Baru dan Proyek Tutup

Terdapat 1 proyek pinjaman Spanyol yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014 yaitu proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production*. Proyek ini berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan anggaran proyek pinjaman Spanyol yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.31 Daftar Pinjaman Proyek Spanyol Yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

(Dalam Juta EUR)

Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik	
				Jumlah	%	Jumlah	%
LA.15.04.2011	<i>Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production</i>	20/10/2011	31/10/2014	9,24	62,84	5,46	37,16

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sampai dengan Triwulan III TA 2014, penyerapan kumulatif kedua proyek ini sebesar EUR 33,78 juta (85,39%), sedangkan pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar EUR 5,78 juta. Penyerapan untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Triwulan III mencapai EUR 18,27 juta (78,8% dari target yang telah ditetapkan).

Tabel 2.32 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan III TA 2014
Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan s/d Triwulan III TA 2014		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari-Maret)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Kementerian PU	1	24,86	31,54	24,54	31,14	0,32	0,41	18,21	23,10	98,95
LIPI	1	14,70	18,65	9,24	11,72	5,46	6,93	0,06	0,08	1,26
Total	1	39,56	50,19	33,78	42,86	5,78	7,33	18,27	23,18	78,80

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 September 2014 (1 EUR = 1,268800 USD)

- **LIPI**

- ***Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production***

Proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production* menyediakan peralatan laboratorium, *processing* pakan dan susu, serta penyiapan sarana fisik berupa gedung laboratorium peternakan seluas 1.500 m², *processing unit* untuk pakan ternak seluas 512 m², *unit processing* susu seluas 450 m², kandang ternak (108 m²), kandang otomatis (180 m²), prasarana lingkungan (1 paket) yang akan dibangun di Cibinong Bogor. Disamping itu, untuk peningkatan sumber daya manusia terkait pelaksanaan kegiatan ini, akan dilakukan *training* yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu: i) *operasional training program*, ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi dan operasional peralatan-peralatan, menangani peralatan-peralatan, memahami protocol, dan mampu melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat tersebut; ii) *Overseas Training Program*, akan dilaksanakan di Spanyol selama 2 minggu, total jumlah peserta 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok (*Embryo Transfer dan Embryo Manipulasi, Feed Management, Dairy Product, Beef product, dan Project Management*); dan iii) *Domestik Training Program*, yang akan dilaksanakan di Indonesia selama 8 minggu dengan jumlah peserta sebanyak 105 orang.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan III TA 2014. Realisasi pencapaian fisik pengadaan peralatan laboratorium dan instalasi mencapai 100% dari keseluruhan pekerjaan proyek dan pengembangan SDM (pelatihan) belum dapat dilaksanakan. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 62,84% dari total anggaran.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement* pada Triwulan III TA 2014 terkait masalah krisis ekonomi yang terjadi di Eropa termasuk Spanyol yang berimbas pada kontraktor Spanyol untuk proyek ini. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan padahal progres pekerjaan fisik telah mencapai 70%. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak

kontraktor berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut dan telah bekerjasama dengan mitra lokal Indonesia untuk melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut hingga selesai. Namun, terdapat permasalahan administrasi pada saat dilakukan penagihan pembayaran atas pengiriman barang yang telah dilakukan. Pihak kontraktor telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut segera mengingat batas waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas (*closing date* pada bulan Desember 2014).

Masalah tersebut telah terjadi sejak akhir tahun 2014 dan penyelesaian permasalahan tersebut hingga kini masih dilakukan antar instansi terkait, apakah proyek akan tetap dilanjutkan dengan mengusulkan perpanjangan *closing date Loan Agreement* atau dihentikan hingga akhir Desember 2014 sesuai dengan masa berakhir *Loan Agreement*. Saat ini masih dikaji keuntungan dan kerugian masing-masing alternatif tersebut.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- ***Bridge Material Supply for Bridge Replacement***

Proyek *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* bertujuan agar pembangunan jalan dan jembatan nasional memenuhi persyaratan mutu dan sesuai standar. Disamping itu, proyek ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas transportasi dasar untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan jalan dan jembatan akan dilaksanakan di beberapa propinsi di Indonesia, diantaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan III TA 2014. Realisasi pencapaian fisik untuk pengadaan barang mencapai 98,04% dari keseluruhan proyek, sedangkan untuk pekerjaan jasa *services* 99,2%.

Sedangkan permasalahan pada proyek *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* pada Triwulan III TA 2014 adalah terkait pencantuman DIPA. Terdapat kekurangan alokasi anggaran proyek ini pada DIPA 2014 dimana kebutuhan anggaran sebesar Rp 298 Miliar, namun dalam DIPA tercantum sebesar Rp 135 Miliar. Proses revisi mengenai hal tersebut sedang dilakukan. Selain itu data penyerapan belum dapat disampaikan karena belum ada Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) yang diterbitkan oleh KPPN sebagai dasar pelaporan.

PROYEK LEMBAGA PENJAMIN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING (LPKE/KSA)

Jumlah proyek Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE)/Kredit Swasta Asing (KSA) yang efektif dan sedang berjalan pada Triwulan III TA 2014 adalah sebanyak 54 proyek yang dikelola oleh 3 (tiga) instansi yaitu: Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebanyak 46 proyek, di mana 6 proyek di antaranya merupakan lintas alokasi, Kepolisian RI (Polri) 6 proyek, dan PT. PLN 2 proyek. Total nilai pinjaman LPKE/KSA bernilai USD 4,73 miliar. Adapun rekapitulasi pelaksanaan pinjaman KSA/LPKE menurut instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan II TA 2014
Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014	Target Penyerapan TA 2014
<i>Dilaksanakan oleh K/L</i>				
Kemenhan	46	4.638,96	2.723,91	1.065,13
Kepolisian RI	6	42,74	4,06	14,81
<i>Di SLA kan</i>				
PT. PLN	2	50,71	25,27	16,11
Total	54	4.732,41	2.753,24	1.096,05

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 September 2014 (1 USD = IDR 12.212,00)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman dan Pencapaian Indikator Kinerja

- **Kementerian Pertahanan**

Realisasi Penyerapan Dana

Total nilai alokasi proyek LPKE/KSA Kemenhan yang sedang berjalan saat ini mencapai USD 5,55 miliar, dengan persentase terbesar terdapat pada alokasi Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tahun 2011-2014 sebesar 79,09%. Pada triwulan ini terdapat 10 kegiatan yang selesai dilaksanakan. Ke-10 kegiatan tersebut terdiri dari 4 kegiatan yang dilaksanakan TNI AD, 4 kegiatan TNI AU, 1 kegiatan TNI AL, dan 1 kegiatan Mabes TNI. Di samping itu, terdapat 1 kegiatan TNI AD yang efektif pada triwulan ini. Total penyerapan pinjaman kumulatif sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 mencapai USD 2,72 miliar atau 58,7% dari total komitmen pinjaman. Alokasi total PHLN Kemenhan pada tahun 2014 mencapai Rp 13,01 triliun atau ekuivalen USD 1,07 miliar.

Tabel 2.34 Total Alokasi, Komitmen Pinjaman, dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA

(Dalam Juta USD)

No.	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi	Total Komitmen Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014
1	AKE 2002	11,18	9,50	0,00
2	AKE 2004	51,40	25,33	19,68
3	AKE 2005	212,20	180,03	78,56
4	APP 2006	345,00	291,89	126,57
5	APP 2008	39,00	32,84	25,48
6	APP 2009	502,25	419,31	330,49
7	PSP 2011-2014	4.392,26	3.680,06	2.143,12
Total		5.553,28	4.638,96	2.723,91

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 September 2014 (1 USD = IDR 12.212,00)

Sementara itu, dari target penyerapan pinjaman luar negeri tahun 2014 sebesar IDR 13,01 triliun, Kementerian Pertahanan berhasil menyerap pinjaman kumulatif sebesar Rp 14,18 triliun atau lebih besar 9% dari target yang direncanakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.35 Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014*(Dalam Miliar Rupiah)*

No.	Tahun Alokasi	Target TA 2014	Realisasi Penyerapan	
			Kumulatif	TW III
1	AKE 2002	13.007,34	0,00	0,00
2	AKE 2004		207,77	170,32
3	AKE 2005		110,30	36,27
4	APP 2006		463,65	98,24
5	APP 2008		154,63	36,27
6	APP 2009		532,82	304,83
7	PSP 2011-2014		12.709,57	4.242,13
Total		13.007,34	14.178,73	4.888,05

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Terdapat 2 kegiatan alokasi KE 2002 dan 1 kegiatan alokasi KE 2004 yang perlu mendapat perhatian karena hingga saat ini ketiga kegiatan tersebut belum selesai dilaksanakan. dua kegiatan dilaksanakan oleh TNI AD dan 1 kegiatan oleh TNI AL. Permasalahan yang dihadapi proyek-proyek ini berkaitan dengan adanya amandemen kontrak yang mengubah output proyek dan perubahan lender yang memakan waktu lama.

- **Kepolisian RI**

Realisasi Penyerapan Dana

Total alokasi Pinjaman Luar Negeri Polri, yang mencakup pinjaman lunak dan komersial, yang tercantum dalam DIPA TA 2014 mencapai Rp 1,7 triliun atau ekuivalen USD 139,15 juta. Selain dialokasikan untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, anggaran PLN sebesar ini juga dialokasikan untuk proyek-proyek yang direncanakan efektif pada tahun 2014 ini.

Sesuai kebijakan Kapolri, pada Triwulan III terdapat penambahan alokasi Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp 57 miliar sehingga total RMP mencapai Rp 77 miliar. Tambahan alokasi tersebut berasal dari pengalihan alokasi anggaran Belanja Modal untuk pembatalan Pengadaan Alkom Capres dan Cawapres Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 57 miliar. Pihak Polri berencana untuk menggunakan tambahan alokasi RMP tersebut untuk pembayaran uang muka proyek *Radio Trunking* Polda Jabar dan Sumbar (Program K.E. T.A. 2009).

Pada Triwulan III ini terdapat 6 (enam) proyek LPKE/KSA yang sedang berjalan dengan total alokasi KE sebesar USD 50,04 juta. Target penyerapan pada tahun 2014 untuk keenam proyek ini mencapai USD 14,81 juta. Meskipun demikian, sepanjang tahun 2014 ini, Polri belum melakukan penyerapan pinjaman sama sekali (realisasi penyerapan 0%).

Terdapat empat kegiatan yang sedang dalam proses pencairan uang muka di Kementerian Keuangan, yaitu:

- Aljihandak EOD/Mole Programmer (K.E. 2008) sebesar Rp 12,6 miliar;
- Harsucad Pesawat (K.E. 2008) sebesar Rp 7,2 miliar;
- *Radio Trunking* Polda Jabar (K.E. 2009) sebesar Rp 32,4 miliar;
- *Radio Trunking* Polda Sumbar (K.E. 2009) sebesar Rp 20,7 miliar.

Tabel 2.36 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia

(Dalam Juta USD)

No.	Alokasi Tahun	Jumlah Alokasi	Total Komitmen Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014	Penyerapan TA 2014	
					Target	Realisasi
1	POLRI TA 2004	3,60	3,06	0,12	2,89	0,00
2	POLRI TA 2005	5,95	5,06	3,94	1,10	0,00
3	POLRI TA 2008	10,99	9,35	0,00	10,81	0,00
4	POLRI TA 2009	29,5	25,27	0,00	0	0,00
Total		50,04	42,74	4,06	14,81	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Catatan : Menggunakan kurs tengah BI tanggal 30 September 2014 (1 USD = IDR 12.212,00)

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Sepanjang 2014 Polri sama sekali belum melakukan penyerapan pinjaman maupun uang muka proyek-proyek LPKE/KSA (penyerapan 0%). Salah satu penyebab permasalahan ini berkaitan dengan penerapan sistem SPAN oleh Kementerian Keuangan. Pada triwulan IV diharapkan permasalahan ini bisa tuntas sehingga alokasi uang muka dapat terserap sekitar 90%.

- **PT. PLN**

Realisasi Penyerapan Dana

Terdapat 2 (dua) proyek pinjaman komersial yang dikelola PT. PLN dengan nilai pinjaman sebesar USD 50,71 juta. Kedua proyek tersebut adalah *Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4* dan *Scattered Transmissions and Substantions Package 8*. Proyek-proyek tersebut dibiayai dengan pinjaman JBIC melalui skema SLA (*Subsidiary Loan Agreement*). Sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 penyerapan kumulatif untuk kedua proyek ini mencapai USD 25,27 juta atau 49,83% dari total pinjaman proyek. Pada tahun 2014 PT. PLN menargetkan total penyerapan untuk kedua proyek ini sebesar USD 16,11 juta.

Tabel 2.37 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN

(Dalam Juta USD)

No.	Nama Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2014	Penyerapan TA 2014	
				Target	Realisasi
1	<i>Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4</i>	31,83	25,27	13,72	6,78
2	<i>Scattered Transmissions and Substantions Package 8</i>	18,88	0,00	2,39	0,00
Total		50,71	25,27	16,11	6,78

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Kedua proyek ini menggunakan mata uang Japanese Yen. Nilai kurs yang digunakan dalam laporan ini adalah USD 1 = JPY 109,33; USD 1=IDR 12.212,00

Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Seperti status Triwulan II, kontrak proyek *Scattered Transmissions and Substantions Package 8* yang dilaksanakan PLN belum efektif hingga berakhirnya Triwulan III. Meskipun demikian, pada Triwulan III ini proses pengaktifan kontrak proyek ini mengalami kemajuan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pihak JBIC, selaku *lender*, telah menyetujui

perubahan mekanisme pencairan pinjaman dari pembukaan *Letter of Credit* (L/C) menjadi pembayaran langsung (*direct payment*). Dengan adanya persetujuan JBIC tersebut, kontrak proyek ini diharapkan dapat efektif pada Triwulan IV.

Di samping itu, pihak kontraktor telah memulai persiapan pekerjaan fisik seperti pembangunan prasarana dan pagar di lokasi proyek yang terletak di kawasan Daan Mogot. Terkait permasalahan tanah untuk pembangunan Gardu Induk di Semanggi Timur yang menjadi pengganti Semanggi Barat, PLN masih memproses ijin penggunaan lokasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat keterlambatan waktu efektif kontrak dan akan berakhirnya masa laku *Loan Agreement* pada tanggal 15 Mei 2015, pelaksanaan proyek ini diperkirakan tidak dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu, PLN diharapkan dapat segera memproses perpanjangan masa laku *Loan Agreement*.

BAB III

KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pada kinerja pelaksanaan hibah luar negeri Triwulan III Tahun Anggaran 2014 ini terdapat 143 laporan yang disampaikan oleh 19 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah sebesar USD 714 juta. Dari 143 laporan hibah yang masuk, telah diklasifikasikan menjadi 2 jenis hibah, yaitu hibah terencana dan hibah langsung, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang/jasa/surat berharga. Diantaranya terdapat 32 laporan hibah terencana, 67 laporan hibah langsung dalam bentuk uang, dan 44 laporan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah laporan hibah yang masuk berdasarkan instansi penanggung jawab menurut jenisnya.

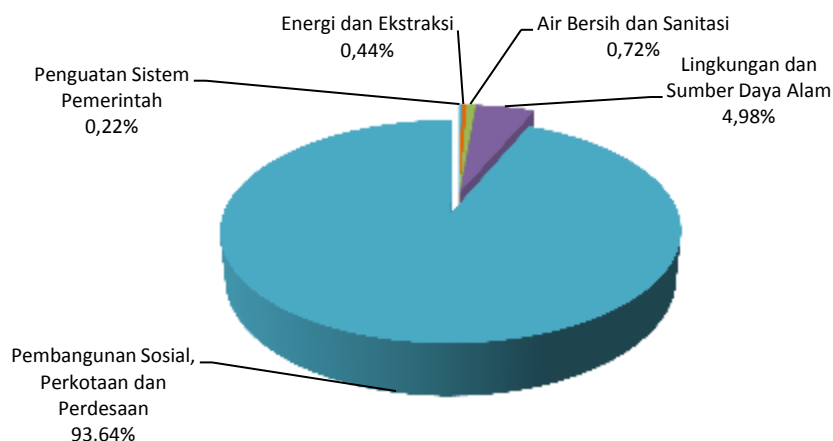
Tabel 3.1 Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Hibah Terencana			Hibah Langsung dalam Bentuk Uang			Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga		
	Jml	Nilai	Realisasi Penyerapan	Jml	Nilai	Realisasi Penyerapan	Jml	Nilai	Realisasi Penyerapan
Kemen PU	6	239,57	13,97	-	-	-	-	-	-
Kemendagri	2	14,28	-	-	-	-	-	-	-
Kemen LH	2	1,47	0,38	4	17,37	0,68	9	24,00	-
Kemen ESDM	1	11,69	-	1	1,66	-	5	16,20	-
Kemenkominfo	1	1,87	0,01	-	-	-	-	-	-
Kementan	4	6,26	0,76	50	6,46	-	19	110,85	-
Kemen PDT	-	-	-	1	1,88	0,18	-	-	-
Kemenhub	2	44,79	0,20	-	-	-	-	-	-
Kemen Perindustrian	4	1,57	0,02	-	-	-	-	-	-
Kemenkumham	-	-	-	2	0,18	0,00	-	-	-
Kemensetneg-UKP4	-	-	-	-	-	-	2	107,72	-
Kemensos RI	-	-	-	2	0,40	0,09	-	-	-
Bappenas	5	17,51	0,99	3	49,87	33,82	-	-	-
DNPI	-	-	-	-	-	-	4	6,94	-
LIPI	1	0,06	-	4	0,91	0,6	1	0,01	-
BKKBN	1	0,44	0,22	-	-	-	-	-	-
Lemhanas	-	-	-	-	-	-	1	1,90	-
BPK RI	3	5,59	-	-	-	-	-	-	-
KPK	-	-	-	-	-	-	3	22,57	-
Total	32	345,09	16,56	67	78,73	35,38	44	290,19	-
Total Jumlah Proyek	143								
Total Nilai Proyek	714,00								
Total Realisasi Penyerapan	51,94								

HIBAH BANK DUNIA

Hibah luar negeri adalah salah satu skema pendanaan yang dilaksanakan dalam kerjasama antara Bank Dunia dan Indonesia. Pada saat ini, jumlah kegiatan *on-going* yang didanai hibah Bank Dunia hingga Oktober 2014 berjumlah 21 proyek dengan total dana hibah sebesar USD 319 juta.



Gambar 3.1 Hibah Bank Dunia Menurut Sektor, Triwulan III TA 2014

Dari 21 kegiatan tersebut, 13 kegiatan berfokus pada sektor pembangunan sosial, perkotaan dan pedesaan; tiga kegiatan pada sektor lingkungan dan sumberdaya alam; dua kegiatan pada sektor energi dan ekstraksi; dua kegiatan pada penguatan sistem pemerintahan; dan satu kegiatan pada sektor air bersih dan sanitasi. Berikut daftar rincian proyek *on-going* hibah Bank Dunia per-Oktober 2014:

Tabel 3.2 Daftar Hibah Bank Dunia yang sedang Berjalan Triwulan III, Tahun 2014

(Dalam Juta USD)

No.	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Penutupan	Jumlah Hibah
Social, Rural and Urban				
1	<i>National Violence Monitoring System (NVMS)</i>	16/01/2012	31/05/2015	1,50
2	<i>National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2014</i>	31/03/2012	31/12/2014	23,50
3	<i>National Program For Community Empowerment in Rural Areas Healthy And Bright Generation (PNPM Generasi)</i>	25/06/2013	31/12/2017	113,30
4	<i>Additional Financing for The Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project in C. Java and Yogyakarta</i>	01/10/2013	30/11/2014	1,50
5	<i>GPOBA W3 - Extending Telecommunication in Rural Indonesia</i>	19/06/2009	31/12/2014	1,90
6	<i>PAMSIMAS-Support for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (Recipient Executed)</i>	10/09/2009	30/09/2017	62,70
7	<i>Indonesia Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA)</i>	06/10/2010	31/03/2015	0,50
8	<i>ID-TF PNPM Generasi (COMMUNITY CCT) Scale-Up</i>	16/08/2010	31/12/2014	73,30
9	<i>Disaster Risk Management Program for the Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project</i>	15/04/2013	31/12/2014	2,40
10	<i>PNPM Rural III – Disaster Recovery Support</i>	09/12/2010	30/11/2014	13,90
11	<i>Integrated Management Information System (MIS) for PNPM Mandiri – SIMPADU (Phase 2) Project</i>	13/05/2011	30/11/2014	1,60
12	<i>PNPM Village Training Program Project</i>	25/03/2014	31/12/2015	1,30

No.	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Penutupan	Jumlah Hibah
13	<i>Urban Transport Corridor Development in Surabaya - RETF</i>	16/06/2014	30/06/2015	1,30
	Energy and Extractive			
14	<i>Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia-Phase 2</i>	23/09/2013	31/12/2015	1,10
15	<i>Indonesia Clean Stove Initiative – Piloting Biomass Cookstove Markets – MEMR Component</i>	22/05/2014	31/12/2015	0,3
	Water			
16	<i>WASPOLA Facility RE</i>	23/08/2010	31/12/2014	2,30
	Government			
17	<i>Preparing Bappenas for the Future: Strategic Management and Institutional Strengthening Project</i>	12/09/2011	12/09/2014	0,40
18	<i>Supporting Effective Implementation of BPK Strategic Plan 2011-2015</i>	27/08/2012	14/08/2015	0,30
	Environment and Natural Resource			
19	<i>Indonesia – FCPF Readiness Preparation Grant</i>	10/06/2011	31/12/2014	3,20
20	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project</i>	05/06/2014	30/06/2019	10,00
21	<i>Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) Phase-out in the Polyurethane Foam Sector Project</i>	11/07/2013	30/06/2016	2,70
Total				318,70

Dari seluruh kegiatan hibah Bank Dunia yang sedang berjalan (*on-going*), pada triwulan III TA 2014, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap empat kegiatan hibah Bank Dunia yang akan selesai tahun 2014 sebagai berikut: i) *Global Partnership Output Based Aid (GPOBA) – Extending Telecommunications in Rural Indonesia Project*; ii) *Support to the Implementation of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*; iii) *Additional Financing for the Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project in Central Java and Yogyakarta (REKOMPAK)*; dan iv) *Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Facility Project (WASPOLA)*.

- Kementerian Telekomunikasi dan Informatika

- *Global Partnership Output Based Aid (GPOBA) – Extending Telecommunications in Rural Indonesia Project*

Hibah telah efektif sejak tanggal 19 Juni 2009 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2014. Dana hibah sebesar USD 1,87 juta dimanfaatkan untuk mendorong akses internet di daerah terpencil, melalui mekanisme kemitraan antara pemerintah dan swasta. Sasaran hibah adalah membangun pilot warung internet desa (Wardes) di 220 Desa tertinggal di 3 Provinsi: Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Berbeda dari kegiatan penyediaan akses internet lainnya di Kemenkominfo, kegiatan hibah ini menyasar komunitas masyarakat umum dan tidak hanya siswa sekolah. Dengan pembangunan wardes, masyarakat dapat mengenal internet, dan menumbuhkan persaingan usaha.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Hingga saat ini penyerapan dana hibah baru mencapai 73,7% dikarenakan mekanisme kegiatan hibah berbasis output (*output based aid*) yang menggunakan *capital investment* dari swasta. Kontraktor sebagai penyedia peralatan, berinvestasi terlebih dahulu dan setelah pemasangan mencapai 50% baru dilakukan pembayaran jasa akses sebesar 25%. Setelah instalasi diselesaikan dilakukan pembayaran sebesar 50%, kemudian sisa dana akan dibayarkan ketika

kontraktor telah menyelesaikan masa pemeliharaan selama 2 tahun. Untuk ketiga wilayah, kontraktor telah menyelesaikan instalasi sebesar 100% dan sedang mengajukan pembayaran untuk pemeliharaan tahun kedua. Di akhir proyek diperkirakan akan terdapat sisa dana hibah yang tidak termanfaatkan.

Pembelajaran proyek diharapkan dapat direkam dengan baik, dan jika ada upaya replikasi diharapkan sesuai dengan permintaan, selektif dalam pemilihan lokasi dan terkoneksi dengan program-program lain. Belajar dari pengalaman proyek lain, telah dilakukan pengembangan sistem informasi untuk membantu masyarakat, namun akses internet tidak tersedia di lokasi tersebut.

Saat ini sedang dilakukan evaluasi program, sementara untuk keberlanjutan akan dilakukan diskusi dengan direktorat teknis. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo sebagai pelaksana hibah akan menyampaikan rencana kelanjutan program. Terkait integrasi dengan kebutuhan informasi, Kemenkominfo memiliki program *media center* untuk menghubungkan akses internet dengan konten, misalnya melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang membangun domain potensi daerah.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan, adalah adanya persaingan dengan wardes milik swasta yang menawarkan teknologi dan sarana yang lebih baik. Di beberapa lokasi terdapat permasalahan di luar proyek, yaitu koneksi internet, konflik, dan akses yang sulit dan rusak. Kendala lain adalah terkait resiko program, dimana pemeliharaan dan pengembangan wardes merupakan tanggung jawab swasta. Kemenkominfo hanya membayar jasa akses dan menyediakan layanan aksesnya, sementara peralatan milik kontraktor. Model mekanisme kontrak kegiatan seperti ini jarang peminatnya, dikarenakan swasta diharapkan menyediakan investasi terlebih dahulu.

- *Support to the Implementation of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*

Kegiatan hibah dilatarbelakangi status Indonesia yang menjadi *candidate country* EITI Internasional. Hibah ini bertujuan untuk mendukung upaya transparansi sektor industri ekstraktif di Indonesia, melalui rekonsiliasi data keuangan yang dibayarkan oleh industri ekstraktif dengan yang diterima oleh pemerintah. Kegiatan hibah diantaranya adalah pengadaan konsultan rekonsiliator, pengadaan *international validator* dan dukungan untuk Sekretariat EITI. Hibah EITI saat ini merupakan fase kedua. Untuk EITI 1 telah tutup pada 30 Juni 2014, sementara hibah kedua akan berakhir di tahun 2015. Pendanaan untuk kedua hibah masing-masing sebesar USD 1,05 juta.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2014, dialokasikan dana dalam DIPA sebesar 92,5 miliar rupiah untuk TA EITI tahap 1 dan 2. Untuk 2015, akan dialokasikan dana sebesar 5,8 miliar rupiah. Untuk tahun mendatang diperlukan antisipasi perubahan struktur organisasi terkait sektor migas dan tambang yang akan dipindahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sesuai dengan pergantian kabinet pemerintahan baru.

Pada Bulan Oktober 2015, Indonesia telah menjadi *compliance country* EITI. Untuk menjaga status tersebut, pada 6 – 7 bulan berikutnya, pemerintah harus mengeluarkan laporan

rekonsiliasi untuk tahun 2012 – 2013 sebelum bulan Juni 2015. Sebelumnya, laporan rekonsiliasi untuk data tahun 2011 – 2012 telah dipublikasikan pada bulan Mei 2012.

Setelah penyusunan laporan rekonsiliasi dan publikasi, prioritas kegiatan EITI berikutnya adalah diseminasi dari hasil rekonsiliasi tersebut. Kedepannya, upaya transparansi sektor ekstraktif akan mencakup konteks yang lebih luas, termasuk produksi, lisensi kontrak, dan sebagainya, sehingga dapat dilihat data sektor ekstraktif dari awal produksi sampai akhir. Pada awalnya terdapat kendala untuk data sektor pertambangan, namun telah diatasi melalui kerjasama dengan Badan Litbang KPK.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Karakter proyek EITI berbeda dengan hibah lainnya, dimana pada proyek hibah lain biasanya dilakukan pembuatan model untuk kemudian dikembangkan dengan rupiah murni sedangkan hibah EITI bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam rekonsiliasi data, penyusunan, dan diseminasi EITI. Diharapkan ke depannya pemerintah dapat melakukan rekonsiliasi pelaporan sendiri tanpa bantuan dari hibah Bank Dunia.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- *Additional Financing for the Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project in Central Java and Yogyakarta (REKOMPAK)*

Tambahan pendanaan REKOMPAK telah efektif dari tanggal 1 Oktober 2013 dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2014. Kegiatan ini merupakan kelanjutan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Merapi. Pendanaan difokuskan ke pengembangan *livelihood* untuk fasilitasi keberlanjutan setelah program utama hibah telah mencapai penyediaan permukiman layak huni. Paket kegiatan yang dikonsepsikan untuk pengembangan *livelihood* adalah penguatan kapasitas, penyediaan infrastruktur, termasuk pengembangan pemasarannya.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Hingga akhir Oktober 2014, realisasi dana hibah telah mencapai 81,72% dan kegiatan telah memasuki masa akhir yang merupakan masa yang paling kritis, dimana untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan keterlibatan lintas sektor pemerintah pusat dan daerah. Skema REKOMPAK dinilai sebagai model yang baik, sehingga selain keberlanjutan program di Merapi, diperlukan juga pemikiran untuk memperluas pemanfaatan skema REKOMPAK di lokasi pascabencana lainnya. Pihak Pemerintah maupun mitra pembangunan sepakat bahwa keberlanjutan REKOMPAK sebagai skema rehab/rekon permukiman untuk lokasi-lokasi pasca bencana lain perlu dilakukan, untuk itu terdapat kebutuhan untuk fasilitasi transisi pendekatan rekompak di wilayah pasca bencana lainnya tersebut.

Pembelajaran REKOMPAK diantaranya adalah pelaksanaan *joint programme* dengan UN di lapangan sehingga dapat memperkuat program, tidak hanya memindahkan permukiman penduduk tetapi juga penghidupannya ke lokasi yang lebih aman.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Diperkirakan terdapat potensi sisa dana hibah yang tidak termanfaatkan di akhir masa laku kegiatan sebesar USD 0,14 juta yang disebabkan pembatalan pelaksanaan pembangunan rumah karena warga yang belum bersedia pindah ke lokasi yang baru, estimasi waktu

pelaksanaan tidak mencukupi, revisi DIPA, dan perbedaan nilai tukar rupiah. Untuk perkiraan sisa dana hibah, diperlukan informasi dari pelaksana mengenai penyebab, justifikasi, dan rencana pemanfaatan sisa dana.

Kementerian PU telah melakukan pembahasan dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk studi dan menjadikan REKOMPAK sebagai laboratorium hidup dalam rangka pemanfaatan sisa dana tersebut. Opsi lain untuk pemanfaatan sisa dana tersebut adalah terkait dengan perluasan manfaat REKOMPAK ke wilayah pasca bencana lainnya salah satunya adalah wilayah pasca Erupsi Gunung Sinabung. Skema REKOMPAK dinilai memungkinkan untuk dilaksanakan di Sinabung dengan beberapa modifikasi.

Selain itu, terdapat wacana dukungan dari *Indonesia Disaster Fund* (IDF) untuk pelaksanaan rehab/rekon pasca bencana erupsi Gunung Sinabung yang diusulkan untuk dapat menggunakan skema REKOMPAK jika memungkinkan. Diperlukan informasi dari pelaksana mengenai opsi kerjasama yang dilakukan untuk penanganan pemulihan pasca bencana di Sinabung, khususnya mengenai pemanfaatan skema REKOMPAK.

- ***Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Facility Project (WASPOLA).***

Hibah WASPOLA dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pengembangan air minum di Indonesia dan di akhir tahun pelaksanaannya akan difokuskan untuk keberlanjutan kegiatan melalui pengembangan *National Water Supply and Sanitation Information System* (NAWASIS). Waspolo dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu *Recipient Executed* (RE) dan *Bank Executed* (BE). Jumlah total hibah yang menggunakan mekanisme RE adalah sebesar USD 2,3 juta dan akan berakhir pada tahun 2014.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan WASPOLA didesain untuk menggunakan mekanisme *Recipient Executed* (RE) dan *Bank Executed* (BE) dalam waktu yang bersamaan. Dikarenakan kegiatan hibah melalui mekanisme RE mengalami keterlambatan, status dana BE saat ini telah habis, sementara dana RE terdapat potensi sisa dana yang tidak terserap sebesar USD 0,17 juta. Dana tersebut pada pertengahan tahun telah diusulkan untuk dikembalikan ke *parent trust fund* untuk kemudian dilaksanakan oleh BE, mempertimbangkan fleksibilitas pelaksanaan yang dapat dilakukan BE untukantisipasi kebutuhan yang dinamis di daerah. Selain itu terdapat juga sisa dana di Bappenas yang tidak dapat terserap, sehingga total sisa dana adalah sebesar USD 200.000 – 300.000.

Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan lokakarya untuk *sharing* pembelajaran WASPOLA. Untuk pembelajaran pemanfaatan mekanisme BE dan RE, ke depannya sebaiknya tidak dijalankan, karena kegiatan yang dilakukan sama, hanya menggunakan mekanisme yang berbeda.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Terdapat permasalahan terkait penyampaian usulan pemindahan sisa dana RE ke BE yang disampaikan oleh pemerintah tidak dapat diproses oleh Bank Dunia karena dibutuhkan justifikasi mengenai keterbatasan pemerintah dalam mengelola hibah sehingga harus dipindahkan menggunakan mekanisme BE. Selain itu, juga terdapat perubahan kebijakan

internal Bank Dunia untuk membatasi pemanfaatan mekanisme BE. Akibatnya, dana hibah tersebut kembali ke Pemerintah Australia dan tidak dapat dimanfaatkan untuk Waspola. Dikarenakan Bank Dunia baru merespon surat pemerintah pada bulan Oktober 2014, pemerintah hanya memiliki sedikit waktu untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Terdapat beberapa opsi agar sisa dana tersebut dapat dimanfaatkan, diantaranya adalah lobi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk Waspola atau opsi lainnya adalah komunikasi ulang dengan Bank Dunia, dan mengulang surat formal dari pemerintah jika dibutuhkan.

HIBAH LEMBAGA PBB

United Nations Development Programme (UNDP)

- **Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)**

- *Wind Hybrid Power Generation (WHyPGen) Marketing Development Initiatives*

Kegiatan WhyPgen merupakan kerjasama antara UNDP dan Balai Besar Teknologi Energi (B2TE)-BPPT dengan pendanaan dari GEF (*Gobal Environmental Facility*) untuk mendorong program pemanfaatan energi terbarukan, khususnya sistem hybrid berbasis energi angin yang dihubungkan dengan sumber energi lainnya, dengan melakukan berbagai inisiasi untuk menghilangkan kendala-kendala yang dihadapi. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi komersialisasi sistem *on-grid* WhyPGen untuk suplai energi yang ramah lingkungan sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (CO₂) pada sektor energi.

Target utama dari proyek ini adalah: i) WhyPGen terpasang dengan kapasitas sebesar 9,4 MW; ii) Total kapasitas listrik yang dibangkitkan oleh WhyPgen sebesar 18,115 GWh pertahun; dan iii) Penurunan emisi gas CO₂ sebesar 16.050 mt pertahun. Target awal sebesar 9,4 MW tersebut pada awalnya akan digunakan untuk mendukung program di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, namun instansi tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan programnya sehingga kegiatan WhyPGen dipindahkan untuk target lain yang lebih besar yaitu dengan kapasitas 50 MW.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2014 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan kegiatan WhyPGen, realisasi dana sampai dengan Triwulan III telah mencapai Rp 8,04 miliar dari total dana yang sudah ditransfer sebesar Rp 9,27 miliar. Realisasi dana yang sudah disahkan sebagai pendapatan dari hibah hingga saat ini baru mencapai Rp 5,28 miliar yang merupakan realisasi sampai dengan tahun 2013, sedangkan realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp 52,76 miliar masih dalam proses pengajuan pengesahan. Penanggung jawab kegiatan diharapkan dapat mempercepat proses pengesahan terhadap realisasi tersebut mengingat tahun anggaran 2014 akan segera berakhir.

Dalam hal pelaksanaan, kegiatan WhyPGen telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini sebanyak 9 unit turbin dan 2 unit PV dengan kapasitas 30 KW dan 32 KW telah terpasang di Nusa Penida (Provinsi Bali) sebagai salah satu pilot. Kemajuan ditunjukkan pada masing-masing komponen kegiatan. Terdapat 6 komponen yang harus dilaksanakan dalam kegiatan ini yaitu: i) *WhyPGen technology application assessment*; ii) *WhyPGen technology*

demonstration; iii) Financing of WhyPGen initiative; iv) Policy and institutional Support for WhyPGen Initiative; v) WhyPGen promotion; dan vi) WhyPGen market development and Industry support.

Pada komponen 1, telah dilakukan *assessment* di berbagai lokasi di Indonesia untuk memetakan potensi angin yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi. Dari *assessment* tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat 18 lokasi yang potensial dengan total perkiraan kapasitas tenaga listrik yang dapat dihasilkan sebesar 960 MWt.

Pada komponen 2, telah dilaksanakan pilot untuk implementasi WhyPGen di Nusa Penida (Provinsi Bali), selanjutnya direncanakan akan dilakukan pilot di 7 lokasi lainnya dengan total kapasitas produksi listrik sebesar (452,5 MW), yaitu Samas (Bantul, Provinsi DIY), Sukabumi dan Garut (Provinsi Jawa Barat), Lebak (Provinsi Banten), Oelbubuk (Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT), serta Janeponto dan Sidrap (Provinsi Sulawesi Selatan). Jika dibandingkan dengan hasil *assessment* masih tersisa 10 lokasi potensial yang belum termanfaatkan.

Capaian pada komponen 3, telah dilaksanakan pelatihan penulisan proposal bisnis pembangkit listrik tenaga angin untuk 10 (sepuluh) *developer* dan perusahaan lokal yang potensial, kegiatan ini bekerjasama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sementara itu, terkait dengan skema pembiayaan untuk proyek-proyek *wind hybrid*, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. SMI untuk inisiasi program pembiayaan pada proyek-proyek energi angin di Indonesia. WhyPGen telah mengalokasikan dana sebesar USD 300 ribu sebagai hibah untuk mendukung persiapan proyek-proyek yang penjaminannya akan dilakukan oleh PT. SMI, namun sampai saat ini belum ada implementasi.

Pada komponen 4, berbagai dukungan peraturan sedang dirancang terutama terkait dengan tarif dan standar nasional terkait pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, sebanyak 14 perusahaan lokal juga sudah menyatakan ketertarikan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya pada komponen 5 terkait promosi WhyPGen telah dilakukan melalui media cetak, *website*, *workshop*, *event* dan pelatihan di sekolah vokasi (politeknik) serta pelatihan untuk guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Saat ini sedang diupayakan agar materi mengenai WhyPGen dapat masuk dalam kurikulum SMK dan politeknik.

Pada komponen terakhir (komponen 6), pembangunan *clearing haouse* akan di bantu oleh program dukungan lingkungan (*Environmental Support Programme/ESP3*), sementara itu terkait survei dan evaluasi kebutuhan listrik yang dapat didukung oleh tenaga angin saat ini sedang diajukan permohonan untuk diskusi dengan PT. PLN.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan utama yang dihadapi oleh kegiatan WhyPGen adalah banyaknya mitra kerjasama yang berada di luar kendali kegiatan WhyPGen menyebabkan beberapa jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana menjadi terhambat, untuk itu penanggungjawab kegiatan akan melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah kerjasama akan dilanjutkan atau dihentikan dengan mitra yang tidak dapat menepati kesepakatan.

- **Kementerian PPN/Bappenas**

- *Support to the Acceleration of the MDG Achievement in Indonesia 2012-2015*

Hibah *Support to the Acceleration of the MDG Achievement in Indonesia 2012-2015* merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan UNDP dalam rangka mendorong percepatan

pencapaian target-target MDGs di Indonesia. Kegiatan ini telah diinisiasi sejak tahun 2011 dengan meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan program dan strategi pembangunan yang berbasis MDGs. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 47/2011 telah disusun Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs Indonesia dan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs. Selain itu, tim percepatan pencapaian MDGs juga sudah dibentuk di seluruh provinsi.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Sampai dengan akhir tahun 2013 realisasi kumulatif untuk hibah ini telah mencapai lebih dari USD 600 ribu. Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp 4,6 miliar, realisasi yang sudah disahkan hingga Triwulan III sebesar Rp 2,6 miliar dan realisasi pada akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai 95% dari target.

Terdapat 2 output yang ingin dicapai kegiatan ini yaitu: i) terbangunnya strategi dan mekanisme (teknis, institusional dan finansial) untuk mengimplementasikan peta jalan MDGs pada level nasional maupun regional; dan ii) peningkatan kapasitas nasional dan regional untuk memantau, mengevaluasi, menganalisis dan menyusun laporan pembangunan manusia dan MDGs. Berdasarkan hasil *project board meeting* tanggal 23 Juli 2014 dan diskusi-diskusi lanjutannya, PMU MDGs akan melaksanakan 3 aktivitas baru yaitu: i) mendukung *Country Coordinating Mechanism Indonesia for The Global Fund AIDs, TB, and Malaria* (CCM GF ATM); ii) pelembagaan kesehatan; dan iii) pelembagaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan baru tersebut telah dilakukan perubahan AWP tahun 2014.

Untuk mencapai output 1 telah dilaksanakan berbagai kegiatan, pada tingkat regional peta jalan MDGs telah terbangun dengan baik, sedangkan pada tingkat nasional sekretariat MDGs telah memegang peranan penting dalam memberikan dukungan, pendampingan, fasilitasi dan advokasi pada kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah bekerjasama dengan Pusat Kajian Strategis Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, akan dilakukan penguatan website, e-monev dan database MDGs.

Pada triwulan ini sekretariat MDGs telah berkontribusi dalam melakukan analisis dan kompilasi data capaian MDGs dari seluruh provinsi. Sebanyak 8 provinsi (Riau, Bali, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta dan Sulawesi Barat) juga telah menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs. Analisis terhadap laporan yang disampaikan tersebut memberikan masukan pada penguatan sistem monev MDGs sebagai salah satu alat yang sangat efektif untuk mempercepat pencapaian target MDGs.

Selanjutnya, sampai dengan akhir Triwulan III TA 2014, sebanyak 22 Kabupaten/Kota telah memasukkan rencana aksi MDGs dalam peraturan daerah, saat ini tim sekretariat MDGs terus mengupayakan agar hal tersebut juga dilakukan di Kabupaten/Kota lainnya agar kegiatan percepatan pencapaian target MDGs lebih melembaga dan memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, beberapa inisiasi untuk replikasi juga telah dilakukan, misalnya keberhasilan penurunan angka kematian ibu di salah satu lokasi di provinsi Jawa Tengah telah mendorong pemerintah provinsi tersebut untuk mereplikasi kegiatan di 12

Kabupaten/Kota lainnya. Selain itu, PMU MDGs juga sudah melakukan inisiasi untuk mereplikasi program penurunan angka kematian ibu di Banten (Jawa Barat) dan di Jawa Timur.

Untuk mencapai output 2, sekretariat MDGs telah memberikan pendampingan dan terus memantau progres penyusunan laporan pencapaian MDGs tahun 2013 di tingkat provinsi, sampai dengan triwulan ini sebanyak 25 provinsi telah menyampaikan laporan sedangkan 8 provinsi lainnya masih dalam tahap *review*. Selain itu, telah disusun juga draft kertas kerja untuk agenda pembangunan pasca 2015 yang akan segera didiskusikan dalam dialog kebijakan.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada triwulan ini terkait dengan rendahnya pelaporan hasil monitoring RAD MDGs oleh daerah antara lain: i) minimnya insentif dari pemerintah pusat kepada Bappeda; ii) banyaknya laporan yang harus disampaikan oleh daerah; iii) tingkat mutasi pejabat yang tinggi di daerah tanpa adanya mekanisme yang pasti untuk transfer pengetahuan dan data; serta iv) terbatasnya sumberdaya di daerah dengan jadwal untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terlalu padat. Diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

- *Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation (SIP-DC)*

Kegiatan hibah SIP-DC bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengubah paradigma kerjasama pembangunan internasional dari hubungan "*donor-recipient*" menjadi "*partnership*" untuk efektivitas pembangunan dengan pilot "*innovative partnership*" termasuk *South-South Cooperation (SSTC)* sejalan dengan *grand design SSTC 2011-2025* dan *blue print 2011-2014*. Kegiatan ini diharapkan juga dapat memperkuat kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNDP dalam manajemen kegiatan/program.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp 1,2 miliar kemudian direvisi menjadi Rp 2,3 miliar. Penyerapan dana sampai dengan Triwulan III telah mencapai Rp 1,7 miliar. Terdapat 4 output yang harus dicapai oleh kegiatan ini yaitu: i) *strengthen partnership initiative*; ii) *mechanism for South-South and Triangular Cooperation framework truly implemented and further cooperation strategy developed*; iii) *20% increase in the number of GOI staff, including local government, and private sector participants in the capacity development initiatives related to development cooperation*; dan iv) *knowledge management system well maintained and lesson learned captured*.

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai output 1 antara lain dukungan untuk pertemuan tingkat tinggi Mexico terkait *Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)* dan kegiatan *knowledge sharing*, selain itu juga dilakukan finalisasi studi kerjasama pembangunan internasional khususnya dalam SSTC dan *knowledge sharing* serta koordinasi lebih lanjut dalam penyusunan rencana kerja untuk kerjasama pembangunan internasional.

Pada output 2 terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan salah satunya dalam penyusunan konten untuk *quick wins pilot project SSTC* terkait perencanaan dan

penganggaran, mengalami keterlambatan dalam memperoleh persetujuan dari pemerintah. Hal ini juga terjadi pada kegiatan *scoping mission* dan dukungan untuk penyusunan *Country Partnership Strategy (CPS)* dengan Myanmar. Keterlambatan juga terjadi pada kegiatan institusionalisasi *NCT's Working Groups* serta penyusunan SOP dan *workflow*. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan keterlambatan dalam kegiatan SSTC secara keseluruhan, penanggung jawab kegiatan terus melakukan koordinasi yang intensif dengan seluruh anggota *working group* dan mendorong agar SOP dapat segera disetujui. Capaian yang cukup memuaskan pada output 2 adalah sudah diperolehnya dukungan terhadap kegiatan SSTC melalui kerjasama dengan JICA dan USAID.

Capaian pada output 3 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, *Project Management Guideline (PMG)* telah difinalisasi, Bappenas-UN forum sudah dilaksanakan dan rekomendasinya juga sudah ditindaklanjuti, begitu juga dengan *Country Portfolio Action Plan (CPAP) review*. Pada output 4 terkait penyusunan *framework* untuk *knowledge sharing* mengalami keterlambatan dalam proses di internal pemerintah karena terbatasnya sumberdaya, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut saat ini masih dilakukan konsultasi dengan beberapa ahli.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Terjadi keterlambatan pada beberapa kegiatan terkait output 2, 3, dan 4, penanggungjawab kegiatan diharapkan dapat melakukan upaya-upaya percepatan dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait.

- **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- *Strengthening Women Participation and Representation in Governance in Indonesia (SWARGA)*

Hibah SWARGA merupakan kerjasama lanjutan antara pemerintah Indonesia dengan UNDP dalam mendokumentasikan dan menganalisis partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan. Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain: i) mendukung pembangunan masyarakat yang terinformasi dan berpartisipasi aktif, sehingga persepsi publik mengenai peran perempuan dalam pemerintahan lebih seimbang; ii) memperkuat kapasitas institusi dan membangun jaringan dengan pihak berwenang untuk mengadvokasi hak-hak dan keterwakilan perempuan; iii) kontribusi terhadap upaya reformasi birokrasi dalam mendukung lingkungan karir yang ramah terhadap perempuan dan mekanisme *gender focal point* melalui kebijakan dan dukungan teknis; dan iv) menyediakan data dan kontribusi untuk pembangunan wawasan dalam isu-isu yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan serta memanfaatkan *lesson learned* dan *best practices* untuk kualitas kebijakan dan program.

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Sampai dengan Triwulan III TA 2014 realisasi dana telah mencapai 86% dari total nilai hibah. Hibah ini dilaksanakan melalui mekanisme COSS (*Country Office Support Services*) sehingga dana dikelola oleh UNDP, namun demikian diharapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap memiliki *ownership* yang kuat terhadap kegiatan ini.

Terdapat 2 output yang ingin dicapai yaitu: i) pengembangan mekanisme kunci untuk mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan demokratis pada level nasional maupun regional khususnya untuk perempuan; dan ii) program nasional untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan terbentuk dan diimplementasikan. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mencapai target output tersebut diantaranya pelatihan dan pembekalan untuk calon legislatif di 11 provinsi. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga legislatif di tingkat pusat cenderung menurun, namun pada tingkat kabupaten/kota partisipasi perempuan meningkat cukup signifikan.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan, namun pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat segera melakukan pengesahan terhadap hibah yang telah direalisasikan karena sampai saat ini belum tercatat di Kementerian Keuangan sebagai penerimaan negara dari hibah.

Box 3: Kunjungan Lapangan

Hibah United Nations Development Programme (UNDP):

Strengthening Community-Based Forest And Watershed Management (SCBFWM)

Profil Proyek:

Proyek SCBFWM (Penguatan Hutan Berbasis Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) dirancang untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan degradasi lahan dan hutan di Indonesia dalam rangka merehabilitasi fungsi DAS dan jasa lingkungan serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. SCBFWM dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan dengan bantuan dana hibah dari *Global Environment Facilities* (GEF) yang difasilitasi oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) di Indonesia. Kebutuhan pendanaan untuk keseluruhan proyek sebesar \$ 49,45 juta. Dari jumlah tersebut, proyek mendapatkan dukungan pendanaan hibah yang berasal dari GEF sebesar (\$ 7 juta), UNDP sebesar \$ 0,5 juta dan mitra pembangunan lainnya sebesar \$ 0,95 juta. Sementara Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mendukung proyek melalui APBN yang dialokasikan untuk sektor kehutanan sebesar \$ 41 juta.

Proyek memulai aktivitas pada kuartal terakhir 2009 dan akan selesai pada akhir tahun 2014. Kegiatan utama yang dilakukan ialah meningkatkan kapasitas dan perbaikan koordinasi para pihak untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung SCBFWM serta membangun plot demonstrasi pengelolaan hutan dan DAS berbasis masyarakat di 6 (enam) lokasi DAS/Sub-DAS terpilih yaitu: i) Sub-DAS Gopgopan di Sumatera Utara; ii) Sub-DAS Way Besai di Lampung; iii) Sub-DAS Tulis di Jawa Tengah; iv) DAS Jangkok di Nusa Tenggara Barat; v) Sub-DAS Besiam di Nusa Tenggara Timur; dan vi) Sub-DAS Miu di Sulawesi Tengah.

Hasil Kunjungan Lapangan:

- CBO Besiru Lestari

Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat, dampak yang dirasakan adalah kelompok masyarakat binaan SCBFWM mendapat akses yang luas dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada sejalan dengan upaya konservasi, khususnya pengelolaan hutan dan DAS terpadu. Salah satu manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan ini yaitu masyarakat mendapatkan pembelajaran mengenai administrasi (kas, notulensi, inventarisasi), pengetahuan cara bertanam yang benar, serta dapat mengolah hasil pertanian agar dapat bernilai ekonomi lebih tinggi.

Pendampingan dari fasilitator merupakan unsur yang penting dalam mencapai keberhasilan kegiatan terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Sebelumnya pernah ada kegiatan serupa yang dilaksanakan tanpa pendampingan dari fasilitator, namun manfaatnya tidak optimal bagi masyarakat. Selain itu, komitmen yang kuat dari pemerintah daerah juga berkontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan.



Gambar 1. CBO Besiru Lestari

- Kelompok Perempuan Ale-Ale

Kelompok Perempuan Ale Ale mendapat *small grant* dari SCBFWM pada tahun 2010 dengan aktifitas pembibitan tanaman Sengon. Pada awal kegiatan ditargetkan pembibitan sebanyak 25.000 bibit, namun ternyata kelompok ini dapat membuat hingga 40.000 bibit. Kelebihan bibit tersebut dijual dan uang hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam kas untuk digunakan bersama. Dana SCBFWM untuk tiap-tiap kelompok sebesar Rp 15 juta per tahun. Pembelajaran yang didapat dari pendampingan tersebut yaitu selain berdampak pada peningkatan ekonomi, keahlian dalam beradministrasi, dan perubahan gaya hidup, saat ini masyarakat menjadi lebih peka dan peduli terhadap lingkungannya.



Gambar 2. Kelompok Perempuan Ale-Ale

- Kelompok Tani Sinar Pemancingan Dusun Gerebegan

Kelompok tani ini merupakan kelompok tani yang melakukan aktifitas konservasi alam dalam hal air. Pada tahun 2003/2004 lahan di daerah Dusun Gerebegan relatif kering dan tandus disebabkan oleh kondisi geografisnya dan juga tingkat kepedulian masyarakat yang kurang terhadap kondisi lingkungan. Setelah kegiatan SCBFWM dilaksanakan di daerah ini salah satunya melalui kegiatan penghijauan dengan penanaman tumbuhan jenis Gamelia (Jati Putih), kondisi lingkungan perlahan mulai membaik. Selain melakukan penghijauan, kegiatan yang dilakukan adalah menyelamatkan mata air yang ada di dusun ini yaitu Mata Air Goa dan pembuatan tampungan air bersih untuk masyarakat di lokasi mata air tersebut. Namun lokasi mata air yang berjarak \pm 390 m dari permukiman penduduk dengan kontur tanah yang terjal, maka SCBFWM berupaya untuk melakukan pipanisasi lanjutan agar air dapat langsung diakses dari rumah penduduk.

Permasalahan lain yang dihadapi saat ini adalah debit mata air Goa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Dusun Gerebegan. Terdapat mata air dengan debit yang lebih besar, namun lokasinya terlalu jauh (\pm 2,5 KM) sehingga dibutuhkan dana yang lebih besar untuk membuat saluran ke permukiman penduduk. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.



Gambar 3. Kelompok Tani Sinar Pemancingan Dusun Gerebegan

Pembelajaran/ *Lessons Learned*

Dari hasil kunjungan, diperoleh beberapa pembelajaran/*lessons learned* yang dapat diterapkan pada pelaksanaan proyek/program di masa mendatang. Beberapa pembelajaran tersebut antara lain:

1. Pendampingan oleh fasilitator lapangan dan komitmen dari pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan kegiatan.
2. Memposisikan masyarakat sebagai agen penggerak membuat *ownership* di masyarakat menjadi lebih kuat dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan menjadi lebih optimal.
3. Kreativitas dan inovasi dari masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan.
4. Kegiatan *sharing* antar kelompok tani harus lebih sering dilakukan untuk berbagi pengalaman dengan kelompok tani lain.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Masyarakat masih memerlukan pendampingan untuk menunjang dan melanjutkan kegiatan-kegiatan kelompok tani.
2. Dibutuhkan koordinasi di lingkungan pemerintah dalam mendukung kegiatan SCBFWM. Tidak sinkronnya program pemerintah di Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kendala yang menghambat keberlangsungan program ini.
3. Perlu dibuat satu regulasi khusus untuk menjamin keberlanjutan program SCBFWM.
4. Potensi-potensi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mampu meningkatkan pendapatan, kreatifitas maupun inovasi masyarakat.
5. *Capacity Building* juga perlu diberikan kepada perangkat daerah bukan hanya kelompok masyarakat

HIBAH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact

Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah institusi independen Pemerintah AS yang menyalurkan bantuan dengan misi penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. MCC menyalurkan hibah kepada negara mitra dalam bentuk program *Threshold* dan *Compact*. Program *Threshold* merupakan hibah kecil yang diberikan kepada negara-negara dengan kriteria tertentu dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kebijakan mereka. Program *Compact* adalah hibah bersaing dalam jumlah besar yang diberikan kepada negara-negara yang telah berhasil melewati skor median korupsi dan berhasil melaksanakan program *Threshold*.

Millennium Challenge Compact untuk Indonesia telah ditandatangani tanggal 19 November 2011 dan mulai efektif sejak tanggal 2 April 2013 dan akan berlaku sampai dengan 1 April 2018 (tidak dapat diperpanjang lagi).

Tabel 3.3 Gambaran umum Hibah Program MCC *Compact*

Gambaran Umum		
Instansi Penanggung jawab	Kemen PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	
Sumber Dana	<i>Millennium Challenge Corporation (MCC)</i>	
Waktu Efektif	2 April 2013 – 1 April 2018 (5 Tahun)	
Nilai Hibah	USD 600.000.000	
		<i>Implementing Entity</i>
Komponen kegiatan	<i>Green prosperity</i>	Masih dalam proses
	<i>Community-based Health and Nutrition</i>	Kementerian Kesehatan
	<i>Procurement modernization</i>	LKPP

Hibah Program *Compact* sebesar USD 600 juta untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 3.4 Komponen Pembiayaan Program MCC *Compact*

(Dalam Juta USD)

No.	Komponen	Nilai	Persentase (%)
1	<i>Green Prosperity</i>	332,50	55,40
2	<i>Community-based Nutrition</i>	131,50	22,00
3	<i>Procurement Modernization</i>	50,00	8,00
4	<i>Administration and Control</i>	75,80	12,60
5	<i>Monitoring and Evaluation</i>	10,20	2,00
Total		600,00	100,00

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Dana Hibah senilai USD 600 juta dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan tingkat penyerapan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran *Compact*

(Dalam Juta USD)

No.	Kegiatan	Jumlah	Penyerapan (s/d Juni 2014)	
			Nilai	%
1	<i>Green Prosperity Project</i>	332,50	0,40	0,12
2	<i>Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project</i>	131,50	22,94	17,44
3	<i>Procurement Modernization Project</i>	50,00	2,08	4,20
4	<i>Monitoring & Evaluation</i>	75,80	0,00	0,00
5	<i>Administration and Control</i>	10,20	11,27	14,90
Total		600,00	36,70	6,10

DIPA Satker Pengelola Hibah MCC pada Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 260 miliar dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu Rupiah Murni sebesar Rp 10 miliar
- Pagu Hibah Langsung Luar Negeri Rp 250 miliar

Pencapaian kinerja output pelaksanaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2014, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC telah mengesahkan dana hibah sebesar Rp 46,56 miliar (18,63%) dari Rp 250 miliar dana hibah yang dialokasikan pada tahun 2014 dalam bentuk SPHL sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengesahan Hibah Langsung *Program Implementation Agreement-Grant Agreement* MCC s/d Triwulan III Tahun 2014

(Dalam Juta IDR)

No.	Tanggal	Nomor SPHL	Nilai SPHL
1	2 Juli 2013	248602Y/140/701	189.831,60
2	18 November 2013	253238Y/140/701	41.276,67
3	05 Desember 2013	254246Y/140/701	7.928,82
4	11 Maret 2014	141400501660001	12.897,88
5	12 Mei 2014	141400501660003	16.898,74
6	12 Mei 2014	141400501660002	6.338,07
7	10 Juni 2014	141400501660004	10.430,19
Total			285.601,97

Penyerapan yang dicapai pada Triwulan III untuk Rupiah Murni (RM) Satker Pengelola Hibah MCC senilai Rp 7,67 miliar (76,71%) dari total anggaran sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2014. Untuk penyerapan Komponen Hibah pada Triwulan III senilai Rp 46,56 miliar (18,63%) dari total anggaran sebesar Rp 250 miliar pada tahun 2014. Dengan demikian Penyerapan total Rupiah Murni dan Komponen Hibah mencapai Rp 54,23 miliar atau 20,86% dari total Rp 260 miliar di tahun 2014.

Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan III Tahun 2014

(Dalam Juta IDR)

No.	Komponen	Total Anggaran	Penyerapan (s.d. September 2014)			
			Target	(%)	Realisasi	(%)
1	Rupiah Murni (RM)	10.000,00	7.767,61	77,68	7.670,54	76,71
2	Hibah	250.000,00	187.500,00	75,00	46.564,88	18,63
Total		260.000,00	130.533,12	75,10	50.884,49	20,86

Penyerapan Rupiah Murni pada Triwulan III sudah mendekati target yang direncanakan. Sementara untuk Komponen Hibah, rendahnya tingkat penyerapan disebabkan sebagai berikut:

- Kegiatan GP yaitu PLUP *activities*, *Technical Assistance & Oversight Activities*, dan *Green Knowledge activities*, berstatus Masih Tahap Persiapan;
- Kegiatan *Procurement Modernization* yaitu program sudah berjalan namun masih dalam skala kecil;
- Kegiatan *Community Based Health and Nutrition* yaitu Penguatan Penyedia Pelayanan, Kampanye Perubahan Perilaku, Monitoring & Evaluasi, berstatus Masih Tahap Permulaan;
- Kegiatan Monev untuk *baseline survey*, pengembangan design monitoring-evaluasi dan dampak dari *Program Compact*, berstatus Program Belum Berjalan;
- Satker Pengelola Hibah MCC masih menunggu pengesahan revisi usulan pengurangan alokasi HLN oleh Kementerian Keuangan. Saat ini ada dana hibah yang sudah siap untuk disahkan sebesar Rp 52,37, dikarenakan status DIPA masih proses revisi sehingga menyebabkan proses pengesahan hibah dalam bentuk SPHL tertunda. Apabila usulan revisi disetujui, maka bisa dipastikan penyerapan anggaran Satker Pengelola Hibah MCC akan meningkat signifikan menjadi sebesar 82,44% hanya untuk alokasi HLN saja (tanpa Rupiah Murni).

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Fase implementasi penuh akan dimulai sehingga seluruh persiapan harus diselesaikan selama kuartal ini. Penyesuaian peran dan tanggung jawab, termasuk rentang kendali, struktur organisasi, dan detail deskripsi pekerjaan akan diselesaikan untuk ke dua program dan operasi, termasuk *review* dan revisi SOP dan peraturan internal terkait, prosedur, dan mekanisme (*FAP*, *Procurement Guideline*, *M&E Plan*, dan lain-lain). Berikut ini adalah ringkasan dari kegiatan utama akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal berikutnya:

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut Pada Triwulan IV

No	Target Capaian		
	Aktifitas	Alokasi Dana	
Green Prosperity Project			USD
1	Peluncuran <i>GP-Facility (Window 1-Sustainable Livelihood, Window 2-Selected Grant Program Manager, Window 3- Community RE, dan Window 3-Commercial RE)</i> , serta peluncuran <i>GP Investment Forum</i>		
2	Menyelesaikan pengadaan <i>PMaP</i>	<i>Planned Disbursed</i>	2.998.506
3	Menyelesaikan pengadaam <i>TAPP</i>	<i>Planned Commitment</i>	3.395.073
4	Melaksanakan kegiatan 'Forum Para Pemangku Kepentingan' / <i>Multi Stakeholders Forum (MSF)</i> di Propinsi NTT (4 Kabupaten), Propinsi Jambi (4 Kabupaten), Propinsi Sulawesi Barat (2 Kabupaten)		
Community-Based Health & Nutrition Project			
1	<i>Community Block Grant</i> akan disalurkan di 11 propinsi yang telah terpilih.		
2	<i>IYCF ToT</i> untuk staf Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten, Puskesmas, bidan desa, dan kader Posyandu.		
3	Pendistribusian modul <i>Growth Monitoring</i> .		
4	Finalisasi spesifikasi <i>MM</i> , dan pengembangan pedoman <i>Started the Sanitation</i> , serta <i>ToT</i> untuk staf Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten.	<i>Planned Disbursed</i>	14.739.410
5	Kegiatan bidang penelitian formatif untuk kampanye kesadaran nasional di lapangan.	<i>Planned Commitment</i>	14.265.423
Procurement Modernization Project			
1	<i>Roll-out</i> untuk pengembangan organisasi		
2	Penandatanganan <i>Implementing Entity Agreement (IEA)</i> dengan lembaga pelatihan BPK		
3	Mengembangkan <i>toolbox PPP</i>	<i>Planned Disbursed</i>	3.233.428
4	<i>Roll Out</i> rencana kerja SPP	<i>Planned Commitment</i>	6.439.390
5	Melakukan penilaian Tahap-1 untuk mengukur indikator monitoring dan evaluasi dan ekonomi IRR.		

Mengingat kemampuan penyerapan dari MCA-Indonesia hanya rata-rata sekitar Rp 10,1 miliar/bulan, maka pagu hibah yang dialokasikan didalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC akan diturunkan menjadi Rp 120 miliar.

Melalui memorandum PPK Pengelola Hibah MCC nomor 138/PPK-MCC/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 Satker Pengelola Hibah MCC telah mengajukan usulan revisi anggaran IV Tahun Anggaran 2014. Revisi yang diajukan termasuk permohonan penurunan alokasi HLN sebesar Rp 250 miliar menjadi Rp 120 miliar.

Tabel 3.9 Gambaran Penyerapan Anggaran Hibah Satker Pengelola Hibah MCC Apabila Dikurangi

(Dalam Juta Rupiah)

No	Komponen	Apabila Tidak Dikurangi			Apabila Dikurangi		
		Alokasi	Penyerapan	%	Alokasi	Penyerapan	%
1	Rupiah Murni	10.000,00	7.670,54	76,71	10.000,00	7.670,54	76,71
2	Hibah	250.000,00	46.564,88	18,63	120.000,00	46.564,88	38,80
Total		260.000,00	54.235,42	20,86	130.000,00	54.235,42	41,72

Penurunan alokasi HLN juga didukung oleh surat dari Direktur Eksekutif MCA-Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Eksekutif Bidang Operasi MCA-Indonesia nomor 210/UPP/MCA-

I/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014. Dalam surat tersebut, pertimbangan pengajuan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Masih belum disepakatinya manual pelaksanaan “jendela” 2 tentang NRM-Grant dan “jendela” 3 tentang RE Grant Proyek Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*), yang mengakibatkan tertundanya rencana pencairan dana sebagaimana direncanakan sebelumnya;
- Proses pengadaan yang cukup panjang telah mengakibatkan tertundanya jadwal pelaksanaan proyek karena belum tertandatanganinya kontrak sesuai jadwal;
- Belum disepakatinya mekanisme pembiayaan kegiatan pelatihan dengan BRI telah mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pelatihan untuk kegiatan *Health and Nutrition*;
- Adanya penundaan pemberian otorisasi pencairan selama 3 minggu kepada Direktur Eksekutif MCA-Indonesia akibat belum disetujuinya pengajuan QDR-6 periode Juli-September 2014;
- Sesuai dengan kecenderungan jumlah pencairan dana yang terjadi sampai dengan bulan Juli 2014, maka kami memperkirakan capaian pencairan yang dapat diproses pengesahannya selama bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 adalah sebesar Rp 35,1 miliar.

Dengan demikian, sehubungan dengan adanya pengajuan revisi alokasi HLN maka pada Triwulan III TA 2014 tidak ada pengesahan SPHL. Hingga tanggal 30 September 2014, Satker Pengelola Hibah MCC masih menunggu DIPA Revisi untuk disahkan.

Tabel 3.10 Rencana Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC Triwulan IV Tahun 2014

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Komponen	Total Anggaran	TW IV (Okt – Des 2014)	
			Target	%
1	Rupiah Murni (RM)	10.000,00	10.000,00	100,00
2	Dana Hibah	250.000,00	250.000,00	100,00
Total		260.000,00	260.000,00	100,00

HIBAH PEMERINTAH JERMAN

Forest Programme

Forest Programme adalah sebuah program yang dalam kontribusinya untuk mendukung Kebijakan pengurangan emisi gas buang yang disebabkan dari kerusakan hutan dan degradasi hutan (REDD+). Instansi penanggung jawab Kementerian Kehutanan.

Tabel 3.11 Gambaran Umum Hibah *Forest Programme*

Gambaran Umum	
Pengelola	Kementerian Kehutanan
Sumber Dana	Grant TF 2007 66 087 (GIZ dan USAID)
Lingkup pekerjaan	a. Pemberian arahan bagi pengembangan strategi REDD+, dan pembangunan hutan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. b. Pemberian arahan teknis terkait dengan kerangka kerja pelaksanaan kegiatan demonstrasi REDD di berbagai tingkatan, termasuk perencanaan partisipatif penggunaan lahan dan zonasi hutan. c. Desain inovatif terkait dengan mekanisme dan peraturan bagi inisiatif REDD+ berbasis kabupaten. d. Fasilitasi pengawasan, pelaporan dan verifikasi. e. Dukungan bagi proses reformasi administrasi kehutanan seperti pembentukan unit-

Gambaran Umum	
	unit pengelolaan hutan dan sistem-sistem terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan. f. Dukungan untuk pelestarian alam dan pembagian keuntungan dalam inisiatif <i>Heart of Borneo</i> (HoB). g. Pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan untuk mendukung mata pencaharian lestari di pedesaan. h. Membangun kapasitas untuk pengelolaan hutan lestari dan pelestarian alam. i. Konsultan dalam mendukung pelaksanaan manajemen keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain.
Lokasi	1. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 2. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara 3. Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Durasi Proyek	2011-2018
Nilai Hibah	1. Porsi Pemerintah Indonesia: Rp 3.705.499.2000 (eq. EUR 2.315.937) 2. Porsi Pemerintah Jerman: EUR 20.000.000 (hibah)

Realisasi Dana dan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Perkembangan capaian kinerja pelaksanaan proyek secara umum adalah sebagai berikut:

1. *Concept Paper* untuk 3 *Demonstration Activities* (DA) telah disiapkan sesuai dengan spesifikasi yang disiapkan misi KfW pada bulan September dan November 2013. Outline strategi dan kegiatan tahun 2014 telah mendapatkan persetujuan KfW (NOL bulan April 2014) dan pelatihan /sosialisasi mengenai *concept paper* tersebut telah dilaksanakan di tingkat Kabupaten.
2. Program Manual untuk pelaksanaan tahun 2014 – 2017 telah mengalami revisi dan perbaikan;
3. Petunjuk Teknis (Juknis) telah disiapkan oleh *National Programme Management Unit* (NPMU) untuk PLUP, *community nursery and planting practice, Measurement, Reporting and Verification* (MRV) dan *carbon look-up table*;
4. Untuk meningkatkan akurasi dan hasil *Remote Sensing Solutions* (RSS) *carbon study* di kabupaten dan tingkat DA, inventarisasi karbon sedang dilaksanakan dengan menggunakan pencitraan *Rapid Eye* yang dibeli pada tahun 2013 untuk membuat peta stok karbon dan penggunaan lahan sebagai referensi untuk masing-masing DA;
5. *Reference Emission Level* (REL) telah disiapkan oleh konsultan dan telah dipresentasikan dalam *workshop* yang melibatkan pemerintah kabupaten dan *stakeholder* di tingkat kabupaten;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Perencanaan Pemanfaatan Lahan Kabupaten untuk menjamin output pelaksanaan kegiatan program *Forclime* yang akan diintegrasikan dengan sistem perencanaan tata ruang;
7. Proposal Pengurangan Dampak Pembalakan Liar (*Reduce Impact Logging* – RIL) telah didiskusikan dengan *Tropical Forest Fund* (TFF) untuk menggali kemungkinan melaksanakan kontrak kerjasama antara *Program Forclime*- Komponen FC dan TFF untuk melaksanakan percontohan kegiatan RIL di Berau. Saat ini TFF telah dikontrak oleh *Program Forclime* - komponen TC untuk mengerjakan kegiatan percontohan 200 ha di Malinau dengan ruang lingkup pekerjaan adalah mengevaluasi lingkungan, keuangan dan manfaat ekologi dari pengurangan dampak pembalakan liar. Kontrak tersebut diharapkan dapat terlaksana pada tahun 2014 ini;
8. Mekanisme keuangan untuk investasi mitigasi berbasis kegiatan (*activity-based mitigation investation*) telah dibuat pada tahun 2012 dan diuji coba pada tahun 2013 dengan investasi cepat (*quick star investment*) sebesar Rp 50 juta per desa, telah dilaksanakan di 3 area DA. Sedangkan mekanisme keuangan investasi berbasis kinerja (*performancelincentive-based investment*) sedang dalam proses;

9. Audit keuangan tahun 2013 telah dilaksanakan oleh auditor independen yang dikontrak oleh NPMU pada bulan Mei-Juni 2014. NPMU akan menyerahkan hasil audit tersebut secara resmi kepada KfW bersamaan dengan Laporan Tahunan yang sudah lengkap;
10. NPMU dan *District Programme Management Unit* (DPMU) telah melaksanakan perampingan struktur dan kebutuhan staf yang bekerja dan berakhir pada Desember 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien serta untuk pengurangan biaya;
11. Amandemen kontrak konsultan telah disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan dan telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2014.

Isu Pelaksanaan Proyek

- **Penyerapan/Realisasi Anggaran**

Program *Forclime* merupakan kegiatan yang didanai dari hibah. Untuk Modul FC merupakan hibah terencana dimana pelaksanaan dan administrasi anggaran dilakukan dengan mekanisme APBN (*on budget*) melalui KPPN. Sedangkan untuk modul TC merupakan hibah langsung berupa barang dan Jasa yang administrasi dan anggarannya dilaksanakan langsung oleh GIZ (*off budget*). Realisasi penyerapan anggaran untuk program *Forclime-Module* TC relatif lambat di awal-awal tahun kegiatan, namun mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh karena Kementerian Kehutanan baru pertama kali melaksanakan kegiatan dengan hibah terencana. Disamping itu, beberapa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat kerap kali mengalami keterlambatan karena kapasitas masyarakat dalam merencanakan suatu kegiatan masih terbatas. Sebagai contoh dalam penyampaian proposal usulan kegiatan di masyarakat yang terlambat disampaikan, yang berakibat keterlambatan pelaksanaan proses kegiatan selanjutnya.

Tabel 3.12 Gambaran Umum Hibah *Forest Programme*

(Dalam Ribu EUR)

Paket Kontrak Konsultan GFA	Penyerapan per 31 Des 2013	PENYERAPAN TA 2014							
		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
3.400,00	1.797,66	0,00	0,00	265,78	265,78	0,00	0,00	265,78	0,00

- **Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Kegiatan**

Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan lapangan sebagai panduan tim lapangan bekerja sangat diperlukan agar tidak terjadi keraguan dalam menyampaikan kegiatan program kepada masyarakat. Saat ini, juknis tersebut masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Kehutanan dan perlu segera diselesaikan untuk dapat disosialisasikan dan pelatihan bagi tim lapangan.

- **Dukungan untuk Kegiatan lapangan**

Daerah cakupan kegiatan program *Forclime* sangat luas sehingga perlu dukungan yang lebih baik termasuk dukungan dengan meningkatkan frekuensi kunjungan lapangan dalam memobilisasi tenaga lapangan untuk melakukan monitoring, patroli atau koordinasi dengan *stakeholder* lainnya.

- **Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat di Hutan Milik Negara**

Salah satu program *Forclime* adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan agar memiliki taraf hidup yang lebih baik dengan cara memberikan bibit-bibit pohon

tertentu yang memiliki nilai ekonomi tinggi (contoh Karet, gaharu dan buah-buahan). Hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menanamnya. Beberapa masyarakat menggunakan lahan penanaman pohon tersebut dengan memanfaatkan hutan milik negara sebagai lahan untuk bekerja.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

- Mempercepat penyusunan Juknis Lapangan agar dapat disosialisasikan dan pelatihan bagi tim lapangan;
- Memberikan dukungan yang lebih bagi tenaga lapangan untuk mempercepat mobilisasi dan frekuensi kunjungan lapangan;
- Melakukan studi/kajian pemanfaatan lahan oleh masyarakat di hutan milik negara.

BAB IV

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI

Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction Project

Proyek *Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction* (SAFVER) dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Direktorat Bisnis Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Proyek ini didanai melalui pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) sebesar USD 34,4 juta. Proyek ini mulai efektif pada tanggal 15 Juli 2007 dan berakhir pada 31 Desember 2013. Tujuan dari proyek SAFVER adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan budi daya perikanan. Terdapat lima Kabupaten di empat provinsi yang ikut serta dalam kegiatan SAFVER, yaitu Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1 Profil Proyek *Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction*

Kode Loan	2285-INO
Nama Proyek	<i>Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction</i> (SAFVER)
Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nilai Pinjaman	USD 34,4 juta
Masa Laku Pinjaman	15 Juli 2007 s/d 31 Desember 2013

Melalui proyek SAFVER, diharapkan terjadi peningkatan produksi ikan serta produk perikanan (perairan) lainnya, peningkatan pendapatan, nutrisi, dan status ketenagakerjaan dari nelayan miskin dan masyarakat pesisir di lokasi-lokasi tersebut. Untuk mencapai *outcome* dan tujuannya, proyek SAFVER menetapkan tiga *output*, yaitu: i) peningkatan produksi perikanan, ii) layanan dukungan perikanan, dan iii) penguatan kelembagaan/institusional serta manajemen proyek.

Pencapaian Indikator Kinerja

Secara umum, seluruh komponen output proyek berhasil dicapai pada saat berakhirnya proyek. Peningkatan produksi dan pendapatan juga terjadi di hampir seluruh lokasi dengan rata-rata peningkatan produksi sebesar 60% dan peningkatan pendapatan sebesar 70%. Konsumsi ikan masyarakat juga meningkat dengan adanya proyek ini (rata-rata 83%) di kelima lokasi proyek dibandingkan di tahun 2006. Selain itu, proyek ini juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ditandai dengan menurunnya jumlah keluarga miskin di lokasi SAFVER dari 15 – 25% di 2006 menjadi 10 – 16% di 2011. Pendapatan keluarga miskin juga mengalami peningkatan dari Rp 1,28 juta di 2004 menjadi Rp 19,58 juta di 2012.

Pembelajaran

Selama pelaksanaan kegiatan SAFVER terdapat berbagai pembelajaran, antara lain :

- Pengarusutamaan *gender* melalui pembentukan kelompok dan program pelatihan pembangunan kapasitas dalam produksi perikanan dan pengolahan makanan merupakan strategi yang efektif dalam memberdayakan perempuan;
- Pembentukan dan penguatan kerja sama merupakan strategi yang baik dalam menjaga keberlanjutan manfaat proyek setelah proyek selesai;
- Waktu yang memadai harus disediakan untuk konsultan desain dalam mempersiapkan desain pekerjaan sipil yang berskala besar guna menjamin kualitas pekerjaan;
- Sebelum memberikan kontrak pekerjaan sipil kepada kontraktor yang mengajukan tawaran dengan harga yang sangat rendah, kontraktor tersebut harus memberikan penjelasan dan justifikasi yang dapat diterima mengenai harga yang sangat rendah tersebut guna memastikan penyelesaian pekerjaan sipil yang tepat waktu dengan standar kualitas yang baik;
- Pendorongan kelompok penerima manfaat untuk menjalankan kontrak pekerjaan sipil skala kecil merupakan salah satu cara yang lebih produktif dan lebih murah daripada merekrut konsultan terutama karena rasa kepemilikan atas pekerjaan yang telah selesai tersebut;
- Orientasi kepala daerah mengenai proyek dan pelibatan partisipasi kepala daerah sejak awal proyek merupakan hal yang krusial dalam memastikan keberlanjutan dukungan kepada proyek untuk menjaga keberlanjutan manfaat yang didapatkan dari proyek; dan
- Kepemimpinan yang efektif dan baik dari Direktur Proyek (*Project Director*) di PMO dan Dinas Perikanan, dedikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Tenaga Penyuluh Berbasis Masyarakat/*Community-based Extension Worker* (CEW) dalam memobilisasi dan memperkuat kelompok penerima manfaat yang berbeda-beda, serta komitmen yang kuat dari konsultan dalam memantau dan mengawasi proyek merupakan kunci utama kesuksesan proyek.

Keberlanjutan dan Rencana Replikasi

Berdasarkan pembelajaran yang didapatkan selama pelaksanaan proyek, proyek SAFVER mengajukan beberapa rekomendasi guna keberlanjutan atau replikasi proyek :

- **Pemantauan Keberlanjutan Proyek**

Dinas Perikanan di lima Kabupaten yang tercakup dalam wilayah proyek harus melanjutkan pemantauan kinerja dan aktivitas kelompok penerima manfaat proyek, masalah yang muncul di dalam perikanan budi daya atau proses bisnisnya termasuk performa finansial dari kelompok bisnis tersebut, serta kepemilikan (*asset*) dari berbagai fasilitas infrastruktur yang dibangun atau disediakan oleh proyek. Pemantauan ini akan membantu dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan manfaat proyek setelah proyek selesai, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Selain itu, disarankan pula untuk melibatkan kelompok penerima manfaat proyek dalam menerapkan pemantauan dan evaluasi partisipatif. Selain itu, perlu adanya kepastian komitmen penuh dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana untuk pemantauan dan evaluasi aktivitas serta dalam penyediaan fasilitas dan bantuan teknis untuk kelompok penerima manfaat proyek setelah proyek selesai.

- **Pelatihan untuk Penerima Manfaat**

Keberlangsungan dari kegiatan ini perlu diupayakan terus melalui pelatihan/pendampingan, khususnya melalui kelembagaan koperasi. Selain hal tersebut untuk manajerial perlu dilaksanakan pula untuk kelompok nelayan, termasuk kelompok wanita, karena beberapa kelompok tersebut akan membentuk koperasi dalam rangka meningkatkan akses ke institusi keuangan dan memudahkan mereka untuk menyediakan pelayanan ekonomi kepada para anggotanya. Bantuan dalam hal pemasaran juga perlu disediakan secara terus-menerus, terutama untuk kelompok nelayan yang memproduksi ikan dan produk perikanan dalam skala besar. Bantuan ini dapat dilakukan melalui pembentukan jaringan pasar atau dengan memfasilitasi pengaturan pertemuan dengan pembeli potensial.

- **Penyelesaian Masalah Penurunan Kualitas Air**

Dinas Perikanan, terutama di Kabupaten Karawang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Buton, bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepala daerah untuk mendorong penyelesaian masalah menurunnya kualitas air di kabupaten proyek terkait yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri, pertambangan, dan pertanian ke sungai. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kepala daerah terkait perlu memfasilitasi pelaksanaan pertemuan multisektoral dengan perwakilan dari perusahaan industri dan pertambangan dengan kelompok penerima manfaat proyek SAFVER.

Proyek SAFVER merupakan salah satu proyek yang dianggap sukses, oleh karena itu, *design* proyek diharapkan dapat direplikasi di lokasi lainnya. Saat ini, KKP telah mulai memperkenalkan desain serta pembelajaran proyek SAFVER ke daerah di luar 5 lokasi proyek, salah satunya adalah Kota Bogor dan akan menyusul ke daerah-daerah lainnya. Untuk replikasi proyek secara menyeluruh, KKP dan pihak terkait akan menyusun konsep replikasi, mencakup penyusunan rencana serta sumber pendanaannya.

Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU)

BERMUTU merupakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Terdapat empat komponen untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: i) mereformasi pendidikan bagi calon guru; ii) Memperkuat upaya peningkatan mutu guru pada tingkat kabupaten dan sekolah; iii) memperbaharui sistem akuntabilitas dan insentif untuk meningkatkan kinerja dan karir guru; dan iv) meningkatkan monitoring dan evaluasi mutu guru dan prestasi belajar murid. *Executing agency* dari proyek ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek ini efektif pada tanggal 5 Februari 2008 dan berakhir pada 31 Desember 2013. Pinjaman IBRD untuk proyek mencapai USD 24,5 juta, pinjaman IDA mencapai SDR 40,3 juta, dan hibah sebesar USD 52 juta.

Tabel 4.2 Profil Proyek *Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*

Kode Loan	4349-IND
Nama Proyek	<i>Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading</i>
Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nilai Pinjaman	USD 87,13 juta
Masa Laku Pinjaman	30 Juni 2007 s/d 31 Desember 2013

Pencapaian Indikator Kinerja

Hingga akhir pelaksanaan proyek, sebagian besar capaian indikator proyek telah melebihi target. Salah satu contoh indikator yang berhasil melampaui target adalah turunnya tingkat kemangkiran guru. Keberhasilan pelaksanaan indikator ini menunjukkan adanya suatu sistem yang sudah terbangun untuk perbaikan tingkat kehadiran guru. Keberlanjutan dari sistem tersebut penting untuk dilakukan.

Pembelajaran

Terdapat beberapa hasil identifikasi pembelajaran dari proyek ini. Baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca berakhirnya proyek. Salah satu pembelajaran penting dari BERMUTU adalah perlunya sosialisasi atau pemberian informasi-informasi penting terkait dengan proyek pinjaman untuk menghindari kesalahpahaman atau kurangnya pemahaman pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Apabila pada saat proyek berjalan terdapat kesalahpahaman ataupun terdapat pihak yang kurang mendapatkan informasi terkait dengan proyek pinjaman maka hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan proyek. Sebagai contoh, pada proyek ini terdapat Satker yang belum memahami pengalokasian anggaran PHLN sehingga banyak Satker yang tidak mengalokasikan dana pendamping. Seharusnya, ketika proyek pinjaman akan berjalan, proyek tersebut dapat memberikan informasi terkait dengan pengalokasian anggaran PHLN, sehingga tahap perencanaan pada proyek ini dapat lebih baik. Contoh lainnya adalah adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota terkait dengan DBL yang langsung disalurkan kepada kelompok sasaran yang dinilai melangkahi wewenang kabupaten. Sebaiknya ketika awal mula pelaksanaan kegiatan, pemerintah dapat menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan kabupaten terkait.

Sementara itu, pasca berakhirnya proyek BERMUTU terdapat dua pembelajaran penting. Pertama, meningkatnya sinergisitas antara pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kabupaten/Kota (Disdik) dalam pengelolaan dan pengembangan profesionalitas guru yang diamanahkan dalam UU No. 14 Tahun 2005. Kedua, tumbuhnya kesadaran kelompok sasaran (Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah) tentang manfaat program bagi karir mereka sehingga sebagian kelompok sasaran berinisiatif melanjutkan kegiatan dengan swadana.

Keberlanjutan dan Rencana Replikasi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Sejak Tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar telah mengembangkan program Replikasi dan Diseminasi yang didukung oleh pengalokasian anggaran termasuk untuk DBL dengan sasaran 8 Provinsi mitra dan 17 Provinsi perluasan, sehingga semua provinsi tercakup;
- Sebagian besar (48) dari 75 Kabupaten/Kota Mitra menerbitkan Perbup/PerWali yang mengawal *sustainability* program. Hal ini mengindikasikan terbangunnya harmonisasi kebijakan Pusat dan Daerah di era otonomi daerah;
- Sebagian Kabupaten/Kota telah mengadopsi program dan mengalokasikan anggaran untuk replikasi dan diseminasi termasuk DBL.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri Triwulan III TA 2014, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Total nilai pinjaman luar negeri pada Triwulan III TA 2014 mencapai ekuivalen USD 18.042,89 juta. Penarikan pinjaman dari seluruh pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan III TA 2014 (posisi 30 September 2014) adalah sebesar ekuivalen USD 6.796,44 juta atau 37,67% dari total nilai pinjaman, sehingga total pinjaman yang belum ditarik sebesar ekuivalen USD 11.246,44 juta. Realisasi penyerapan periode Januari – September 2014 mencapai ekuivalen USD 1.845,42 juta atau 56,87% dari target penyerapan TA 2014 sebesar ekuivalen USD 3.244,89 juta. Jumlah proyek yang dipantau dalam Triwulan III TA 2014 meliputi 126 proyek (139 *Loan Agreement*) dan 54 proyek dari pembiayaan KSA/LPKE;
- Permasalahan yang umumnya terjadi dalam pelaksanaan proyek di triwulan ini adalah: i) pengadaan tanah yang masih menjadi kendala di Kementerian Pekerjaan Umum dan PT.PLN; ii) pengadaan barang dan jasa yang masih menjadi hambatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; iii) proses pencairan dan pencatatan masih menjadi penyebab keterlambatan penyerapan di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan PT. PLN; iv) kekurangan/kelebihan alokasi anggaran dalam DIPA yang memerlukan revisi masih menjadi penghambat proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan;
- Pelaksanaan kegiatan hibah dalam Triwulan III TA 2014 dilaporkan oleh 19 Kementerian/Lembaga. Jumlah kegiatan hibah mencapai 143 proyek dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 714 juta;
- *Lesson learned* dari proyek-proyek yang telah selesai sebagaimana terdapat dalam laporan akhir proyek (*Project Completion Report*) *Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction* (SAFVER), antara lain i) merencanakan waktu yang memadai untuk konsultan desain dalam mempersiapkan desain pekerjaan sipil guna menjamin kualitas pekerjaan; ii) memastikan kembali kapasitas kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sipil tepat waktu dengan standar kualitas yang baik sebelum melakukan kontrak pekerjaan; iii) melibatkan partisipasi kepala daerah sejak awal proyek untuk memastikan keberlanjutan dukungan dan menjaga keberlanjutan manfaat yang didapatkan dari proyek; dan iv) kepemimpinan yang efektif dan baik dari Direktur Proyek serta komitmen yang kuat dari konsultan dalam memantau dan mengawasi proyek merupakan kunci utama keberhasilan proyek. Adapun pembelajaran yang bisa diperoleh dari proyek *Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading* adalah perlunya sosialisasi atau pemberian berbagai informasi penting terkait dengan proyek pinjaman untuk menghindari kesalahpahaman atau kurangnya pemahaman pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

TINDAK LANJUT

Upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri adalah:

- Penanggung jawab proyek selain perlu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara cermat, juga harus mempertimbangkan kapasitas SDM pelaksana proyek. Konsistensi perencanaan kegiatan, termasuk rencana penyerapan perlu selalu dijaga supaya ketepatan waktu penyelesaian proyek dapat tercapai;
- Sinergi yang baik antara instansi pelaksana proyek, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan, terutama untuk mempercepat penyelesaian setiap permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, termasuk pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pengadaan lahan dan masalah sosial lainnya;
- Identifikasi pembelajaran dan dokumentasi yang baik dari setiap tahapan proyek perlu terus dilakukan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan replikasi proyek;
- Proyek-proyek yang mengalami permasalahan serius perlu mendapat perhatian khusus melalui pembahasan lebih lanjut secara intensif.